



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD 2024

**TRIWULAN IV
OKTOBER - DESEMBER**

LAPORAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RKPD KAB. PURWAKARTA

TAHUN 2024

TRIWULAN IV



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Bab I Pendahuluan	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4. Sistematika Penyajian Laporan	I - 5
 Bab II Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota ..	 II - 1
2.1. Visi dan Misi Kabupaten/Kota	II - 1
2.2. Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota	II - 2
2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	II - 12
2.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024	II - 14
 Bab III Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024	 III - 1
3.1. Capaian Kinerja Sasaran	III - 1
3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	III - 7
3.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	III - 153
 Bab IV Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja	 IV - 1
4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja	IV - 1
4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya	IV - 1
 Bab V Penutup	 V - 1
5.1. Kesimpulan	V - 1
5.2. Rekomendasi	V - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026	II - 3
Tabel 2.2	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	II - 18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019 – 2023	III - 2
Tabel 3.2	Capaian dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	III - 3
Tabel 3.3	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah / RKPD Lingkup Kabupaten Purwakarta	III - 8
Tabel 3.4	Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah / RKPD Lingkup Kabupaten Purwakarta	III - 9
Tabel 3.5	Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Triwulan IV)	III - 11
Tabel 3.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024	III - 149
Tabel 3.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	III - 150
Tabel 3.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	III - 153
Tabel 3.9	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.....	III - 154



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah serta hasil kinerja dari pelaksanaan pembangunan daerah tersebut. Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Bappelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan

kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Ruang lingkup Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistim rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi dilaksanakan terhadap kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD).

Maksud dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mengukur target capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi capaian kinerja yang belum optimal agar dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.



1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Bab II Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

- 2.1. Visi dan Misi Kabupaten/Kota
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota
- 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
- 2.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024

Bab III Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

- 3.1. Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
- 3.3. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Bab IV Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

- 4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

Bab V Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

2.1. VISI DAN MISI KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat



2.2. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN/KOTA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"						
I.		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah				
I.1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing			
I.1.1				Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan		1. Peningkatan Kualitas SDM
I.1.1.1					Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD
						Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal
						Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
I.1.1.2					Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan	Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional
						Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya
						Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
I.1.1.3					Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno
						Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
I.1.2				Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat		1. Peningkatan Kualitas SDM
I.1.2.1					Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja
						Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
						Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
						Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai
II.		Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup				
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
II.1.1				Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana		2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
II.1.1.1					Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan
						Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC
						Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
						Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
						Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat
II.1.1.2					Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	Menerapkan rencana pengendalian penduduk
						Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
						Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
						Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			
II.2.1				Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
II.2.1.1					Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
						Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
						Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
						Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
II.2.1.2					Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
II.2.2					Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
II.2.2.1					Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana	Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan
						Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
						Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal				
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat			
III.1.1					Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.1.1					Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
						Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
III.1.1.2					Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital	Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
						Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
						Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						Menyediakan Sistem Data Base UMKM
III.1.2				Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.2.1					Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi yang Kondusif	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
						Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
III.1.2.2					Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri	Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang refresentatif dan strategis
						Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu
						Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
						Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah
						Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
III.1.3				Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.3.1					Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan
						Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar
						Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata
						Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan
III.1.3.2					Strategi 15 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi	Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata
						Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
III.1.4				Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.4.1					Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
						Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
						Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
						Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
						Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
III.1.4.2					Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
						Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
III.2.1				Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan		5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
III.2.1.1					Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
						Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
						Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
						Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
III.2.2.1					Strategi 19 : Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah				
IV.1			Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah			
IV.1.1				Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah		6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
IV.1.1.1					Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap	Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata
						Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat
IV.1.1.2					Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata	Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
IV.1.1.3					Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan
						Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman
IV.1.2				Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien		6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
IV.1.2.1					Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
						Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
						Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
						Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
						Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat				
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel			
V.1.1				Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE		7. Reformasi Birokrasi
V.1.1.1				Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
V.1.1.2				Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik		Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
V.1.2				Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		7. Reformasi Birokrasi
V.1.2.1				Strategi 26 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)		Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan
						Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
						Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif
						Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah
						Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna
						Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional
						Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
V.1.2.2					Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
						Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
						Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai			
V.2.1				Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
V.2.1.1					Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
						Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa
						Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan



KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
V.2.2				Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat		8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
V.2.2.1					Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
						Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
						Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila
	1	5	8	17	29	8 / 100

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

” MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah
2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB
3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi
5. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata
6. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak



Dalam merespon permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka berdasarkan tema pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas, **Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026** yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat



2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pembangunan Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dimana penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka penyusunan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 telah disesuaikan dengan RPD Kab. Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026, termasuk Program, Kegiatan dan Subkegiatan hasil pemutakhiran terbaru dalam aplikasi SIPD-RI sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 18 (Delapan Belas) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;

18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;
6. Kelautan dan Perikanan.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) Unsur yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Unsur yang meliputi :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penelitian dan Pengembangan;
6. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Inspektorat;

Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Kecamatan;

Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik;



Dalam RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, telah mengakomodir kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada semua Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan bidang urusan pemerintahan yang diampunya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyusun program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Adapun Program, Kegiatan dan Subkegiatan pembangunan pada Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
3	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
5	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
6	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
7	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
8	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
9	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
10	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
11	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
12	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
13	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
14	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
15	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
16	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
18	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
19	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru
20	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
22	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
23	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
24	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
25	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
26	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
28	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
29	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
30	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
31	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
32	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
33	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
34	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
35	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
36	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
37	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
38	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
39	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
40	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
41	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
42	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
43	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
44	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
45	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru
46	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
47	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
48	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
49	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
50	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
51	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
52	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
53	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
54	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
55	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD
56	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
57	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
58	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
59	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
60	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
61	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
62	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
63	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
64	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
65	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
66	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
67	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
68	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
69	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
70	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
71	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
72	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
73	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
74	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
75	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
76	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
77	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
78	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
79	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
80	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
81	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
82	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
83	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
84	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
85	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
86	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
87	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
88	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
89	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
90	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
91	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
92	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
93	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
94	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
95	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
96	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
97	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
98	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
99	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
100	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
101	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
102	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
103	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
104	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
105	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
106	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
107	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
108	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
109	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
110	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
111	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
112	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
113	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
115	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
116	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
117	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
118	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
119	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
120	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
121	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
122	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
123	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
124	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
125	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
126	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
127	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
128	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
129	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
130	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
131	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
132	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
133	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
134	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
135	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
136	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
137	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
138	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
139	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
140	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
141	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
142	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
143	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
144	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
145	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
146	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
147	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
148	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
149	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
150	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
151	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
152	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
153	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
154	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
155	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
156	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
157	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
158	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
159	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
160	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
161	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
162	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
163	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
164	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
165	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
166	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
167	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
168	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
169	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
170	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
171	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
172	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
173	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
174	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
175	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
176	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
177	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
178	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
179	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
180	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
181	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
182	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
183	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
184	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
185	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
186	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
187	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
188	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
189	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
190	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
191	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
192	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
193	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
194	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
195	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
196	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
197	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
198	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
199	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
200	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
201	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
202	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
203	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
204	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
205	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
206	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
207	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
208	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
209	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
210	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
211	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
212	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
213	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
214	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
215	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
216	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
217	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
218	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
219	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
220	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
221	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
222	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
223	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
224	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
225	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
226	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
227	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
228	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
229	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
230	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
231	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
232	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
233	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
234	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
235	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
236	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
237	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
238	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
239	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
240	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
241	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
242	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
243	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
244	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
245	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
246	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
247	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
248	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
249	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
250	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
251	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
252	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
253	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
254	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
255	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
256	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
257	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
258	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
259	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
260	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
261	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
262	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
263	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
264	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
265	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
266	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
267	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
268	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
269	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
270	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
271	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
272	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
273	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
274	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
275	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
276	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
277	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
278	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
279	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
280	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
281	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
282	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
283	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
284	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
285	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
286	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
287	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
288	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
289	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
290	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
291	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
292	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
293	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
294	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
295	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
296	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
297	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
298	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
299	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
300	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
301	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
302	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
303	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
304	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
305	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
306	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
307	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
308	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
309	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
310	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
311	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
312	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
313	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
314	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
315	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
316	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
317	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
318	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
319	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
320	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
321	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
322	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
323	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
324	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
325	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
326	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
327	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
328	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
329	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
330	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
331	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
332	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
333	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
334	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
335	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
336	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
337	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
338	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
339	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
340	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
341	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
342	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
343	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
344	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
345	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
346	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
347	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
348	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
349	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
350	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
351	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
352	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
353	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
354	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
355	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
356	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
357	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
358	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
359	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
360	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
361	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
362	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
363	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
364	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
365	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
366	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
367	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
368	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
369	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
370	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
371	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
372	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
373	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
374	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
375	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
376	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
377	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
378	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
379	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
380	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
381	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
382	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
383	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
384	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
385	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
386	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
387	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
388	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
389	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
390	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
391	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
392	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
393	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
394	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
395	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
396	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
397	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
398	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
399	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
400	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
401	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
402	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
403	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
404	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
405	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
406	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
407	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
408	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
409	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
410	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
411	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
412	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
413	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
414	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
415	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
416	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
417	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
418	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
419	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
420	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
421	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
422	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
423	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
424	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
425	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
426	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
427	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
428	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
429	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
430	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
431	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
432	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
433	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
434	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
435	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
436	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
437	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
438	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
439	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
440	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
441	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
442	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
443	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
444	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
445	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
446	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
447	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
448	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
449	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
450	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
451	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
452	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
453	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
454	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
455	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
456	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
457	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
458	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
459	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
460	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
461	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
462	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
463	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
464	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
465	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
466	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
467	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
468	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
469	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
470	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
471	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
472	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
473	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
474	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
475	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
476	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
477	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
478	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
479	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
480	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
481	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
482	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
483	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
484	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
485	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
486	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
487	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
488	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
489	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
490	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
491	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
492	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
493	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
494	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
495	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
496	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
497	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
498	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
499	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
500	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
501	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
502	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
503	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
504	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
505	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
506	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
507	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
508	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
509	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
510	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
511	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
512	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
513	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
514	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
515	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
516	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
517	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
518	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
519	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
520	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
521	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
522	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
523	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
524	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
525	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
526	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
527	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
528	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
529	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
530	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
531	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
532	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
533	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
534	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
535	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
536	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
537	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
538	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
539	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
540	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
541	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
542	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
543	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
544	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
545	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
546	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
547	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
548	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
549	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
550	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
551	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
552	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
553	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
554	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
555	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
556	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
557	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
558	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
559	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
560	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
561	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
562	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
563	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
564	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
565	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
566	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
567	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
568	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
569	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
570	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
571	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
572	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
573	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
574	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
575	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
576	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
577	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
578	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
579	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
580	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
581	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
582	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
583	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
584	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
585	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
586	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
587	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
588	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
589	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
590	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR								Daerah Kabupaten/Kota		
591	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
592	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
593	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
594	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
595	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
596	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
597	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR								serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
598	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
599	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
600	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
601	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
602	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
603	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
604	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
605	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
606	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
607	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
608	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
609	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
610	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
611	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
612	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR								Daerah Kabupaten/Kota		
613	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
614	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
615	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
616	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
617	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
618	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
619	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
620	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
621	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
622	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
623	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
624	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
625	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
626	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
627	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
628	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
629	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
630	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
631	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
632	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
633	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
634	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
635	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
636	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
637	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
638	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
639	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
640	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
641	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
642	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
643	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
644	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
645	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
646	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
647	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
648	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
649	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
650	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
651	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
652	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
653	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
654	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
655	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
656	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
657	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
658	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
659	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
660	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
661	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
662	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
663	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
664	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
665	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
666	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
667	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
668	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
669	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
670	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
671	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
672	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
673	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
674	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
675	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
676	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
677	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
678	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
679	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
680	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
681	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
682	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
683	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
684	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
685	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
686	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
687	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
688	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
689	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
690	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
691	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
692	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
693	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
694	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
695	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
696	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
697	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
698	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
699	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
700	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
701	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
702	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
703	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
704	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
705	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
706	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
707	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
708	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
709	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
710	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
711	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
712	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
713	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
714	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
715	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
716	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
717	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
718	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
719	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
720	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
721	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
722	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
723	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
724	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
725	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
726	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
727	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
728	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
729	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
730	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
731	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
732	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
733	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
734	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
735	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
736	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
737	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
738	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
739	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
740	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
741	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
742	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
743	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
744	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
745	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
746	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
747	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
748	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
749	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
750	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
751	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
752	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
753	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi
754	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
755	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
756	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi
757	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
											1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
758	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
759	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
760	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
761	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
762	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
763	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
764	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
765	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
766	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
767	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
768	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
769	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
770	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
771	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
											Laik Fungsi Bangunan Gedung		
772	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
773	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
774	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
775	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
776	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
777	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan
778	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				UMUM DAN PENATAAN RUANG						serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
779	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
780	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
781	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
782	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
783	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
784	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan
785	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
786	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan
787	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
788	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan
789	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
790	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan
791	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
792	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
793	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
794	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
795	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
796	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
797	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
798	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
799	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
800	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
801	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				UMUM DAN PENATAAN RUANG				Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
802	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
803	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
804	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
805	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
806	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
807	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
808	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
809	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
810	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
811	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
812	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
813	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
814	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
815	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
816	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
817	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
818	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
819	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
820	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
821	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
822	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
823	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
824	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				UMUM DAN PENATAAN RUANG		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
825	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
826	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
827	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
828	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
829	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah
830	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
831	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
832	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
833	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
834	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
835	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
836	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
837	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
838	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
839	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
840	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
841	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
842	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
843	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
844	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
845	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
846	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
847	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				UMUM DAN PENATAAN RUANG		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
848	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
849	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar
850	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
851	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
852	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
853	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
854	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
855	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
856	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
857	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
858	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
859	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
860	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
861	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
862	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
863	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
864	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
865	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
866	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
867	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
868	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
869	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
870	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
871	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
872	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
873	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
874	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
875	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
876	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
877	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
878	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
879	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
880	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
881	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
882	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
883	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
884	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
885	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Peminaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kawasan Permukiman		DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
886	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
887	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
888	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
889	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
890	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
891	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
892	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
893	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
894	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
895	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
896	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
897	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
898	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
899	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
900	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
901	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
902	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
903	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
904	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
905	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
906	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
907	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
908	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kawasan Permukiman		DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
909	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
910	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
911	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
912	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
913	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
914	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
915	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
916	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
917	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
918	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
919	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
920	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
921	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
922	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
923	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
924	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
925	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
926	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
927	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
928	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
929	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
930	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
931	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kawasan Permukiman		DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
932	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
933	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
934	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
935	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
936	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
937	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
938	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
939	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
940	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
941	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
942	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
943	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
944	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
945	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
946	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
947	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
948	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
949	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
950	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
951	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
952	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
953	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
954	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		DAN KETERTIBAN UMUM		Peraturan Bupati/Wali Kota		
955	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
956	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
957	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
958	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
959	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
960	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
961	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
962	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
963	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
964	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
965	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
966	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
967	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
968	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
969	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
970	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
971	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
972	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
973	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
974	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
975	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN
976	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
977	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
978	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
979	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
980	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
981	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
982	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
983	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
984	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
985	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
986	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
987	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
988	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
989	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
990	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
991	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
992	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
993	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
994	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
995	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
996	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
997	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
998	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
999	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
1000	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1001	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota
1002	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi
1003	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1004	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1005	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
1006	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
1007	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1008	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
1009	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1010	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1011	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1012	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
1013	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1014	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
1015	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1016	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1017	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
1018	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1019	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1020	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
1021	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1022	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
1023	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1024	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1025	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
1026	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
1027	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1028	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1029	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
1030	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1031	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1032	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1033	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1034	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1035	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1036	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1037	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1038	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1039	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1040	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1041	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1042	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1043	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1044	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1045	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1046	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1047	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1048	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1049	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1050	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1051	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1052	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1053	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1054	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1055	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1056	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1057	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1058	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1059	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1060	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1061	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1062	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1063	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1064	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1065	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1066	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1067	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1068	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1069	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1070	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1071	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1072	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1073	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1074	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1075	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1076	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1077	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1078	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1079	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1080	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1081	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
1082	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1083	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1084	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
1085	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
1086	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1087	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1088	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1089	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1090	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1091	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
1092	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1093	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
1094	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
1095	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
1096	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
1097	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
1098	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
1099	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1100	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1101	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1102	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1103	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1104	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1105	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1106	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1107	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1108	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1109	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1110	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1111	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1112	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1113	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1114	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1115	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1116	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1117	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1118	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1119	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1120	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1121	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1122	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1123	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
1124	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1125	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1126	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1127	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1128	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1129	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1130	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1131	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1132	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1133	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1134	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1135	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1136	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1137	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1138	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1139	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1140	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1141	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1142	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1143	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1144	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1145	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1146	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1147	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1148	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1149	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1150	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1151	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1152	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1153	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1154	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1155	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1156	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1157	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1158	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1159	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1160	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
1161	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1162	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1163	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1164	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1165	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1166	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
1167	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1168	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1169	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1170	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1171	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1172	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1173	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang
1174	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu
1175	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1176	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1177	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1178	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1179	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1180	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR								Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
1181	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan
1182	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1183	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan
1184	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan
1185	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang
1186	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1187	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1188	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Perlindungan Anak								
1189	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar
1190	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1191	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1192	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1193	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1194	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1195	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1196	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang
1197	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1198	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1199	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial
1200	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1201	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1202	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1203	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1204	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1205	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1206	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1207	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1208	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1209	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1210	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1211	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Perlindungan Anak				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1212	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1213	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1214	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1215	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1216	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1217	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1218	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1219	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1220	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1221	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1222	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1223	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1224	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1225	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1226	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1227	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1228	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1229	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1230	2024	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1231	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
1232	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
1233	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1234	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
1235	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
1236	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1237	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
1238	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
1239	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
1240	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1241	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1242	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1243	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
1244	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
1245	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
1246	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
1247	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
1248	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
1249	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
1250	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
1251	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1252	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja
1253	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
1254	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1255	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja
1256	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
1257	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
1258	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
1259	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1260	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1261	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		dan Transmigrasi		BIDANG TENAGA KERJA		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1262	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1263	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1264	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1265	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1266	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1267	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1268	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1269	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1270	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1271	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1272	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1273	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1274	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1275	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1276	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1277	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1278	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1279	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1280	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1281	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1282	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1283	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1284	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1285	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1286	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1287	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1288	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1289	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1290	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1291	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1292	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
1293	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1294	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi
1295	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran
1296	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1297	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)
1298	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
1299	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
1300	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
1301	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
1302	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1303	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1304	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
											Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1305	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
1306	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
1307	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
1308	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
1309	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
1310	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1311	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1312	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
1313	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
1314	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1315	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
1316	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
1317	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1318	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
1319	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
1320	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
1321	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
1322	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1323	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1324	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1325	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1326	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1327	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1328	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1329	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1330	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1331	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1332	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1333	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1334	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1335	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1336	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1337	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1338	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1339	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1340	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1341	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
1342	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1343	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1344	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1345	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1346	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1347	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1348	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1349	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1350	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1351	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1352	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1353	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
1354	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1355	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1356	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
1357	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1358	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
1359	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1360	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
1361	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
1362	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
1363	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
1364	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
1365	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1366	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
1367	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
1368	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1369	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1370	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1371	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
1372	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
1373	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
1374	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
1375	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
1376	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
1377	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
1378	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
1379	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1380	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
1381	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
1382	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
1383	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1384	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
1385	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
1386	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1387	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
1388	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
1389	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
1390	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1391	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
1392	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1393	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
1394	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
1395	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
1396	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1397	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
1398	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
1399	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1400	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1401	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1402	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
1403	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
1404	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
1405	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
1406	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah	2.11.11.2.02.0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR								dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta		
1407	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
1408	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
1409	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
1410	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1411	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1412	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1413	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1414	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1415	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1416	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1417	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1418	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1419	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1420	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1421	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1422	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1423	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1424	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1425	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
1426	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1427	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
1428	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
1429	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah
1430	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
1431	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
1432	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1433	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1434	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1435	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1436	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1437	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1438	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1439	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1440	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1441	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1442	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1443	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1444	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1445	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar
1446	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1447	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1448	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1449	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1450	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1451	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1452	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1453	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1454	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1455	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1456	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1457	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1458	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1459	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1460	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1461	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
1462	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
1463	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
1464	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
1465	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
1466	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1467	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
1468	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1469	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
1470	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1471	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1472	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1473	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1474	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1475	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1476	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1477	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1478	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1479	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1480	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1481	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		dan Pencatatan Sipil		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1482	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1483	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1484	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1485	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1486	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1487	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1488	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
1489	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
1490	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
1491	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
1492	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
1493	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
1494	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1495	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
1496	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
1497	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1498	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
1499	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
1500	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1501	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR				MASYARAKAT DAN DESA						
1502	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
1503	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
1504	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
1505	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
1506	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1507	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
1508	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				MASYARAKAT DAN DESA				Administrasi Pemerintahan Desa		
1509	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
1510	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
1511	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1512	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
1513	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
1514	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
1515	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Masyarakat dan Desa		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1516	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1517	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1518	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1519	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1520	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1521	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1522	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1523	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Masyarakat dan Desa		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1524	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1525	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1526	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1527	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1528	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1529	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1530	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1531	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1532	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1533	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1534	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1535	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1536	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1537	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1538	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1539	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1540	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1541	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1542	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1543	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR				MASYARAKAT DAN DESA		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1544	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1545	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1546	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1547	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1548	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1549	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1550	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				MASYARAKAT DAN DESA		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1551	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
1552	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1553	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1554	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1555	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
1556	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1557	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
1558	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
1559	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
1560	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
1561	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
1562	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
1563	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR				KELUARGA BERENCANA				Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
1564	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1565	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
1566	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
1567	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
1568	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1569	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
1570	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR				KELUARGA BERENCANA				Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
1571	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
1572	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1573	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
1574	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
1575	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
1576	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1577	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
1578	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
1579	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1580	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1581	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1582	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1583	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1584	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1585	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1586	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1587	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1588	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1589	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1590	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1591	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1592	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1593	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1594	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1595	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1596	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR				KELUARGA BERENCANA		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1597	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1598	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1599	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1600	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
1601	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1602	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1603	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1604	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1605	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
1606	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
1607	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
1608	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
1609	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
1610	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG PERHUBUNGAN		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1611	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1612	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
1613	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1614	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1615	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1616	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1617	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
1618	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1619	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1620	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1621	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
1622	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
1623	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1624	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
1625	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
1626	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1627	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
1628	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1629	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1630	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR								Daerah Kabupaten/Kota		
1631	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
1632	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
1633	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
1634	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1635	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1636	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1637	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1638	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1639	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1640	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1641	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02	Administrasi Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1642	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1643	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1644	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1645	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1646	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1647	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
1648	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1649	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1650	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1651	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1652	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1653	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1654	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1655	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1656	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1657	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1658	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
1659	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1660	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1661	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1662	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1663	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1664	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG PERHUBUNGAN		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1665	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1666	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1667	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1668	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1669	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1670	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1671	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG PERHUBUNGAN		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1672	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1673	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1674	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
1675	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
1676	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1677	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1678	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1679	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik
1680	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media
1681	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
1682	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
1683	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
1684	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1685	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
1686	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1687	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1688	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1689	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
1690	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
1691	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
1692	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
1693	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
1694	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
1695	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1696	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
1697	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
1698	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1699	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
1700	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1701	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1702	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1703	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1704	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1705	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1706	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1707	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1708	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1709	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1710	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1711	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1712	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1713	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1714	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1715	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1716	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1717	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1718	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1719	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1720	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1721	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1722	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1723	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1724	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1725	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1726	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1727	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1728	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1729	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1730	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1731	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1732	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1733	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1734	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1735	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1736	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1737	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1738	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1739	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						STATISTIK SEKTORAL		Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
1740	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
1741	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral
1742	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
1743	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur
1744	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
1745	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1746	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1747	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1748	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1749	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1750	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1751	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
1752	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR								1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1753	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
1754	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1755	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
1756	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
1757	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
1758	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR								Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
1759	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
1760	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
1761	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1762	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1763	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1764	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1765	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Menengah Perdagangan dan Perindustrian		BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1766	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1767	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1768	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1769	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1770	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1771	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1772	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1773	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
1774	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
1775	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1776	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1777	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1778	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1779	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1780	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1781	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1782	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1783	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1784	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1785	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR		dan Perindustrian				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1786	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1787	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1788	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1789	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1790	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1791	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1792	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		dan Perindustrian		USAHA KECIL, DAN MENENGAH		DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1793	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1794	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1795	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1796	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
1797	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
1798	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
1799	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1800	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
1801	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
1802	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
1803	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
1804	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
1805	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1806	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1807	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
1808	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Perdagangan dan Perindustrian		BIDANG PERDAGANGAN		KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Daerah Kabupaten/Kota		
1809	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
1810	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional
1811	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor
1812	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
1813	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
1814	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
1815	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
1816	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Perdagangan dan Perindustrian		BIDANG PERINDUSTRIAN		PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
1817	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1818	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
1819	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
1820	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
1821	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1822	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
1823	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1824	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1825	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1826	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
1827	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
1828	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
1829	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
1830	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR								Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
1831	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
1832	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
1833	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
1834	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1835	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1836	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1837	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR		Terpadu Satu Pintu				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1838	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1839	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1840	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1841	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1842	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1843	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1844	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Terpadu Satu Pintu				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1845	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1846	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1847	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1848	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1849	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1850	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1851	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Pelayanan Terpadu Satu Pintu		BIDANG PENANAMAN MODAL		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1852	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1853	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1854	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1855	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1856	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1857	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1858	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		BIDANG PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1859	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1860	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1861	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1862	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
1863	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
1864	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
1865	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
1866	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
1867	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
1868	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
1869	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1870	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
1871	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
1872	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
1873	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
1874	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1875	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
1876	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1877	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
1878	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
1879	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
1880	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
1881	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
1882	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
1883	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
1884	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
1885	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
1886	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
1887	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
1888	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
1889	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
1890	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga,	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Pariwisata dan Kebudayaan								
1891	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1892	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1893	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1894	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1895	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1896	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1897	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga,	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Pariwisata dan Kebudayaan		BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1898	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1899	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1900	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1901	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1902	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1903	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1904	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1905	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1906	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1907	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
1908	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
1909	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1910	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1911	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1912	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1913	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1914	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1915	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1916	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1917	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1918	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1919	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1920	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1921	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1922	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
1923	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1924	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga,	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Pariwisata dan Kebudayaan				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1925	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1926	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1927	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1928	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1929	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1930	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1931	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga,	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Pariwisata dan Kebudayaan		BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1932	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1933	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1934	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1935	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
1936	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1937	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1938	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
1939	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1940	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
1941	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
1942	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
1943	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
1944	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
1945	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
1946	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
1947	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
1948	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
1949	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
1950	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya
1951	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
1952	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
1953	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
1954	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1955	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
1956	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
1957	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
1958	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1959	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
1960	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
1961	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1962	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1963	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1964	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1965	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1966	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1967	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1968	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1969	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga,	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pariwisata dan Kebudayaan				TARIK DESTINASI PARIWISATA				
1970	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1971	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1972	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1973	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1974	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota
1975	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)
1976	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
1977	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
1978	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
1979	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1980	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
1981	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1982	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
1983	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
1984	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
1985	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan
1986	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
1987	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									KEKAYAAN INTELEKTUAL				
1988	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran
1989	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
1990	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah
1991	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
1992	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
1993	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas
1994	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
1995	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
1996	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
1997	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
1998	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
1999	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
2000	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2001	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
2002	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
2003	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2004	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2005	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2006	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2007	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
2008	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2009	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2010	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
2011	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2012	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2013	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2014	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2015	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2016	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2017	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
2018	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2019	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
2020	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2021	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2022	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2023	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2024	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2025	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2026	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2027	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2028	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2029	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2030	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2031	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				BIDANG PERPUSTAKAAN		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2032	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2033	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2034	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2035	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2036	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2037	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2038	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2039	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2040	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2041	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2042	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2043	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2044	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			PELAYANAN DASAR										
2045	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2046	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
2047	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2048	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2049	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2050	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2051	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			DENGAN PELAYANAN DASAR										
2052	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2053	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2054	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2055	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2056	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2057	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2058	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		
2059	2024	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
2060	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
2061	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2062	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2063	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
2064	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
2065	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
2066	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
							BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		PERIKANAN BUDIDAYA				
2067	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2068	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
2069	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2070	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2071	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2072	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2073	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2074	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
2075	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
2076	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
2077	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
											Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
2078	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2079	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2080	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2081	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2082	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2083	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2084	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2085	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2086	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2087	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2088	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2089	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2090	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2091	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2092	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2093	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2094	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2095	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2096	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2097	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2098	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2099	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2100	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2101	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
2102	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2103	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2104	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2105	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2106	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2107	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2108	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2109	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2110	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2111	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2112	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2113	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2114	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2115	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2116	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2117	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2118	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
2119	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
2120	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
2121	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
2122	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
											Daerah Kabupaten/Kota		
2123	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2124	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2125	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
2126	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
2127	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
2128	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2129	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
2130	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2131	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
2132	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
2133	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2134	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
2135	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
2136	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
2137	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
2138	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
2139	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2140	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2141	2024	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
2142	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan
2143	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
2144	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2145	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2146	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2147	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
2148	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2149	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum
2150	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
2151	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2152	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2153	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
2154	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
2155	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2156	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2157	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
2158	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2159	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2160	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
2161	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2162	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
2163	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
2164	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2165	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2166	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2167	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2168	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2169	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2170	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2171	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2172	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2173	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2174	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2175	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2176	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2177	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2178	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
2179	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2180	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2181	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2182	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2183	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2184	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2185	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2186	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2187	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2188	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2189	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2190	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2191	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2192	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2193	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2194	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
2195	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2196	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2197	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2198	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2199	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2200	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2201	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
2202	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2203	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2204	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2205	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2206	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2207	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2208	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2209	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2210	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2211	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
2212	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2213	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2214	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2215	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2216	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2217	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2218	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA		Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
2219	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2220	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2221	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
2222	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
2223	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2224	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2225	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2226	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2227	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2228	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan
2229	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2230	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2231	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah
2232	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2233	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2234	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
2235	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
2236	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD
2237	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
2238	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
2239	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan
2240	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester
2241	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
2242	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
2243	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
2244	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
2245	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
2246	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
2247	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2248	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD
2249	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD
2250	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2251	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
2252	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD
2253	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
2254	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses
2255	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD
2256	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2257	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
2258	2024	4	UNSUR PENDUKUNG	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
2259	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2260	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2261	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2262	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2263	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2264	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2265	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2266	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2267	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2268	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2269	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2270	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2271	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2272	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2273	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2274	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2275	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2276	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2277	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2278	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2279	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
2280	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2281	2024	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2282	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
2283	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik
2284	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
2285	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah				PEMBANGUNAN DAERAH				
2286	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
2287	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2288	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2289	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2290	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2291	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2292	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2293	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2294	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah				PEMBANGUNAN DAERAH		Pembangunan Manusia		
2295	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
2296	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2297	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2298	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2299	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
2300	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2301	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2302	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2303	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah				PEMBANGUNAN DAERAH				
2304	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2305	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2306	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2307	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2308	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2309	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2310	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2311	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2312	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2313	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2314	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2315	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2316	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2317	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2318	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2319	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2320	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2321	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2322	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2323	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2324	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2325	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2326	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2327	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2328	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2329	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2330	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah				DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2331	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2332	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2333	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2334	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2335	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2336	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2337	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2338	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2339	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah						Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
2340	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
2341	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
2342	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
2343	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2344	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
2345	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
2346	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
2347	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
2348	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
					Pengembangan Daerah								
2349	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
2350	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
2351	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2352	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
2353	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
2354	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2355	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
2356	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
2357	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
2358	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2359	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
2360	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2361	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2362	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
2363	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2364	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2365	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2366	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
2367	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
2368	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
2369	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2370	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2371	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
2372	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
2373	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2374	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2375	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
2376	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
2377	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2378	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga
2379	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
2380	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2381	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah
2382	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						BARANG MILIK DAERAH				
2383	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah
2384	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2385	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2386	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2387	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2388	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2389	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2390	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2391	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2392	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2393	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2394	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2395	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2396	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2397	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2398	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2399	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2400	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2401	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2402	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2403	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2404	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2405	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2406	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2407	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2408	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2409	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2410	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2411	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2412	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2413	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2414	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2415	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2416	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2417	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2418	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2419	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2420	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2421	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2422	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2423	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2424	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2425	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2426	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2427	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2428	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2429	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2430	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						PENDAPATAN DAERAH				
2431	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2432	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah
2433	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
2434	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
2435	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah
2436	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
2437	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
2438	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2439	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
2440	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2441	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2442	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2443	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2444	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2445	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2446	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2447	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2448	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2449	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2450	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2451	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2452	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2453	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2454	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2455	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2456	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2457	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2458	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2459	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2460	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2461	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2462	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2463	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2464	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2465	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2466	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2467	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2468	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2469	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2470	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2471	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2472	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2473	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2474	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2475	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2476	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2477	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2478	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2479	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2480	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2481	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
2482	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
2483	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2484	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
2485	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
2486	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN
2487	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia						Informasi Kepegawaian ASN		
2488	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2489	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian
2490	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
2491	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN
2492	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
2493	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN
2494	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
2495	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center
2496	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia								
2497	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
2498	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
2499	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
2500	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
2501	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2502	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2503	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
2504	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
2505	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia								
2506	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
2507	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
2508	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2509	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2510	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2511	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2512	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2513	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2514	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2515	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2516	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2517	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2518	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2519	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2520	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2521	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2522	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2523	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2524	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2525	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2526	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2527	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2528	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
2529	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2530	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2531	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2532	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2533	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2534	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2535	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2536	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2537	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2538	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2539	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2540	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2541	2024	5	UNSUR PENUNJANG	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN		Pengembangan Sumber Daya Manusia				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2542	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2543	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2544	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2545	2024	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
2546	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2547	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2548	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja
2549	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan
2550	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa
2551	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2552	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2553	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah
2554	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2555	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2556	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2557	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
2558	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2559	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2560	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2561	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2562	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2563	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2564	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2565	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2566	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2567	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2568	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2569	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2570	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2571	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2572	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2573	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2574	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2575	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2576	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2577	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2578	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2579	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2580	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2581	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2582	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2583	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2584	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2585	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2586	2024	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2587	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2588	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2589	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2590	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2591	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
2592	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2593	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2594	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2595	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2596	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2597	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2598	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2599	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2600	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2601	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2602	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2603	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2604	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2605	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2606	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2607	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2608	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2609	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2610	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2611	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2612	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2613	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2614	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2615	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2616	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2617	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2618	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2619	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2620	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2621	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2622	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2623	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2624	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2625	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2626	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2627	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2628	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2629	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2630	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2631	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2632	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2633	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
2634	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
2635	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2636	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
													Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2637	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2638	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2639	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2640	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
2641	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
2642	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
2643	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2644	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
2645	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2646	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2647	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2648	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2649	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2650	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2651	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2652	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2653	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2654	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2655	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2656	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2657	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2658	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2659	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2660	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2661	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2662	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2663	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2664	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2665	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2666	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2667	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2668	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2669	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2670	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2671	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2672	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2673	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2674	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2675	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukasari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2676	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2677	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2678	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2679	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2680	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
2681	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2682	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2683	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2684	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2685	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2686	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2687	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2688	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2689	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2690	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2691	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2692	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2693	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2694	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2695	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2696	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2697	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2698	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2699	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2700	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2701	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2702	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2703	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2704	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2705	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2706	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2707	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2708	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2709	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2710	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2711	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2712	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maniis	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2713	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2714	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2715	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2716	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2717	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
2718	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2719	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2720	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2721	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2722	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2723	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2724	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2725	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2726	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2727	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2728	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2729	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2730	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2731	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2732	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2733	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2734	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2735	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2736	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2737	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2738	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2739	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2740	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2741	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2742	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2743	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2744	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2745	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2746	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2747	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2748	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2749	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAN PELAYANAN PUBLIK				
2750	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2751	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2752	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2753	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
2754	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2755	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2756	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2757	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2758	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2759	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2760	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2761	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2762	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2763	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2764	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2765	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2766	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2767	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2768	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2769	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2770	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2771	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2772	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2773	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2774	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2775	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2776	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2777	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2778	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2779	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2780	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2781	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2782	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2783	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2784	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2785	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Plered	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2786	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2787	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2788	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2789	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2790	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2791	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2792	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2793	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2794	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2795	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2796	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2797	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2798	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2799	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2800	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2801	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2802	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2803	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2804	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2805	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2806	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2807	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2808	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2809	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2810	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2811	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2812	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2813	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2814	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2815	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2816	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2817	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2818	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2819	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sukatani	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2820	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2821	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2822	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
2823	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2824	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2825	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2826	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2827	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2828	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2829	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2830	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2831	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2832	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2833	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2834	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2835	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2836	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2837	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2838	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2839	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2840	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2841	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2842	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2843	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2844	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan
2845	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2846	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2847	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2848	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2849	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2850	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2851	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2852	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2853	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2854	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Darangdan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2855	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2856	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2857	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2858	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2859	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2860	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2861	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
													Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2862	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2863	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2864	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2865	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2866	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2867	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2868	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2869	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2870	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2871	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2872	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2873	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2874	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2875	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2876	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2877	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2878	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2879	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2880	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2881	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2882	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2883	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2884	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2885	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2886	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2887	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
2888	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2889	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2890	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2891	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bojong	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2892	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2893	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2894	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2895	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2896	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2897	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2898	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2899	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
2900	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
2901	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
2902	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2903	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2904	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
2905	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2906	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2907	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2908	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2909	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2910	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2911	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2912	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2913	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2914	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2915	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2916	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2917	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2918	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2919	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2920	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2921	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2922	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2923	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2924	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2925	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2926	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2927	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2928	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2929	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2930	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanayasa	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2931	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2932	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2933	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2934	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2935	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2936	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2937	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2938	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2939	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2940	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2941	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2942	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2943	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2944	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2945	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2946	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2947	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2948	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2949	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2950	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2951	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2952	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2953	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2954	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
2955	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2956	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2957	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
2958	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2959	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2960	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2961	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2962	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2963	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2964	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2965	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2966	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2967	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2968	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2969	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2970	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2971	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2972	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2973	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2974	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2975	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2976	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2977	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2978	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Pasawahan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2979	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2980	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2981	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2982	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2983	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
2984	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2985	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2986	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2987	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2988	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2989	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2990	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2991	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2992	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2993	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2994	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2995	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2996	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2997	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2998	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2999	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3000	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3001	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3002	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3003	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3004	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3005	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3006	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3007	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3008	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3009	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3010	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3011	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3012	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3013	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3014	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3015	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3016	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3017	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3018	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3019	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3020	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3021	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									PEMERINTAHAN DESA		dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
3022	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3023	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3024	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3025	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3026	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3027	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3028	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3029	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3030	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3031	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3032	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3033	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
3034	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3035	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3036	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3037	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3038	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3039	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3040	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3041	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3042	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3043	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
3044	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3045	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3046	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3047	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3048	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3049	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3050	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3051	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3052	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Purwakarta	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3053	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3054	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
3055	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3056	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3057	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3058	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3059	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
3060	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3061	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3062	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3063	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3064	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3065	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3066	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3067	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3068	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3069	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3070	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3071	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3072	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3073	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3074	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3075	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3076	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
3077	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3078	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3079	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
3080	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3081	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3082	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3083	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3084	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3085	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3086	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3087	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3088	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3089	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3090	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3091	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3092	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3093	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3094	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3095	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3096	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3097	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3098	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3099	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3100	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3101	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3102	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3103	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3104	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3105	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3106	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3107	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3108	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3109	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3110	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3111	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3112	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3113	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3114	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
3115	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3116	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3117	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3118	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3119	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3120	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3121	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Campaka	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3122	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3123	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3124	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3125	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
3126	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
3127	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3128	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3129	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3130	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3131	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3132	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3133	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3134	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3135	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3136	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3137	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3138	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3139	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3140	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3141	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3142	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3143	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3144	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3145	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
3146	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
3147	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3148	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3149	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3150	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3151	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3152	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3153	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3154	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cibatu	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3155	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3156	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3157	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
3158	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3159	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3160	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3161	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3162	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3163	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3164	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3165	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3166	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3167	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3168	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3169	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3170	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3171	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3172	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3173	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3174	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3175	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3176	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3177	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3178	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3179	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3180	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3181	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3182	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3183	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3184	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3185	2024	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Bungursari	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3186	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3187	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3188	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3189	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3190	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3191	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3192	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
									EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3193	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3194	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3195	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
3196	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3197	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3198	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3199	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3200	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3201	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3202	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3203	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3204	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3205	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3206	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3207	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3208	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3209	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3210	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3211	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3212	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3213	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3214	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3215	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3216	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3217	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3218	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3219	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3220	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
3221	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3222	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3223	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3224	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3225	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3226	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
3227	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3228	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3229	2024	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/)

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari indikator sasaran dimana indikator sasaran tersebut memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025; sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)



yang diambil dari indikator program merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya selama 3 (tiga) tahun.

Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya daerah. Berikut Capaian kinerja indikator makro pembangunan dan sasaran tahun 2024 Triwulan IV sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
Inflasi	Persen	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22
Angka Kemiskinan	Persen	7,48	8,27	8,83	8,7	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,7	8,75	7,72
Indeks Gini / Gini Rasio	Poin	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHB	Ribu Rp.	71.580	67.349	70.152	74.745	79.194
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHK 2010	Ribu Rp.	48.924	45.549	46.426	48.176	49.891

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Tabel 3.2
Capaian dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024		KONDISI AKHIR
							TARGET	REALISASI TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"									
I.		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah							
I.1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing						
					Indek Pembangunan Manusia	Poin	72,99	n/a	74,11
					Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	7	7,34	5,68
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,22	n/a	96,43
I.1.1				Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan					
					Indek Pembangunan Manusia	Poin	72,99	n/a	74,11
					Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,23	n/a	10,24
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	n/a	15,38
					Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	60	60,00	100
I.1.2				Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat					
					Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	7	7,34	5,68
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,22	n/a	96,43
					Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	0,06	0,07
II.		Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup							
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
					Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01	n/a	72,64
II.1.1				Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana					
					Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01	n/a	72,64
					Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,5	n/a	1,48
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	67,49	61,15	70,69
					Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,48	0,48	0,66
II.2.1				Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	67,49	61,15	70,69



KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024		KONDISI AKHIR
							TARGET	REALISASI TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.2.2				Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana					
					Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,48	0,48	0,66
					Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal							
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat						
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8	n/a	6,39
					Inflasi	Persen	1,34	n/a	1,16
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	82,77	n/a	90,54
III.1.1				Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah					
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8	n/a	6,39
					Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,7	85,94	90,05
					Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86	11,86	14,69
III.1.2				Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian					
					Inflasi	Persen	1,34	n/a	1,16
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	82,77	n/a	90,54
					Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	56,08	n/a	60,91
					Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	93,32	104,00	106,66
III.1.3				Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat					
					Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03	0,03	0,03
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,23	9,23	10,41
III.1.4				Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan					
					Nilai Tukar Petani	Poin	101,71	111,98	104,29
					Skor Pola Pangan Harapan	Poin	95,7	92,30	100
					Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,39	n/a	6,29
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat						
					Angka Kemiskinan	Persen	7,25	8,41	6,44
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,306	n/a	0,255
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64	n/a	13,18
III.2.1				Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan					
					Angka Kemiskinan	Persen	7,25	8,41	6,44



KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024		KONDISI AKHIR
							TARGET	REALISASI TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,306	n/a	0,255
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64	n/a	13,18
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,38	86,94	87,83
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	79,92	76,18	81,94
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah							
IV.1			Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah						
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85	79,57	85
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	76,31	100
IV.1.1				Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah					
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85	79,57	85
					Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	81	81,00	83
IV.1.2				Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien					
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	76,31	100
					Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	89	89,00	91
					Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,6	88,48	37,6
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat							
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel						
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,41	74,1	73,41
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	69,64	66,34	73,64
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	3,5	3,5
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62	48,92	50,74
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
V.1.1				Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE					
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	69,64	66,34	73,64
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,41	74,1	73,41
					Indeks SPBE	Poin	2,6	3,94	3



KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024		KONDISI AKHIR
							TARGET	REALISASI TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.1.2				Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
					Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah
					Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	Baik	Baik
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	3,5	3,5
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
					Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,228	0,229	0,245
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,45	79,96	85,74
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62	48,92	50,74
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai						
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77,95	76,47	81,45
					Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju
V.2.1				Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan					
					Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju
V.2.2				Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat					
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77,95	76,47	81,45
JUMLAH	1	5	8	17	70	70	70	70	70

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian indikator program menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu, harus benar-benar diperhatikan dan disiasati pencapaian target yang sudah direncanakan dan dituangkan kedalam dokumen perencanaan baik RPD, RKPD, Renstra PD maupun Renja PD.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien, seluruh Perangkat Daerah perlu melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan output kegiatan dan korelasinya terhadap capaian *outcome* program perangkat daerah itu sendiri, oleh karena itu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Inventarisasi jenis program dan kegiatan yang berpotensi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Melakukan kajian langkah-langkah penyesuaian yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Mencermati indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan upaya-upaya pengecekan dan validasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah terkait dengan kondisi riil di lapangan.
5. Merumuskan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
6. Mencermati dan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada kegiatan yang berpotensi mendongkrak pencapaian indikator program, sehingga indikator kinerja utama Perangkat Daerah dapat tercapai secara maksimal.

Pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 terdapat 281 Program Pembangunan dan 715 indikator program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKPD yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan Perkada, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab. Purwakarta telah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap



kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan daerah/RKPD, sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah/RKPD
Lingkup Kabupaten Purwakarta

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyem purnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran umum kondisi daerah.	√			
4	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.	√			
5	Evaluasi kinerja tahun lalu.	√			
6	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.	√			
7	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota	√			
8	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.	√			
9	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.	√			
10	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	√			
11	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.	√			
12	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/ kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
13	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.	√			
14	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.	√			
15	Pelaksanaan forum konsultasi publik.	√			
16	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.	√			
17	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/ kota telah berpedoman pada kebijakan umum.	√			
18	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
19	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.	√			
20	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
21	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			



No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
22	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	√			
23	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.	√			
24	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.	√			
24.b	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.	√			
24.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.	√			
24.d	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.	√			
25	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.	√			
26	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	√			
27	Dokumen RKPD yang telah disahkan.	√			

Tabel 3.4

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah/RKPD
Lingkup Kabupaten Purwakarta

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	Rumusan RKPD telah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati yang ditetapkan dalam RPJMD;
2.	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota/provinsi/negara;	Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional;
3.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota masing- masing serta mengacu pada RKP.	Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada RKP;
4.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran	Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah



No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
	pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	telah disusun dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.
5.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	Telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang diatur dalam Permendagri 86/2017

Kemudian pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 3.5

Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Triwulan IV)

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	KABUPATEN PURWAKARTA						7.587.169.601.302		2.489.589.282.385		2.759.166.054.198		353.758.68.909		1.087.685.932.871		1.687.930.726.279		2.545.510.095.927		2.546.033.132.290	104,88	92,28		2.546.033.132.290	100,33	36,56	Kabupaten Purwakarta	MELAM PAUI
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.320.769.162.811		1.417.701.946.305		1.561.043.568.707		244.296.577.986		600.952.540.958		932.124.773.125		1.482.507.103.538		1.482.507.103.538	102,74	94,97		1.482.507.103.538	98,31	384,77		
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						786.770.791.794		258.262.780.723		289.076.111.491		43.203.265.566		108.917.132.929		181.034.792.182		271.733.288.748		271.933.561.248	106,34	94,07		271.933.561.248	102,96	544,16		
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						81.201.486.570		26.612.259.969		28.895.686.740		3.218.368.074		9.952.206.768		16.441.820.190		27.208.686.081		27.208.686.081	118,54	94,16		27.208.686.081	105,65	254,88		
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						469.911.949.198		154.252.453.363		175.450.414.793		7.850.670.905		77.165.070.375		116.487.966.269		162.912.541.699		162.912.541.699	103,00	92,85		162.912.541.699	103,00	70,45		
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.564.966.937.861		513.455.392.170		539.472.786.740		32.746.823.443		210.029.221.332		322.207.029.320		448.692.266.134		448.692.266.134	110,83	92,17		448.692.266.134	108,72	215,01		
	6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						91.804.752.174		30.124.030.316		29.229.639.616		4.499.242.491		13.598.425.004		17.998.037.708		25.676.955.865		25.676.955.865	81,71	87,85		25.676.955.865	82,77	27,97		
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN						239.754.559.428		78.671.021.316		85.742.627.677		17.144.050.919		34.591.143.330		55.511.608.933		77.070.081.949		77.392.845.812	94,01	90,26		77.392.845.812	93,71	540,67		
	8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						31.989.961.466		10.509.398.223		50.255.218.434		799.669.525		32.480.192.175		46.124.698.552		49.709.171.913		49.709.171.913	91,93	98,91		49.709.171.913	91,93	155,39		
	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN						2.069.779.867.233		679.159.956.234		739.090.095.782		129.592.755.947		344.849.343.087		475.051.704.900		716.095.983.237		716.095.983.237	107,72	96,89		716.095.983.237	104,27	34,60	Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
	1.01	BIDANG PENDIDIKAN						2.069.779.867.233		679.159.956.234		739.090.095.782		129.592.755.947		344.849.343.087		475.051.704.900		716.095.983.237		716.095.983.237	107,72	96,89		716.095.983.237	104,27	34,60	Dinas Pendidikan	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui	1.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.451.273.384.163		478.193.521.597		506.574.286.582		91.071.896.996		267.847.204.520		354.907.325.318		488.003.336.357		488.003.336.357	96,33			488.003.336.357	33,63		Dinas Pendidikan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00	Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02	Program : Pengelolaan Pendidikan					615.476.183.170		199.986.134.737		231.563.239.200		38.520.858.951		76.922.658.567		119.909.899.582		227.305.032.620		227.305.032.620		98,16		227.305.032.620		36,93	Dinas Pendidikan		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Perse n	77,20		74,29		74,29		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		81,33		60,42		78,26	Dinas Pendidikan	TINGGI	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Perse n	99,90		99,50		99,50		99,61		99,61		99,61		99,61		99,61		100,11		99,61		99,71	Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Perse n	94,73		94,33		94,33		84,27		84,27		84,27		84,27		84,27		89,34		84,27		88,96	Dinas Pendidikan	TINGGI	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Perse n	0,56		0,54		0,54		12,02		12,02		12,02		12,02		12,02		4,49		12,02		4,66	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
					Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Perse n	100,00		100,00		100,00		99,37		99,37		99,37		99,37		99,37		99,37		99,37		99,37	Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Perse n	0,48		0,50		0,50		12,02		12,02		12,02		12,02		12,02		4,16		12,02		3,99	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
					Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Perse n	1,82		1,75		1,75		2,25		2,25		2,25		2,25		2,25		128,57		2,25		123,63	Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Perse n	100,00		100,00		100,00		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		Dinas Pendidikan	RENDA H
					Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perse n	100,00		100,00		100,00		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		Dinas Pendidikan	RENDA H
					Angka partisipasi kasar	Perse n	25,30		24,30		24,30		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		248,6 4		60,42		238,8 1		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Angka pendidikan yang ditamatkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Partisipasi Murni	Perse n	23,70		22,80		22,80		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		265,0 0		60,42		254,9 4		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Perse n	99,63		99,61		99,61		99,61		99,61		99,61		99,61		99,61		100,0 0		99,61		99,98		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Perse n	84,20		84,00		84,00		84,27		84,27		84,27		84,27		84,27		100,3 2		84,27		100,0 8		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Perse n	99,70		99,50		99,50		99,61		99,61		99,61		99,61		99,61		100,1 1		99,61		99,91		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Perse n	94,50		94,30		94,30		84,27		84,27		84,27		84,27		84,27		89,36		84,27		89,17		Dinas Pendidikan	TINGGI
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Perse n	0,30		0,50		0,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0 0		0,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Perse n	5,50		5,70		5,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0 0		0,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Perse n	25,15		24,19		24,19		24,19		24,19		24,19		24,19		24,19		100,0 0		24,19		96,18		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Perse n	50,38		44,88		44,88		44,88		44,88		44,88		44,88		44,88		100,0 0		44,88		89,08		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Perse n	41,57		41,55		41,55		41,55		41,55		41,55		41,55		41,55		100,0 0		41,55		99,95		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Perse n	100,00		100,00		100,00		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	59,24		59,10		59,10		60,42		60,42		60,42		60,42		60,42		102,2 4		60,42		102,0 0		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,10		98,86		98,86		99,61		99,61		99,61		99,61		99,61		100,7 6		99,61		100,5 1		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	8,48		7,93		7,93		12,02		12,02		12,02		12,02		12,02		151,5 8		12,02		141,7 5		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,26		52,54		52,54		79,15		79,15		79,15		79,15		79,15		150,6 5		79,15		148,6 2		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	41,51		40,77		40,77		73,34		73,34		73,34		73,34		73,34		179,8 7		73,34		176,6 7		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	61,19		60,83		60,83		70,98		70,98		70,98		70,98		70,98		116,7 0		70,98		116,0 0		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,41		53,33		53,33		67,78		67,78		67,78		67,78		67,78		127,0 9		67,78		126,9 0		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI
					Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	43,87		43,50		43,50		40,67		40,67		40,67		40,67		40,67		93,49		40,67		92,72		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI
					Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	33,05		21,63		21,63		67,10		67,10		67,10		67,10		67,10		310,2 5		67,10		203,0 1		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggara n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	82,95		81,68		81,68		78,59		78,59		78,59		78,59		78,59		96,22		78,59		94,75		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI	
					Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	82,56		79,27		79,27		74,57		74,57		74,57		74,57		74,57		94,07		74,57		90,32		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI	
					Indeks Inklusivitas SD	nilai	76,59		75,66		75,66		59,99		59,99		59,99		59,99		59,99		79,29		59,99		78,33		Dinas Pendidikan	TINGGI	
					Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	78,59		78,41		78,41		71,76		71,76		71,76		71,76		71,76		91,52		71,76		91,31		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI	
					Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	71,46		69,95		69,95		73,15		73,15		73,15		73,15		73,15		104,57		73,15		102,36		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI	
					Indeks Inklusivitas SMP	nilai	71,31		70,31		70,31		57,43		57,43		57,43		57,43		57,43		81,69		57,43		80,54		Dinas Pendidikan	TINGGI	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.03	Program : Pengembangan Kurikulum							1.180.300.000		380.300.000		346.000.000		0		71.000.000		71.000.000		340.557.500		340.557.500		98,43		340.557.500		28,85	Dinas Pendidikan	
					Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI	
					Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		48,63		48,63		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.04	Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							600.000.000		200.000.000		200.000.000		0		0		84.000.000		138.550.000		138.550.000		69,28		138.550.000		23,09	Dinas Pendidikan	
					Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Perse n	38,97		38,77		38,77		0,00		0,00		44,92		44,92		44,92		115,86		44,92		115,27		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI	
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Perse n	42,00		41,80		41,80		0,00		0,00		0,00		44,92		44,92		107,46		44,92		106,95		Dinas Pendidikan	MELAM PAUI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun n 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Perse n	96,18		96,06		96,06		0,00		0,00		65,75		65,75		65,75		68,45		65,75		68,36		Dinas Pendidikan	SEDAN G		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.05	Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan						599.999.900		199.999.900		99.320.000				7.780.000		7.780.000		76.256.760		76.256.760		76,78		76.256.760		12,71	Dinas Pendidikan			
					Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI		
					Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.06	Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra						650.000.000		200.000.000		307.250.000				700.000		71.700.000		232.250.000		232.250.000		75,59		232.250.000		35,73	Dinas Pendidikan			
					Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		23,34		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGA T TINGGI		
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN						631.252.510.827		207.133.828.294		247.973.228.842		20.506.580.983		45.645.114.136		114.787.367.866		218.568.034.553		218.568.034.553		113,28	88,14		218.568.034.553		103,76	34,62	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
	1.02	BIDANG KESEHATAN						631.252.510.827		207.133.828.294		247.973.228.842		20.506.580.983		45.645.114.136		114.787.367.866		218.568.034.553		218.568.034.553		113,28	88,14		218.568.034.553		103,76	34,62	Dinas Kesehatan	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan	1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						325.328.371.353		106.523.567.079		120.054.452.449		17.191.919.829		35.211.795.675		82.873.906.675		103.587.548.606		103.587.548.606		86,28		103.587.548.606		31,84	Dinas Kesehatan			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi lat Kiner ja Tahu a 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pemerint ahan Daerah melalui penerapa n SPBE																														
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	A		A		A		BB		BB		BB		BB		BB		88,89		BB		88,89	Dinas Kesehatan	TINGGI
Sasaran 3 : Meningka tnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n dan Keluarga Berencana	1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							262.216.11 1.994	86.109.252 .055		113.808.33 5.393		70.327.65 5		4.281.919. 081		23.344.611 .248		103.165.50 0.805		103.165.50 0.805		90, 65		103.165.50 0.805		39, 34	Dinas Kesehatan	
						Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Perse n	65,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		200,0 0		100,00		153,8 5	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Perse n	100,00		100,00		100,00		19,64		42,12		64,76		87,75		87,75		87,75		87,75		87,75	Dinas Kesehatan	TINGGI
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,85		44,80		68,93		93,33		93,33		93,33		93,33		93,33	Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Perse n	100,00		100,00		100,00		22,14		47,37		72,44		97,55		97,55		97,55		97,55		97,55	Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Perse n	100,00		100,00		100,00		19,24		41,07		66,05		88,89		88,89		88,89		88,89		88,89	Dinas Kesehatan	TINGGI
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Perse n	100,00		100,00		100,00		71,53		87,12		97,71		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0	Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
						Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,05		41,08		65,29		89,44		89,44		89,44		89,44		89,44	Dinas Kesehatan	TINGGI
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Perse n	100,00		100,00		100,00		19,90		42,10		66,60		91,30		91,30		91,30		91,30		91,30	Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Person	100,00		80,00		80,00		25,23		50,74		71,91		92,90		92,90		116,13		92,90		92,90		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Person	100,00		100,00		100,00		21,94		45,47		73,52		99,33		99,33		99,33		99,33		99,33		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Persentase ODG.J berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Person	100,00		100,00		100,00		41,31		67,83		85,66		107,45		107,45		107,45		107,45		107,45		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Person	100,00		95,00		95,00		78,00		80,00		88,00		100,00		100,00		105,26		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Person	100,00		80,00		80,00		22,00		48,00		76,61		100,00		100,00		125,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		19,64		42,12		64,76		87,75		87,75		87,75		87,75		87,75		Dinas Kesehatan	TINGGI
					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		20,85		44,80		68,93		93,33		93,33		93,33		93,33		93,33		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		22,14		47,37		72,44		97,55		97,55		97,55		97,55		97,55		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		19,24		41,07		66,05		88,89		88,89		88,89		88,89		88,89		Dinas Kesehatan	TINGGI
					Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		71,53		87,12		97,71		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		20,05		41,08		65,29		89,44		89,44		89,44		89,44		89,44		Dinas Kesehatan	TINGGI
					Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		28,60		56,30		83,90		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		25,23		50,74		71,91		92,90		92,90		92,90		92,90		92,90		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		21,94		45,47		73,52		99,33		99,33		99,33		99,33		99,33		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		100,00		100,00		41,31		67,83		85,66		107,05		107,05		107,05		107,05		107,05		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		95,00		95,00		78,00		80,00		88,00		95,75		95,75		100,79		95,75		95,75		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Person	100,00		80,00		80,00		22,00		48,00		76,61		100,00		100,00		125,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Rasio posyandu per satuan balita	Poin	17,86		17,34		17,34		14,83		14,83		32,31		46,57		46,57		268,57		46,57		260,75		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Person	100,00		100,00		100,00		23,08		50,31		77,29		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Person	100,00		100,00		100,00		21,24		45,54		69,82		94,38		94,38		94,38		94,38		94,38		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Person	100,00		100,00		100,00		20,20		41,75		63,44				63,44		63,44		63,44		63,44		Dinas Kesehatan	RENDAH
					Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Person	100,00		100,00		100,00		88,89		88,89		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Person	100,00		100,00		100,00		15,60		35,12		68,12				68,12		68,12		68,12		68,12		Dinas Kesehatan	SEDANG
					Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Person	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
					Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Person	90,00		70,00		70,00		99,04		99,78		98,93		99,54		99,54		142,20		99,54		110,60		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Person	100,00		90,00		90,00		79,00		80,00		82,00		86,00		86,00		95,56		86,00		86,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	171,39		245,65		245,65		103,29		209,74		319,13		429,19		429,19		174,72		429,19		250,42		Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
					Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	1,94		2,58		2,58		2,95		5,42		8,09		9,33		9,33		27,65		9,33		20,79		Dinas Kesehatan	SANGA T RENDAH
					Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Perse n	100,00		90,00		90,00		78,00		79,00		80,00		87,00		87,00		96,67		87,00		87,00		Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
					Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Perse n	95,00		90,00		90,00		84,00		83,00		80,00		80,00		80,00		88,89		80,00		84,21		Dinas Kesehatan	TINGGI
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
					Penderita diare yang ditangani	Perse n	100,00		85,00		85,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		117,65		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
					Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGA T RENDAH
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Perse n	100,00		80,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGA T RENDAH
					Cakupan kunjungan bayi	Perse n	100,00		100,00		100,00		24,64		53,72		81,16		97,56		97,56		97,56		97,56		97,56		Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
					Cakupan puskesmas	Perse n	100,00		100,00		100,00		117,65		117,65		117,65		117,65		117,65		117,65		117,65		117,65		Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
					Cakupan pelayanan nifas	Perse n	100,00		100,00		100,00		21,08		44,95		69,10		69,10		69,10		69,10		69,10		69,10		Dinas Kesehatan	SEDANG
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Perse n	100,00		100,00		100,00		16,94		37,32		59,36		79,96		79,96		79,96		79,96		79,96		Dinas Kesehatan	TINGGI
					Cakupan pelayanan anak balita	Perse n	100,00		100,00		100,00		17,81		37,44		61,78		88,89		88,89		88,89		88,89		88,89		Dinas Kesehatan	TINGGI
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI
Sasaran 3 :	1.02.03	Program : Peningkatan						39.603.027.480		13.201.009.160		13.064.577.000		3.244.333.499		6.009.524.380		8.150.088.943		10.805.227.642		10.805.227.642		82,71		10.805.227.642		27,28	Dinas Kesehatan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Meningka tnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n dan Keluarga Berencana		Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																												
					Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Perse n	40,00		30,00		30,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		250,0 0		75,00		187,5 0	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI	
					Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Perse n	40,00		30,00		30,00		61,90		65,40		72,50		91,25		91,25		304,1 7		91,25		228,1 3	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI	
					Persentase kebutuhan tenaga kesechatan sesuai standar	Perse n	40,00		30,00		30,00		27,95		48,78		58,55		73,15		73,15		243,8 3		73,15		182,8 8	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI	
					Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Perse n	40,00		30,00		30,00		73,16		71,86		84,43		83,13		83,13		277,1 0		83,13		207,8 3	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI	
					Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	40,00		30,00		30,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		150,0 0		45,00		112,5 0	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI	
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	40,00		30,00		30,00		34,90		34,90		34,90		34,90		34,90		116,3 3		34,90		87,25	Dinas Kesehatan	MELAM PAUI	
Sasaran 3 : Meningka tnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n dan Keluarga Berencana	1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman						2.045.000. 000		620.000.00 0		590.444.00 0		0		125.395.00 0		341.288.00 0		578.028.50 0		578.028.50 0		97, 90		578.028.50 0		28, 27	Dinas Kesehatan	
					Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,15		78,53		78,53		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0	Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI	
					Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Perse n	85,00		80,00		80,00		25,15		78,53		78,53		80,00		80,00		100,0 0		80,00		94,12	Dinas Kesehatan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 3 : Meningka	1.02.05	Program : Pemberdayaan						2.060.000. 000		680.000.00 0		455.420.00 0		0		16.480.000		77.473.000		431.729.00 0		431.729.00 0		94, 80		431.729.00 0		20, 96	Dinas Kesehatan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
tnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana		Masyarakat Bidang Kesehatan																												
					Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Perse n	10,00		6,00		6,00		0,00		0,00		6,73		10,00		10,00		166,67		10,00		100,00		Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
					Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Perse n	100,00		89,00		89,00		0,00		33,33		84,72		100,00		100,00		112,36		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	MELAM PAUI
	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD BAYU ASIH						638.080.963.468		209.374.458.648		235.818.192.829		58.724.069.704		100.012.039.654		155.865.207.392		224.247.547.698		224.247.547.698	85,43	95,09		224.247.547.698	82,03	35,14	RSUD Bayu Asih	TINGGI
	1.02	BIDANG KESEHATAN						638.080.963.468		209.374.458.648		235.818.192.829		58.724.069.704		100.012.039.654		155.865.207.392		224.247.547.698		224.247.547.698	85,43	95,09		224.247.547.698	82,03	35,14	RSUD Bayu Asih	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						592.030.963.468		194.749.458.648		229.980.180.985		58.724.069.704		100.012.039.654		155.865.207.392		218.901.858.167		218.901.858.167		95,18		218.901.858.167		36,97	RSUD Bayu Asih	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGA T TINGGI
					Rasio Keuangan BLUD	Skor	80,00		80,00		80,00		80,00		236,30		122,20		100,00		100,00		125,00		100,00		125,00		RSUD Bayu Asih	MELAM PAUI
					Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional BLUD	Perse n	100,00		100,00		100,00		82,00		94,00		95,01		91,87		91,87		91,87		91,87		91,87		RSUD Bayu Asih	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	80,00		80,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		125,00		100,00		125,00		RSUD Bayu Asih	MELAM PAUI		
Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					42.400.000.000		13.500.000.000		5.838.011.844		0		0		0		5.345.689.531		5.345.689.531		91,57		5.345.689.531		12,61	RSUD Bayu Asih				
					Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Capaian Indikator Medik	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Pengendalian Mutu	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
					Temuan Yang di Tindaklanjuti	Persen	85,00		80,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		125,00		100,00		117,65		RSUD Bayu Asih	MELAM PAUI		
					Tingkat Keandalan Sumber Daya	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI		
Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan	1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					2.150.000.000		625.000.000		0		0		0		0				0		0,00		0		0		0,00		RSUD Bayu Asih	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kesehata n dan Keluarga Berencan a																															
					Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Perse n	80,00		75,00		75,00										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	RSUD Bayu Asih	SANGA T REND AH
					Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Perse n	80,00		75,00		75,00										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	RSUD Bayu Asih	SANGA T REND AH
Sasaran 3 : Meningka tnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n dan Keluarga Berencan a	1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						1.500.000. 000		500.000.00 0		0		0		0		0				0		0,0 0		0		0,0 0	RSUD Bayu Asih		
					Tingkat pembinaan/ sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Perse n	75,00		75,00		75,00										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	RSUD Bayu Asih	SANGA T REND AH
	1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						600.145.11 5.461		196.926.51 2.236		170.655.78 5.282		15.220.05 7.396		58.895.509 .491		92.918.155 .423		162.192.36 6.895		162.192.36 6.895		78,9 6	95, 04		162.192.36 6.895	79,0 3	27, 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TINGGI
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						581.245.11 5.461		190.626.51 2.236		170.655.78 5.282		15.220.05 7.396		58.895.509 .491		92.918.155 .423		162.192.36 6.895		162.192.36 6.895		91,4 3	95, 04		162.192.36 6.895	91,5 1	27, 90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Sasaran 14 : Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyelen ggaraan	1.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						127.513.09 1.003		42.437.697 .001		30.288.096 .996		5.041.187 .580		10.819.518 .368		16.832.757 .106		27.590.356 .556		27.590.356 .556		91, 09		27.590.356 .556		21, 64	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predik kat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	1.03.02				Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			59.400.000.000		19.730.000.000		25.091.685.087		1.186.361.575		5.556.810.075		9.943.964.875		24.602.352.975		24.602.352.975		98,05		24.602.352.975		41,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Perse n	37,60		37,60		37,60		1,80		8,44		15,11		37,38		37,38		99,42		37,38		99,42		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perse n	84,71		84,71		84,71		4,07		19,02		35,24		76,79		76,79		90,65		76,79		90,65		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.03.06				Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			16.710.000.000		5.570.000.000		2.482.896.700		0		369.531.000		2.289.387.000		2.390.508.000		2.390.508.000		96,28		2.390.508.000		14,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Perse n	25,00		25,00		25,00		0		3,48		21,54		24,07		24,07		96,28		24,07		96,28		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis	1.03.08				Program : Penataan Bangunan Gedung			94.920.000.000		30.100.000.000		21.435.940.302		1.805.039.280		9.181.358.480		9.819.052.480		20.869.479.580		20.869.479.580		97,36		20.869.479.580		21,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
dan Efisien																														
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Perse n	100,00		100,00		100,00		7,85		39,91		42,69		97,36		97,36		97,36		97,36		97,36		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
					Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Perse n	10,00		10,00		10,00		0,78		3,99		4,27		9,74		9,74		97,36		9,74		97,36		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
					Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Perse n	90,00		90,00		90,00		7,07		35,92		38,42		87,62		87,62		97,36		87,62		97,36		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.03.09				Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			810.000.000		270.000.000		1.288.830.400		192.630.400		197.169.400		904.726.400		1.210.535.000		1.210.535.000		93,93		1.210.535.000		149,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Perse n	1,00		1,00		1,00		0,17		0,17		0,79		0,94		0,94		93,93		0,94		93,93		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	1.03.10				Program : Penyelenggaraan Jalan			269.540.000.000		88.490.000.000		84.572.115.499		6.507.215.561		31.781.796.778		50.865.393.172		80.677.243.481		80.677.243.481		95,39		80.677.243.481		29,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Perse n	85,00		84,00		84,00		6,28		30,69		48,28		79,57		79,57		94,73		79,57		93,61		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Perse n	68,00		68,00		68,00		5,09		24,84		39,09		64,87		64,87		95,39		64,87		95,39		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Perse n	70,00		72,00		72,00		5,39		26,30		41,39		68,68		68,68		95,39		68,68		98,12		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI	
					Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Perse n	7,00		7,00		7,00		0,52		2,56		4,02		6,68		6,68		95,39		6,68		95,39		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI	
					Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Perse n	5,00		5,00		5,00		0,37		1,83		2,87		4,77		4,77		95,39		4,77		95,39		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI	
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelola an Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.03.11	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi						2.250.000.000		750.000.000		810.121.298		0		9.951.000		356.243.000		580.683.000		580.683.000		71,68		580.683.000		25,81		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Perse n	25,00		25,00		25,00		0		0,32		11,27		17,92		17,92		71,68		17,92		71,68		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SEDAN G	
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Perse n	0,10		0,10		0,10		0		0,00		0,05		0,07		0,07		71,68		0,07		71,68		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SEDAN G	
					Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Perse n	50,00		50,00		50,00		0		0,63		22,55		35,84		35,84		71,68		35,84		71,68		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SEDAN G	
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelola an Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.03.12	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang						10.102.024.458		3.278.815.235		4.686.099.000		487.623.000		979.374.390		1.906.631.390		4.271.208.303		4.271.208.303		91,15		4.271.208.303		42,28		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Perse n	20,00		20,00		20,00		2,19		4,40		8,57		18,23		18,23		91,15		18,23		91,15		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Perse n	55,00		55,00		55,00		6,03		12,10		23,56		50,13		50,13		91,15		50,13		91,15		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
					Ketaatan terhadap RTRW	Perse n	50,00		50,00		50,00		5,48		11,00		21,42		45,58		45,58		91,15		45,58		91,15		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T TINGGI
	2.10	BIDANG PERTANAHAN						18.900.000.000		6.300.000.000		0		0		0		0		0		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	2.10.04				Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			1.200.000.000		400.000.000		0		0		0		0		0		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Perse n	10,00		10,00		10,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T RENDAH
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	2.10.05				Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			15.150.000.000		5.050.000.000		0		0		0		0		0		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T RENDAH
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang	2.10.08				Program : Pengelolaan Tanah Kosong			2.550.000.000		850.000.000		0		0		0		0		0		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik Kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Strategis dan Efisien																														
					Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Perse n	25,00		25,00		25,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGA T RENDAH
	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						244.306.861.160		80.164.774.892		109.236.018.206		8.452.036.938		27.594.227.594		53.911.344.464		107.751.116.754		107.751.116.754	91,30	96,64		107.751.116.754	87,02	44,10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
	1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						171.283.100.395		56.203.379.310		40.247.852.657		1.782.441.977		5.943.534.910		21.999.938.630		40.021.422.417		40.021.422.417	83,33	99,44		40.021.422.417	81,89	23,37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	1.03.03				Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			40.569.264.210		13.312.053.199		21.911.380.039		994.245.745		4.482.470.292		12.060.427.252		21.757.635.922		21.757.635.922		99,30		21.757.635.922		53,63	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Perse n	63,00		61,00		61,00		30,00		31,00		54,00		61,00		61,00		100,00		61,00		96,83		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Persentase penduduk berakses air minum	Perse n	97,00		95,00		95,00		25,00		26,00		75,00		95,00		95,00		100,00		95,00		97,94		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Perse n	82,00		80,00		80,00		32,00		33,00		70,00		80,00		80,00		100,00		80,00		97,56		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Perse n	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Perse n	98,00		97,00		97,00		35,00		36,00		75,00		97,00		97,00		100,00		97,00		97,98		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.03.05	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						48.715.761.312		15.985.175.450		12.850.677.071		210.770.000		409.769.071		8.817.119.131		12.810.499.308		12.810.499.308		99,69		12.810.499.308		26,30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Perse n	71,00		69,00		69,00		25,00		26,00		60,00		69,00		69,00		100,00		69,00		97,18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI	
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	Perse n	84,00		82,00		82,00		25,00		26,00		70,00		82,00		82,00		100,00		82,00		97,62	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Perse n	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI	
					Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Perse n	83,00		81,00		81,00		25,00		26,00		70,00		81,00		81,00		100,00		81,00		97,59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI	
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase						3.003.317.457		985.483.039		5.485.795.547		577.426.232		1.051.295.547		1.122.392.247		5.453.287.187		5.453.287.187		99,41		5.453.287.187		181,58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Perse n	2,00		2,00		2,00		1,00		1,00		1,67		2,00		2,00		100,00		2,00		100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI	
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolan Infrastruktur yang Strategis	1.03.07	Program : Pengembangan Permukiman						78.994.757.416		25.920.667.622		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
dan Efisien																														
					Persentase areal kawasan kumuh	Perse n	8,00		8,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T RENDAH
					Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	50,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T RENDAH
	1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						73.023.760.765		23.961.395.582		68.988.165.549		6.669.594.961		21.650.692.684		31.911.405.834		67.729.694.337		67.729.694.337	100,00	98,18		67.729.694.337	92,60	92,75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1.04.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			60.503.831.582		19.853.212.538		17.292.907.825		3.927.662.152		7.144.166.814		11.939.565.482		16.211.059.994		16.211.059.994	93,74			16.211.059.994	26,79		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.04.02				Program : Pengembangan Perumahan			942.140.686		309.146.029		472.780.000		2.385.000		2.385.000		14.495.000		471.580.568		471.580.568	99,75			471.580.568	50,05		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak	Perse n	40,00		38,00		38,00		28,00		29,00		30,00		38,00		38,00		100,00		38,00		95,00		Dinas Perumahan dan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					huni bagi korban bencana kabupaten/kota																								Kawasan Permukiman	
					Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Perse n	11,00		9,00		9,00		7,00		7,00		8,00		9,00		9,00		100,0 0		9,00		81,82		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Perse n	50,00		48,00		48,00		25,00		26,00		40,00		48,00		48,00		100,0 0		48,00		96,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	1.04.03	Program : Kawasan Permukiman						6.021.651.201		1.975.893.394		43.615.062.724		2.282.132.809		13.947.318.870		16.095.968.650		43.519.459.665		43.519.459.665		99,78		43.519.459.665		722,72	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Rasio rumah layak huni	Perse n	8,00		8,00		8,00		5,00		6,00		8,00		8,00		8,00		100,0 0		8,00		100,0 0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Rasio permukiman layak huni	Perse n	50,00		30,00		30,00		25,00		26,00		27,00		30,00		30,00		100,0 0		30,00		60,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Perse n	98,00		96,00		96,00		28,00		29,00		77,00		96,00		96,00		100,0 0		96,00		97,96		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Perse n	94,00		92,00		92,00		26,00		27,00		70,00		92,00		92,00		100,0 0		92,00		97,87		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Persentase pemukiman yang tertata	Perse n	20,00		18,00		18,00		15,00		16,00		17,00		18,00		18,00		100,0 0		18,00		90,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis	1.04.05	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)						5.556.137.296		1.823.143.621		7.607.415.000		457.415.000		556.822.000		3.861.376.702		7.527.594.110		7.527.594.110		98,95		7.527.594.110		135,48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
dan Efisien																														
					Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Perse n	3,00		3,00		3,00		1,00		1,00		2,50		3,00		3,00		100,0 0		3,00		100,0 0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
					Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Perse n	3,00		3,00		3,00		1,00		1,00		2,50		3,00		3,00		100,0 0		3,00		100,0 0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGA T TINGGI
	1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						61.456.073 .769		20.165.673 .187		23.277.438 .930		5.318.827 .965		10.999.512 .253		16.156.504 .227		21.617.037 .272		21.617.037 .272	100, 00	92, 87		21.617.037 .272	100, 00	35, 17	Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI
	1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						61.456.073 .769		20.165.673 .187		23.277.438 .930		5.318.827 .965		10.999.512 .253		16.156.504 .227		21.617.037 .272		21.617.037 .272	100, 00	92, 87		21.617.037 .272	100, 00	35, 17	Satuan Polisi Pamong Praja	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1.05.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			58.563.804 .208		19.233.250 .000		20.181.463 .930		4.714.843 .965		10.023.027 .231		14.535.988 .205		19.281.106 .772		19.281.106 .772				19.281.106 .772		32, 92	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,0 0		BB		100,0 0		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	1.05.02				Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			2.892.269. 561		932.423.18 7		3.095.975. 000		603.984.0 00		976.485.02 2		1.620.516. 022		2.335.930. 500		2.335.930. 500		75, 45		2.335.930. 500		80, 76	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Perse n	100,00		100,00		100,00		53,00		61,00		75,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		42,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		25,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI	
					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI	
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Perse n	100,00		100,00		100,00		61,00		61,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI	
					Persentase Penegakan PERDA	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		25,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGA T TINGGI	
	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							18.967.924.003		6.223.973.206		7.195.721.534		997.573.741		2.078.682.833		4.277.793.292		6.328.229.956		6.328.229.956	100,00	87,94		6.328.229.956	100,00	33,36	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	SANGA T TINGGI
	1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.967.924.003		6.223.973.206		7.195.721.534		997.573.741		2.078.682.833		4.277.793.292		6.328.229.956		6.328.229.956	100,00	87,94		6.328.229.956	100,00	33,36	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota							15.684.924.003		5.147.973.206		5.810.650.534		872.983.741		1.805.761.833		3.441.209.092		5.050.820.256		5.050.820.256	86,92		5.050.820.256	32,20		Badan Penanggulanga n Bencana Daerah		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	B		B		B		B		B		B		B		B		100,00		B		100,00		Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	SANGA T TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	1.05.03	Program : Penanggulangan Bencana						3.283.000.000		1.076.000.000		1.385.071.000		124.590.000		272.921.000		836.584.200		1.277.409.700		1.277.409.700		92,23		1.277.409.700		38,91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Person	100,00		100,00		100,00		8,59		15,30		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Person	100,00		100,00		100,00		14,64		22,29		96,54		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Person	100,00		100,00		100,00		96,00		96,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI	
	1.05.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						46.281.734.566		15.186.494.622		17.058.202.053		3.171.041.130		6.969.923.366		11.592.428.296		15.792.956.578		15.792.956.578		92,58		15.792.956.578		91,40	34,12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
	1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						46.281.734.566		15.186.494.622		17.058.202.053		3.171.041.130		6.969.923.366		11.592.428.296		15.792.956.578		15.792.956.578		92,58		15.792.956.578		91,40	34,12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						42.066.734.566		13.831.494.622		14.655.102.353		3.082.585.930		6.323.090.166		9.884.367.296		13.431.942.878		13.431.942.878		91,65		13.431.942.878		31,93	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		B		B		B		B		B		100,00		B		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Ketahanan Bencana	1.05.04	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					4.215.000.000		1.355.000.000		2.403.099.700		88.455.200		646.833.200		1.708.061.000		2.361.013.700				98,25		2.361.013.700		56,01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Perse n	100,00		100,00		100,00		80,00		92,99		94,01		94,49		94,49		94,49		94,49		94,49		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
					Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Perse n	18,14		18,14		18,14		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		30,32		5,50		2,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT RENDAH
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Perse n	100,00		100,00		100,00		88,45		89,83		92,36		92,06		92,06		92,06		92,06		92,06		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
					Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perse n	100,00		100,00		100,00		88,46		89,83		92,36		92,06		92,06		92,06		92,06		92,06		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
					Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
					Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran)	Layan an	700,00		800,00		800,00		273,00		538,00		763,00		1.054,00		1.054,00		131,75		1.054,00		150,57		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	MELAM PAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/ Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah																										
	1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						31.866.112.324		10.456.274.986		11.467.199.749		2.368.684.215		4.086.619.544		7.926.604.265		10.545.929.095			105,01	91,97		10.545.929.095	105,01	33,09	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	MELAM PAUI	
	1.06	BIDANG SOSIAL						29.398.112.324		9.666.274.986		10.738.885.249		2.313.634.182		3.908.188.544		7.564.267.265		9.913.830.595			9.913.830.595	101,79	92,32		9.913.830.595	101,79	33,72	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1.06.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			22.906.837.338		7.599.000.000		8.029.362.199		1.675.478.182		2.913.398.244		5.422.225.765		7.384.941.959			7.384.941.959	91,97		7.384.941.959		32,24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		A		A		A		A		A		128,57		A		128,57		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	MELAM PAUI	
Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1.06.02				Program : Pemberdayaan Sosial			801.000.000		255.000.000		245.880.800		2.480.000		28.060.800		45.904.000		229.030.700			229.030.700	93,15		229.030.700		28,59	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
					Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Perse n	100,00		100,00		100,00		15,00		15,00		15,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	SANGAT TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																													Perlindungan Anak	
					Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,00		30,00		38,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1.06.03				Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			100.000.000		30.000.000		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		10,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1.06.04				Program : Rehabilitasi Sosial			2.471.300.000		778.300.000		585.081.000		55.297.000		204.300.000		388.651.000		457.885.500		457.885.500		78,26		457.885.500		18,53	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Perse n	100,00		100,00		100,00		10,00		20,00		40,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		30,00		40,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Perse n	100,00		100,00		100,00		2,00		30,00		30,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Perse n	100,00		100,00		100,00		5,00		30,00		30,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Perse n	100,00		100,00		100,00		10,00		15,00		20,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		5,00		10,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Persentase PMKS yang tertangani	Perse n	100,00		100,00		100,00		5,00		10,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1.06.05	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial						1.870.000.000		600.000.000		1.512.233.000		545.608.000		545.608.000		1.497.590.000		1.497.590.000		1.497.590.000		99,03		1.497.590.000		80,09	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase anak terlantar yang dibina	Perse n	100,00		100,00		100,00		7,00		20,00		30,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,00		30,00		30,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Ketahanan Bencana	1.06.06	Program : Penanganan Bencana						673.974.986		213.974.986		217.474.500		31.171.000		202.927.500		177.142.500		202.927.500		202.927.500		93,31		202.927.500		30,11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,00		11,22		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
					kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota																								Perlindungan Anak				
					Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Perse n	100,00		100,00		100,00		30,00		24,54		45,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI		
Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1.06.07			Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				575.000.000		190.000.000		148.853.750		3.600.000		13.894.000		32.754.000		141.454.936		141.454.936		95,03		141.454.936		24,60	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
					Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		60,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI		
	2.08			BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.468.000.000		790.000.000		728.314.500		55.050.033		178.431.000		362.337.000		632.098.500		632.098.500		108,44	86,79		632.098.500		108,44	25,61	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02			Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				821.000.000		260.000.000		260.000.500		39.300.000		60.629.000		87.418.000		188.503.000		188.503.000		72,50		188.503.000		22,96	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Perse n	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		30,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik t Kinerja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Perse n	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		10,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Perse n	100,00		100,00		100,00		33,30		33,00		45,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Perse n	100,00		100,00		100,00		35,30		35,30		35,30		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Partisipasi angkatan kerja perempuan	Perse n	100,00		100,00		100,00		66,37		66,37		66,37		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Perse n	100,00		100,00		100,00		64,00		64,00		64,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Perse n	100,00		100,00		100,00		51,00		51,00		51,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03	Program : Perlindungan Perempuan						652.000.000		205.000.000		225.188.000		15.750.000		78.750.000		142.950.000		222.738.000		222.738.000		98,91		222.738.000		34,16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	30,00		30,00		30,00		15,00		15,00		25,00		98,00		98,00		326,67		98,00		326,67		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	MELAM PAUI
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		38,00		30,00		40,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu																								Perlindungan Anak	
					Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perse n	100,00		100,00		100,00		2,00		3,00		3,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Perse n	100,00		100,00		100,00		1,00		1,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga						370.000.000		120.000.000		117.000.000		33		39.052.000		39.052.000		95.983.500		95.983.500		82,04		95.983.500		25,94	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,00		30,00		65,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI
Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak						125.000.000		40.000.000		8.596.000		0		0		0		8.044.000		8.044.000		93,58		8.044.000		64,4	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Data Gender Anak	Doku men	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)						425.000.000		140.000.000		117.530.000		0		0		92.917.000		116.830.000		116.830.000	99,40		116.830.000	27,49	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
					Persentase Pemenuhan Hak Anak	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		30,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T TINGGI	
Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07	Program : Perlindungan Khusus Anak						75.000.000		25.000.000		0		0		0		0		0		0	0,00		0	0,00	0	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Perse n	100,00		100,00		100,00		15,00		40,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGA T RENDAH	
	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI						38.694.564.965		12.696.905.340		13.083.758.479		1.718.192.308		5.042.960.123		7.858.373.673		11.922.128.755		11.922.128.755	166,73	91,12		11.922.128.755	166,73	30,81	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAM PAUI
	2.07	BIDANG TENAGA KERJA						37.369.564.965		12.271.905.340		12.983.758.479		1.718.192.308		5.002.436.123		7.775.281.673		11.839.036.755		11.839.036.755	215,47	91,18		11.839.036.755	215,47	31,68	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan	2.07.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						31.024.564.965		10.156.905.340		10.427.508.479		1.718.192.308		4.269.060.223		6.508.438.673		9.328.801.755		9.328.801.755	89,46		9.328.801.755	30,07	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																															
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT TINGGI	
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	2.07.03	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						3.210.000.000		1.070.000.000		1.680.000.000		0		276.456.900		772.061.000		1.675.648.000		1.675.648.000		99,74		1.675.648.000		52,20		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	69,06		69,06		69,06		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,40		0,40		0,40		0,00		0,00		0,07		2,05		2,05		512,50		2,05		512,50		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAMPAUI	
					Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	3,40		3,40		3,40		0,00		0,00		0,00		2,88		2,88		84,71		2,88		84,71		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	TINGGI	
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,57		0,57		0,57		0,00		0,00		0,07		2,80		2,80		491,23		2,80		491,23		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAMPAUI	
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,11		0,11		0,11		0,00		0,00		0,00		0,13		0,13		118,18		0,13		118,18		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAMPAUI	
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,07		0,07		0,07		0,00		0,00		0,00		0,48		0,48		685,71		0,48		685,71		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAMPAUI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	2.07.04	Program : Penempatan Tenaga Kerja						2.235.000.000		745.000.000		506.250.000				324.740.000		353.081.000		505.949.000		505.949.000		99,94		505.949.000		22,64	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
					Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Person	5,81		5,81		5,81		1,63		3,89		8,58		7,69		7,69		132,36		7,69		132,36	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAM PAUI		
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	2.07.05	Program : Hubungan Industrial						900.000.000		300.000.000		370.000.000				132.179.000		141.701.000		328.638.000		328.638.000		88,82		328.638.000		36,52	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Person	50,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		83,66		83,66		167,32		83,66		167,32	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAM PAUI		
					Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Person	0,64		0,64		0,64		0,28		0,32		0,56				0,56		87,50		0,56		87,50	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	TINGGI		
					Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Person	38,88		38,88		38,88		29,00		29,00		71,00				71,00		182,61		71,00		182,61	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAM PAUI		
					Keselamatan dan perlindungan	Person	50,00		50,00		50,00		80,00		80,00		85,00				85,00		170,00		85,00		170,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAM PAUI		
					Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Person	100,00		100,00		100,00		67,00		67,00		69,00				69,00		69,00		69,00		69,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SEDANG		
	3.32	BIDANG TRANSMIGRASI						1.325.000.000		425.000.000		100.000.000			0		40.524.000		83.092.000		83.092.000		83.092.000	40,00	83,09		83.092.000	40,00	6,27	Dinas Ketenagakerja	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																												an dan Transmigrasi		
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	3.32.02	Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi						225.000.000		75.000.000		0		0		0		0		0		0	0,00	0		0	0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
					Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Ketenagakerjaa n dan Transmigrasi	SANGA T REND AH	
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	3.32.03	Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi						725.000.000		225.000.000		93.880.000		0		34.404.000		76.972.000		76.972.000		76.972.000	81,99		76.972.000	10,62	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			
					Persentase transmigran swakarsa	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Ketenagakerjaa n dan Transmigrasi	SANGA T TINGGI	
					Persentase calon transmigran yang dibina/ dilatih	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Ketenagakerjaa n dan Transmigrasi	SANGA T REND AH	
					Persentase transmigran yang diberangkatkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Ketenagakerjaa n dan Transmigrasi	SANGA T REND AH	
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	3.32.04	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi						375.000.000		125.000.000		6.120.000		0		6.120.000		6.120.000		6.120.000		6.120.000	100,00		6.120.000	1,63	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			
					Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Ketenagakerjaa n dan Transmigrasi	SANGA T TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																													n dan Transmigrasi		
	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						65.249.658.569		21.410.467.828		27.584.352.279		3.966.165.755		8.051.917.330		15.549.388.783		26.468.728.643		26.468.728.643	118,86	95,96		26.468.728.643	100,63	40,57	Dinas Pangan dan Pertanian	MELAM PAUI	
	2.09	BIDANG PANGAN						54.198.491.366		17.729.497.122		18.359.352.279		3.667.498.255		7.355.233.330		12.266.057.783		17.451.934.807		17.451.934.807	102,50	95,06		17.451.934.807	102,50	32,20	Dinas Pangan dan Pertanian		
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.09.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						49.123.491.366		16.074.497.122		17.499.852.279		3.667.498.255		7.211.845.830		12.063.977.283		16.795.658.967		16.795.658.967	95,98			16.795.658.967	34,19		Dinas Pangan dan Pertanian		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB				A		A		A		A		112,50		A		112,50		Dinas Pangan dan Pertanian	MELAM PAUI	
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.09.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						990.000.000		330.000.000		30.000.000		0		4.600.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000	15,33			4.600.000	0,46		Dinas Pangan dan Pertanian		
					Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.09.03	Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						3.255.000.000		1.065.000.000		644.500.000		0		45.698.500		102.339.500		530.912.840		530.912.840	82,38			530.912.840	16,31		Dinas Pangan dan Pertanian		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Person	100,00		100,00		100,00		20,00		40,00		60,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI	
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.09.04	Program : Penanganan Kerawanan Pangan					190.000.000		60.000.000		55.000.000			0		1.090.000		3.142.000		21.618.000		21.618.000		39,31		21.618.000		11,38	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI	
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.09.05	Program : Pengawasan Keamanan Pangan					640.000.000		200.000.000		130.000.000			0		91.999.000		91.999.000		99.145.000		99.145.000		76,27		99.145.000		15,49	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI	
	3.27	BIDANG PERTANIAN					11.051.167.203		3.680.970.706		9.225.000.000		298.667.500		696.684.000		3.283.331.000		9.016.793.836		9.016.793.836		125,68	97,74		9.016.793.836		99,85	Dinas Pangan dan Pertanian		
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					2.730.000.000		910.000.000		2.145.000.000		298.667.500		364.124.000		1.298.340.000		2.002.612.500		2.002.612.500		2.002.612.500		93,36		2.002.612.500		73,36	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Person	6,26		6,25		6,25		5,42		5,70		6,00		6,25		6,25		100,00		6,25		99,84		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI	
					Pertumbuhan Produksi Pertanian	Person	2,00		2,00		2,00		0,00		0,50		1,00		2,00		2,00		100,00		2,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI	
					Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Person	73,00		73,00		73,00		15,00		30,00		50,00		73,00		73,00		100,00		73,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Produksi Padi	Ton	271.350,00		270.808,00		270.808,00		6.799,00		133.320,00		149.606,00		266.937,00		266.937,00		98,57		266.937,00		98,37	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI	
					Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Perse n	3,00		3,00		3,00		0,50		1,00		2,00		3,00		3,00		100,00		3,00		100,00	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI	
					Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Perse n	77,00		77,00		77,00		0,00		0,00				77,00		77,00		100,00		77,00		100,00	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI	
					Pengembangan Tanaman Manggis	Perse n	20,00		5,00		5,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		400,00		20,00		100,00	Dinas Pangan dan Pertanian	MELAM PAUI	
Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.03				Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			5.551.167.203		1.880.970.706		6.145.000.000		0		0		1.433.891.000		6.140.735.336		6.140.735.336		99,93		6.140.735.336		110,62	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Perse n	48,00		48,00		48,00		0,00		0,00		15,00		48,00		48,00		100,00		48,00		100,00	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI	
Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.05				Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			750.000.000		250.000.000		400.000.000		0		220.140.000		225.880.000		382.621.000		382.621.000		95,66		382.621.000		51,02	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Persentase Pengendalian Serangan OPT	Perse n	50,00		50,00		50,00		15,80		30,00		40,00		50,00		50,00		100,00		50,00		100,00	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI	
					Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Perse n	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		100,00		50,00		100,00	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI	
Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.06				Program : Perizinan Usaha Pertanian			120.000.000		40.000.000		20.000.000		0		0		0		2.910.000		2.910.000		14,55		2.910.000		2,43	Dinas Pangan dan Pertanian	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Perse n	75,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		75,00		75,00		100,0 0		75,00		100,0 0		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGA T TINGGI		
Sasaran 9 : Meningka tnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian						1.900.000. 000		600.000.00 0		515.000.00 0			0		112.420.00 0		325.220.00 0		487.915.00 0		487.915.00 0		94, 74		487.915.00 0		25, 68	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Cakupan bina kelompok petani	Perse n	80,00		73,00		73,00		80,00			0,00		0,00		80,00		80,00		109,5 9		80,00		100,0 0		Dinas Pangan dan Pertanian	MELAM PAUI	
	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						123.670.86 4.499		40.580.305 .302		44.338.588 .486		7.795.430 .743		18.745.808 .896		30.342.207 .031		41.695.208 .520		41.695.208 .520		102, 32	94, 04		41.695.208 .520		100, 15	33, 71	Dinas Lingkungan Hidup	MELAM PAUI
	2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						123.670.86 4.499		40.580.305 .302		44.338.588 .486		7.795.430 .743		18.745.808 .896		30.342.207 .031		41.695.208 .520		41.695.208 .520		102, 32	94, 04		41.695.208 .520		100, 15	33, 71	Dinas Lingkungan Hidup	
Sasaran 14 : Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah melalui penerapa n SPBE	2.11.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						110.519.86 4.499		37.125.305 .302		37.076.777 .218		7.667.681 .243		17.665.506 .354		26.816.423 .670		35.257.851 .248		35.257.851 .248		95, 09		35.257.851 .248		31, 90	Dinas Lingkungan Hidup			
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	BB		BB		BB		A		A		A		A		A		112,5 0		A		112,5 0		Dinas Lingkungan Hidup	MELAM PAUI		
Sasaran 4 : Meningka tnya Kualitas Lingkung an Hidup	2.11.02	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup						600.000.00 0		200.000.00 0		625.000.00 0		1.464.000		256.500.00 0		266.721.50 0		560.208.00 0		560.208.00 0		89, 63		560.208.00 0		93, 37	Dinas Lingkungan Hidup			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI	
					Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI	
					Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI	
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.03	Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						4.141.000.000		1.275.000.000		2.746.767.182		106.285.500		312.323.000		1.491.482.646		2.606.776.662		2.606.776.662		94,90		2.606.776.662		62,95	Dinas Lingkungan Hidup		
					Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Person	90,00		70,00		70,00		45,00		60,00		75,00		90,00		90,00		128,57		90,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	MELAMPAUI	
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/Kategori	70,00		60,00		60,00		45,00		60,00		60,00		60,00		60,00		100,00		60,00		85,71		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI	
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/Kategori	80,00		70,00		70,00		50,00		75,00		80,00		80,00		80,00		114,29		80,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	MELAMPAUI	
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/Kategori	37,93		37,18		37,18		25,00		50,00		50,00		50,00		50,00		134,48		50,00		131,82		Dinas Lingkungan Hidup	MELAMPAUI	
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.04	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)						300.000.000		100.000.000		37.500.000			0		19.349.000		21.766.500		34.090.000		34.090.000		90,91		34.090.000		11,36	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI	
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.05	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)						150.000.000		50.000.000		0			0			0			0			0,00		0		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	11.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					950.000.000		250.000.000		216.828.000		0		12.605.600		143.856.900		208.623.600		208.623.600		96,22		208.623.600		21,96	Dinas Lingkungan Hidup		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			Persen	100,00		100,00		100,00		35,00		50,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota			Persen	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		100,00		25,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota			Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		25,00		25,00		50,00		50,00		100,00		50,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Persentase pembinaan/ sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan			Persen	10,00		10,00		10,00		0,00		5,00		5,00		10,00		10,00		100,00		10,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas	2.11.07	Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan					350.000.000		100.000.000		50.000.000		0		5.686.000		6.866.000		6.866.000		6.866.000		13,73		6.866.000		1,96	Dinas Lingkungan Hidup		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lingkungan Hidup		Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH																												
					Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
					Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
					Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
					Penetapan hak MHA	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
					Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.08				Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			950.000.000		300.000.000		275.000.000		4.430.000		42.214.000		100.445.000		250.015.500		250.015.500		90,91		250.015.500		26,32	Dinas Lingkungan Hidup	
					Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Perse n	100,00		100,00		100,00		3,00		25,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
					Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.09				Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			425.000.000		125.000.000		51.850.000						3.959.000		50.814.500		50.814.500		98,00		50.814.500		11,96	Dinas Lingkungan Hidup	
					Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
					Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		50,00		50,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Dinas Lingkungan Hidup	TINGGI
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.10				Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			350.000.000		100.000.000		100.000.000		15.570.000		30.570.000		54.835.767		86.374.267		86.374.267		86,37		86.374.267		24,68	Dinas Lingkungan Hidup	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kualitas Lingkungan Hidup																														
					Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Perse n	100,00		100,00		100,00		22,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGA T TINGGI
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.11.11				Program : Pengelolaan Persampahan			4.935.000.000		955.000.000		3.158.866.086		0		401.054.942		1.435.850.048		2.633.588.743		2.633.588.743		83,37		2.633.588.743		53,37	Dinas Lingkungan Hidup	
					Timbulan sampah yang ditangani	Perse n	75,00		75,00		75,00		12,70		50,00		65,00		100,00		100,00		133,33		100,00		133,33		Dinas Lingkungan Hidup	MELAM PAUI
					Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Perse n	32,00		31,00		31,00		0,06		20,00		25,00		50,00		50,00		161,29		50,00		156,25		Dinas Lingkungan Hidup	MELAM PAUI
					Persentase cakupan area pelayanan	Perse n	75,00		75,00		75,00		48,00		60,00		70,00		75,00		75,00		100,00		75,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGA T TINGGI
					Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	72,00		72,00		72,00		0,00		50,00		60,00		72,00		72,00		100,00		72,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGA T TINGGI
					Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Perse n	75,00		75,00		75,00		35,00		50,00		65,00		75,00		75,00		100,00		75,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGA T TINGGI
	2.12.0.00.0.00.01.0000				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			56.145.055.047		18.422.960.689		19.488.607.757		3.583.348.417		9.258.898.059		14.013.141.614		18.153.060.306		18.153.060.306		102,94		18.153.060.306		100,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAM PAUI
	2.12				BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			56.145.055.047		18.422.960.689		19.488.607.757		3.583.348.417		9.258.898.059		14.013.141.614		18.153.060.306		18.153.060.306		102,94		18.153.060.306		100,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik	2.12.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			52.085.055.047		17.242.960.689		18.271.786.457		3.583.348.417		8.586.682.559		13.190.453.014		17.132.058.186		17.132.058.186		93,76		17.132.058.186		32,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/ Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk						635.000.000		210.000.000		199.860.300				17.014.400		44.374.400		155.968.400		155.968.400		78,04		155.968.400		24,56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Perekaman KTP elektronik	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,29		100,91		99,25		99,79		99,79		99,79		99,79		99,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
					Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,21		100,79		99,17		99,70		99,70		99,70		99,70		99,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kateg ori	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
					Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,21		100,79		99,17		99,70		99,70		99,70		99,70		99,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Perse n	60,00		50,00		50,00		49,21		53,06		58,36		65,97		65,97		131,94		65,97		109,95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAM PAUI	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat at terhadap Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah melalui penerapan SPBE	2.12.03	Program : Pencatatan Sipil						285.000.000		160.000.000		36.000.000			0		8.350.000		15.390.000		31.470.000		31.470.000		87,42		31.470.000		11,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Kepemilikan akta kelahiran	Perse n	100,00		100,00		100,00		87,11		89,59		96,43		98,43		98,43		98,43		98,43		98,43		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGA T TINGGI	
					Rasio bayi berakte kelahiran	Perse n	100,00		100,00		100,00		87,11		89,59		96,43		98,43		98,43		98,43		98,43		98,43		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGA T TINGGI	
					Rasio pasangan berakte nikah	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGA T TINGGI	
					Cakupan penerbitan akta kelahiran	Perse n	100,00		100,00		100,00		87,11		89,59		96,43		98,25		98,25		98,25		98,25		98,25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGA T TINGGI	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat at terhadap Penyelenggaraan	2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						3.045.000.000		785.000.000		957.461.000			0		646.851.100		751.161.200		821.500.720		821.500.720		85,80		821.500.720		26,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ggaran Pemerintah an Daerah melalui penerapan SPBE																															
					Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perse n	57,00		55,00		55,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		109,09		60,00		105,26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAM PAUI		
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan						95.000.000		25.000.000		23.500.000		0		0		11.763.000		12.063.000		12.063.000		51,33		12.063.000		12,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Profil data kependudukan	Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI		
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						66.008.375.530		21.659.426.756		20.915.340.176		1.347.592.418		7.372.804.965		12.708.131.673		18.648.089.283		18.648.089.283		118,91	89,16		18.648.089.283	145,38	28,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAM PAUI
	2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						66.008.375.530		21.659.426.756		20.915.340.176		1.347.592.418		7.372.804.965		12.708.131.673		18.648.089.283		18.648.089.283		118,91	89,16		18.648.089.283	145,38	28,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan	2.13.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						38.908.375.530		12.459.426.756		11.291.521.261		1.331.592.418		4.702.593.874		7.143.322.870		9.856.042.992		9.856.042.992		87,29		9.856.042.992		25,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Masyarakat at terhadap Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah melalui penerapa n SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB				A		A		A		A		112,50		A		112,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAM PAUI	
Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.02	Program : Penataan Desa						2.700.000.000		1.100.000.000		60.160.000		0		30.244.500		31.762.500		47.675.000		47.675.000		79,25		47.675.000		1,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	20,00		30,00		30,00				24,02		28,00		30,00		30,00		100,00		30,00		150,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.03	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa						5.150.000.000		1.550.000.000		4.264.403.315		0		1.946.388.991		3.959.334.683		4.224.297.283		4.224.297.283		99,06		4.224.297.283		82,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	11,48		5,00		5,00				2,78		6,00		5,00		5,00		100,00		5,00		43,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
					Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	2,00		2,00		2,00				2,00		2,00		2,00		2,00		100,00		2,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipas	2.13.04	Program : Administrasi Pemerintahan Desa						12.650.000.000		4.350.000.000		1.774.470.600		16.000.000		494.441.000		850.239.100		1.397.661.600		1.397.661.600		78,76		1.397.661.600		11,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
i Masyarakat dalam Pembangunan																														
					Persentase peningkatan status desa mandiri	Perse n	50,00		50,00		50,00		0,00		2,50		2,50		143,33		143,33		286,66		143,33		286,66		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAM PAUI
					Persentase desa tertib administrasi	Perse n	30,00		40,00		40,00		5,00		10,00		30,00		60,00		60,00		150,00		60,00		200,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAM PAUI
					Persentase pembinaan BUM Desa	Perse n	20,00		40,00		40,00		5,00		10,00		30,00		40,00		40,00		100,00		40,00		200,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
					Persentase penertiban aset desa	Perse n	20,00		50,00		50,00		5,00		10,00		40,00		60,00		60,00		120,00		60,00		300,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAM PAUI
					Persentase kepala desa yang dibina	Perse n	30,00		40,00		40,00		0,00		0,00		100,00		40,00		40,00		100,00		40,00		133,33		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
					Persentase aparaturnya yang dibina	Perse n	30,00		45,00		45,00		0,00		0,00		0,00		60,00		60,00		133,33		60,00		200,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAM PAUI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.05				Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			6.600.000.000		2.200.000.000		3.524.785.000				199.136.600		723.472.520		3.122.412.408		3.122.412.408		88,58		3.122.412.408		47,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Perse n	100,00		100,00		100,00				0,00		20,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
					Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
					Persentase LSM aktif	Perse n	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemberdayaan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																													Masyarakat dan Desa		
					Persentase PKK aktif	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
					Persentase Posyandu aktif	Perse n	100,00		100,00		100,00				50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
					Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Perse n	5,00		5,00		5,00				0,00		3,00		5,00		5,00		100,00		5,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGA T TINGGI
	2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						69.043.243.370		22.655.262.469		22.170.608.231		1.026.676.348		6.629.296.815		12.777.038.757		20.914.886.728		20.914.886.728	93,35	94,34		20.914.886.728	91,94	30,29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI	
	2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						69.043.243.370		22.655.262.469		22.170.608.231		1.026.676.348		6.629.296.815		12.777.038.757		20.914.886.728		20.914.886.728	93,35	94,34		20.914.886.728	91,94	30,29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.14.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						20.605.819.815		6.862.690.484		7.540.048.231		592.524.348		3.119.481.760		5.305.507.074		6.738.401.043		6.738.401.043	89,37			6.738.401.043	32,70		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.14.02	Program : Pengendalian Penduduk						1.254.324.950		349.385.450		366.000.000				19.500.000		167.922.000		329.558.000		329.558.000	90,04		329.558.000		26,27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						TFR (Angka Kelahiran Total)	Perse n	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		100,00		2,50		100,00		100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
						Rata-rata jumlah anak per keluarga	Perse n	36,00		36,00		36,00		9,00		18,00		27,00		36,00		36,00		100,00		36,00		100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
						Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Perse n	31,11		30,00		30,00		7,50		15,00		22,50		30,00		30,00		100,00		30,00		96,43	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.14.03	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						27.905.383.950		9.017.281.650		8.643.660.000		296.726.000		2.453.248.055		4.400.535.683		8.375.523.685		8.375.523.685	96,90		8.375.523.685		30,01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Perse n	99,00		99,00		99,00		24,75		49,50		74,25		99,00		99,00		100,00		99,00		100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																													Keluarga Berencana	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Perse n	38,40		35,22		35,22		8,81		17,61		26,42		35,22		35,22		100,00		35,22		91,72		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Perse n	94,00		94,00		94,00		23,50		47,00		70,50		94,00		94,00		100,00		94,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Ratio Akseptor KB	Perse n	25.521,00		25.521,00		25.521,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		0,39		100,00		0,39		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T RENDAH
					Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Perse n	83,28		83,28		83,28		20,82		41,64		62,46		83,28		83,28		100,00		83,28		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71		25,71		25,71		6,43		1,28		1,92		25,71		25,71		100,00		25,71		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Perse n	534,83		534,83		534,83		133,71		267,42		401,12		534,83		534,83		100,00		534,83		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Perse n	46,24		46,24		46,24		11,56		23,12		34,68		46,24		46,24		100,00		46,24		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Perse n	17,78		17,78		17,78		4,45		88,90		13,33		17,78		17,78		100,00		17,78		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Perse n	691.167,00		691.167,00		691.167,00		172.791,75		345.583,50		518.375,25		691.167,00		691.167,00		100,00		691.167,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Person	161.153,00		161.153,00		161.153,00		40.288,25		80.576,50		120.864,75		161.153,00		161.153,00		100,00		161.153,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Person	624.471,00		624.471,00		624.471,00		156.117,75		312.235,50		468.353,25		624.471,00		624.471,00		100,00		624.471,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Person	126,00		126,00		126,00		126,00		126,00		126,00		126,00		126,00		100,00		126,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Person	23,90		23,90		23,90		5,98		11,95		17,17		23,90		23,90		100,00		23,90		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Person	391.178,00		272.476,00		272.476,00		68.119,00		136.238,00		204.357,00		272.476,00		272.476,00		100,00		272.476,00		69,66		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI
					Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai	Person	135,00		135,00		135,00		135,00		135,00		135,00		135,00		135,00		100,00		135,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Perangkat Daerah		Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					dengan standarisasi pelayanan																									
Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.14.04	Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					19.277.714.655		6.425.904.885		5.620.900.000			137.426.000		1.037.067.000		2.903.074.000		5.471.404.000		5.471.404.000		97,34		5.471.404.000		28,38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Perse n	15,56		15,56		15,56		3,89		7,78		11,67		15,56		15,56		100,00		15,56		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
					Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Perse n	3.314,00		3.314,00		3.314,00		3.314,00		3.314,00		3.314,00		3.314,00		3.314,00		100,00		3.314,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
					Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Perse n	674,00		674,00		674,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
					Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Perse n	15,65		15,65		15,65		3,91		7,83		11,74		15,65		15,65		100,00		15,65		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
					Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Perse n	53,71		53,71		53,71		13,42		26,85		40,28		53,71		53,71		100,00		53,71		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
					Rata-rata usia kawin pertama wanita	Perse n	19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		100,00		19,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN					66.767.092.489		21.908.385.684		48.946.062.163		9.132.858.250		19.157.079.165		29.676.377.364		47.052.569.893		47.252.841.893		63,3	96,54		47.252.841.893	58,01	70,77	Dinas Perhubungan	RENDAH



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kt Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2.15	BIDANG PERHUBUNGAN						66.767.092.489		21.908.385.684		48.946.062.163		9.132.858.250		19.157.079.165		29.676.377.364		47.052.569.893		47.252.841.893	63,03	96,54		47.252.841.893	58,01	70,77	Dinas Perhubungan	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.15.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						55.623.732.784		18.333.385.684		39.671.043.323		8.588.165.250		17.023.145.291		25.745.293.095		38.247.028.048		38.247.028.048		96,41		38.247.028.048		68,76	Dinas Perhubungan	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI
Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	2.15.02	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)						10.393.359.705		3.325.000.000		9.225.290.840		294.693.000		2.084.205.874		3.881.356.269		8.755.813.845		8.755.813.845		94,91		8.755.813.845		84,24	Dinas Perhubungan	
					Rasio konektivitas kabupaten/kota	Perse n	100,00		98,00		98,00		0,96		0,96		0,96		0,96		0,96		0,98		0,96		0,96		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
					Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Poin	85,00		80,00		80,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		87,50		70,00		82,35		Dinas Perhubungan	TINGGI
					Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00		311.378,00		311.378,00		311.378,00		311.378,00		311.378,00		311.378,00		311.378,00		100,00		311.378,00		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI
					Rasio ijin trayek	Perse n	50,00		50,00		50,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		20,00		10,00		20,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
					Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	3.100,00		3.070,00		3.070,00		1.812,00		2.083,00		1.992,00		2.032,00		2.032,00		66,19		2.032,00		65,55		Dinas Perhubungan	SEDANG



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Perhubungan	SANGA T TINGGI
					Persentase layanan angkutan darat	Perse n	1.397,00		1.397,00		1.397,00		4,00		3,00		6,00		5,00		5,00		0,36		5,00		0,36		Dinas Perhubungan	SANGA T RENDAH
					Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Perse n	881,00		881,00		881,00		84,16		87,26		85,45		85,30		85,30		9,68		85,30		9,68		Dinas Perhubungan	SANGA T RENDAH
					Pemasangan Rambu-rambu	Perse n	75,00		70,00		70,00		77,48		77,48		77,48		77,48		77,48		110,69		77,48		103,31		Dinas Perhubungan	MELAM PAUI
					Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,00		0,00		100,00		0,00		100,00		Dinas Perhubungan	SANGA T TINGGI
					Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Oran g	5.762.620,00		5.762.620,00		5.762.620,00		3.170.644,00		4.227.552,00		2.264.760,00		2.717.712,00		2.717.712,00		47,16		2.717.712,00		47,16		Dinas Perhubungan	SANGA T RENDAH
					Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Oran g	539.548,00		539.548,00		539.548,00		13.778,00		66.343,00		43.275,00		215.310,00		215.310,00		39,91		215.310,00		39,91		Dinas Perhubungan	SANGA T RENDAH
Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	2.15.03	Program : Pengelolaan Pelayaran						750.000.000		250.000.000		49.728.000	250000000		49.728.000		49.728.000		49.728.000		250.000.000		502,73			250.000.000		33,33	Dinas Perhubungan	
					Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berjin	Perse n	70,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		100,00		30,00		42,86		Dinas Perhubungan	SANGA T TINGGI
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					83.458.865.613		27.385.482.106		30.440.689.944		2.811.223.786		5.506.910.390		15.345.868.388		29.565.273.919		29.565.273.919		116,42	97,12		29.565.273.919	89,50	35,42	Dinas Komunikasi dan Informatika	MELAM PAUI
	2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					77.973.865.613		25.670.482.106		28.535.973.944		2.792.355.786		5.138.052.890		14.252.311.196		27.788.290.195		27.788.290.195		101,39	97,38		27.788.290.195	98,48	35,64	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabil	2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					28.198.865.613		9.330.482.106		12.511.662.444		2.504.058.234		2.917.689.442		8.781.308.297		11.866.471.381		11.866.471.381		94,84			11.866.471.381	42,08		Dinas Komunikasi dan Informatika	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
itas Publik dan Kepuasan Masyarakat at terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		A		A		A		A		A		112,50		A		112,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	MELAM PAUI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat at terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.16.02	Program : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik						18.265.000.000		5.970.000.000		4.652.718.000		38.919.800		578.041.650		2.029.498.099		4.589.922.099		4.589.922.099		98,65		4.589.922.099		25,13	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Perse n	99,00		95,00		95,00		15,00		25,53		61,10		95,00		95,00		100,00		95,00		95,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI
						Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Perse n	99,00		95,00		95,00		16,40		13,08		47,14		95,00		95,00		100,00		95,00		95,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI
						Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Perse n	99,00		95,00		95,00		3,16		19,53		39,00		95,00		95,00		100,00		95,00		95,96	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			Kinerja	Rp	Kin erja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
					Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Perse n	100,00		100,00		100,00		5,00		9,39		35,80		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI			
					Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI			
					Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Perse n	99,00		95,00		95,00		0,00		14,12		18,55		95,00		95,00		100,00		95,00		95,96		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI			
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.16.03			Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika				31.510.000.000		10.370.000.000		11.371.593.500		249.377.752		1.642.321.798		3.441.504.800		11.331.896.715		11.331.896.715		99,65		11.331.896.715		35,96	Dinas Komunikasi dan Informatika				
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,39		23,77		47,50		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI			
					Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Perse n	100,00		90,00		90,00		18,31		35,22		35,27		90,00		90,00		100,00		90,00		90,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI			
	2.20		BIDANG STATISTIK						2.210.000.000		675.000.000		812.250.000		4.508.000		130.325.000		239.850.000		737.834.832		737.834.832		60,00	90,84		737.834.832		53,68	33,39	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan	2.20.02			Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral				2.210.000.000		675.000.000		812.250.000		4.508.000		130.325.000		239.850.000		737.834.832		737.834.832		90,84		737.834.832		33,39	Dinas Komunikasi dan Informatika				



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																															
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Person	95,00		85,00		85,00		0,00		19,78		34,56		85,00		85,00		100,00		85,00		89,47	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT TINGGI		
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Person	95,00		85,00		85,00		0,00		49,92		49,92		85,00		85,00		100,00		85,00		89,47	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT TINGGI		
					Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data	Ada		Ada		Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		0,00		Tidak Ada		0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH		
					Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)	Buku	Ada		Ada		Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		0,00		Tidak Ada		0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH		
					Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Person	95,00		85,00		85,00		0,00		6,56		37,50		85,00		85,00		100,00		85,00		89,47	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT TINGGI		
	2.21	BIDANG PERSANDIAN							3.275.000.000		1.040.000.000		1.092.466.000		14.360.000		238.532.500		853.707.192		1.039.148.892		1.039.148.892	255,56	95,12		1.039.148.892	122,22	31,73	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan	2.21.02	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							3.275.000.000		1.040.000.000		1.092.466.000		14.360.000		238.532.500		853.707.192		1.039.148.892		1.039.148.892	95,12		1.039.148.892	31,73	Dinas Komunikasi dan Informatika			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ggaraan Pemerintah an Daerah melalui penerapan SPBE																															
					Tingkat keamanan informasi pemerintah	Perse n	30,00		30,00		30,00		0,00		0,00		43,70		50,00		50,00		166,67		50,00		166,67		Dinas Komunikasi dan Informatika	MELAM PAUI	
					Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGA T TINGGI	
					Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Perse n	50,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		500,00		50,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	MELAM PAUI	
	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						51.592.753.288		16.929.207.120		19.267.151.484		4.222.903.945		7.769.357.549		11.762.724.496		17.507.098.311		17.507.098.311	84,11	90,87		17.507.098.311	82,91	33,93	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI	
	2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						46.192.753.288		15.304.207.120		17.264.465.684		4.121.023.945		7.044.574.749		10.712.005.596		15.684.558.011		15.684.558.011	97,19	90,85		15.684.558.011	84,36	33,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.17.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		42.462.753.288		14.154.207.120		15.100.717.578		4.121.023.945		6.953.384.649		10.299.835.696		13.954.714.191		13.954.714.191		92,41		13.954.714.191	32,86		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kt Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predik kt	A		A		A				A		A		A		A		100,00		A		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
Sasaran 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.17.02				Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			162.500.000		50.000.000		50.000.000		0		16.811.500		16.811.500		17.472.000		17.472.000		34,94		17.472.000		10,75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
					Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Perse n	91,67		87,50		87,50		2,86		2,86		8,57		62,86		62,86		71,84		62,86		68,57		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SEDAN G
Sasaran 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.17.03				Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			602.500.000		185.000.000		125.000.000		0		660.000		50.860.000		83.586.600		83.586.600		66,87		83.586.600		13,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
					Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Perse n	90,05		89,70		89,70		24,95		49,90		63,37		85,94		85,94		95,81		85,94		95,44		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
Sasaran 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha	2.17.04				Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			942.500.000		290.000.000		200.000.000		0		0		173.433.400		188.883.400		188.883.400		94,44		188.883.400		20,04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Mikro Kecil Menengah																															
					Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Person	90,25		89,70		89,70		15,45		15,45		63,37		85,94		85,94		95,81		85,94		95,22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI		
					Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Person	18,00		12,00		12,00		0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		100,00		12,00		66,67	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI		
Sasaran 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.17.05	Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian						307.500.000		100.000.000		189.707.600		0		17.869.500		81.821.000		189.607.500		189.607.500		99,95		189.607.500		61,66	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Person	74,60		72,82		72,82		0,00		11,24		66,67		72,82		72,82		100,00		72,82		97,61	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI		
Sasaran 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.17.07	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)						1.190.000.000		375.000.000		1.060.882.816		0		9.270.500		42.665.400		735.397.270		735.397.270		69,32		735.397.270		61,80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Person	100,00		85,23		85,23		0,00		9,21		56,67		85,23		85,23		100,00		85,23		85,23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	SANGAT TINGGI		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																													dan Perindustrian	
					Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Person	57,39		56,46		56,46		0,00		0,00		0,00		56,46		56,46		100,00		56,46		98,38		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
					Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Person	100,00		75,23		75,23		0,00		8,41		66,57		75,23		75,23		100,00		75,23		75,23		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
					Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Person	3,85		2,53		2,53		0,00		1,71		1,88		2,53		2,53		100,00		2,53		65,71		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
					Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Person	63,22		57,90		57,90		0,00		0,00		0,00		57,90		57,90		100,00		57,90		91,58		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
Sasaran 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.17.08	Program : Pengembangan UMKM					525.000.000		150.000.000		538.157.690		0		46.578.600		46.578.600		514.897.050		514.897.050		95,68		514.897.050		98,08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
					Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Person	28,04		20,56		20,56		0,00		0,00		0,00		20,56		20,56		100,00		20,56		73,32		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
					Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Person	11,50		9,63		9,63		0,00		0,00		0,00		9,63		9,63		100,00		9,63		83,74		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	3.30	BIDANG PERDAGANGAN						3.275.000.000		975.000.000		952.772.800		19.480.000		273.118.800		430.281.600		816.698.200		816.698.200	95,38	85,72		816.698.200	83,36	24,94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	3.30.02	Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan						350.000.000		110.000.000		129.437.400		0		52.819.400		52.819.400		95.169.400		95.169.400	73,53			95.169.400	27,19		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Perse n	97,86		95,32		95,32		20,52		31,89		43,26		100,00		100,00		104,91		100,00		102,19		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	MELAM PAUI
					Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		23,33		40,00		46,67		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	3.30.03	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						70.000.000		20.000.000		20.000.000		0		0		0		20.000.000		20.000.000	100,00			20.000.000	28,57		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
					Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
Sasaran 7 : Stabilisasi Harga	3.30.04	Program : Stabilisasi Harga						970.000.000		295.000.000		259.545.400		0		65.380.500		192.130.500		208.825.000		208.825.000	80,46			208.825.000	21,53		Dinas Koperasi Usaha Kecil	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Meningka tnya Pertumbu han Investasi dan Usaha Perdagang an dan Perindust rian				Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting																								dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Perse n	100,00		100,00		100,00		78,57		100,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI	
					Persentase kinerja realisasi pupuk	Perse n	39,00		37,00		37,00		21,50		21,50		37,00		37,00		37,00		100,0 0		37,00		94,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI	
Sasaran 7 : Meningka tnya Pertumbu han Investasi dan Usaha Perdagang an dan Perindust rian	3.30.05			Program : Pengembangan Ekspor				600.000.00 0		200.000.00 0		178.790.00 0			0	49.900.000		49.900.000		175.510.00 0		175.510.00 0		98, 17		175.510.00 0	29, 25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Tingkat Nilai Export bersih	Perse n	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		100,0 0		1,00		100,0 0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI	
					Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Perse n	3,22		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		2,00		100,0 0		2,00		62,11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI	
Sasaran 7 : Meningka tnya Pertumbu	3.30.06			Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				1.000.000. 000		275.000.00 0		275.000.00 0		19.480.00 0		105.018.90 0		135.431.70 0		233.193.80 0		233.193.80 0		84, 80		233.193.80 0	23, 32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/ Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
han Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian																													dan Perindustrian		
					Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Perse n	100,00		64,62		64,62		6,85		13,20		18,50		31,60		31,60		48,90		31,60		31,60		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T RENDAH	
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	3.30.07				Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			285.000.000		75.000.000		90.000.000		0		0		0		84.000.000		84.000.000		93,33		84.000.000		29,47	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Perse n	70,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		100,00		50,00		71,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI		
					Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Perse n	70,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		100,00		50,00		71,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI		
	3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN						2.125.000.000		650.000.000		1.049.913.000		82.400.000		451.664.000		620.437.300		1.005.842.100		1.005.842.100		87,50	95,80		1.005.842.100	79,99	47,33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	3.31.02	Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri						1.525.000.000		450.000.000		849.953.000		82.400.000		425.050.000		593.823.300		806.549.700		806.549.700		94,89		806.549.700		52,89	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian																														
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Perse n	100,00		60,00		60,00		20,00		40,00		60,00		60,00		60,00		100,00		60,00		60,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
					Cakupan bina kelompok pengrajin	Perse n	100,00		83,33		83,33		34,29		47,46		76,19		83,33		83,33		100,00		83,33		83,33		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	3.31.03				Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			225.000.000		50.000.000		49.974.000		0		26.614.000		26.614.000		49.974.000		49.974.000		100,00		49.974.000		22,21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
					Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Perse n	21,45		20,71		20,71		1,55		4,84		7,48		20,71		20,71		100,00		20,71		96,55		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Perse n	100,00		100,00		100,00		66,67		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T RENDAH



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/ Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					dikeluarkan oleh instansi terkait																										
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	3.31.04	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						375.000.000		150.000.000		149.986.000		0		0		0		149.318.400		149.318.400		99,55		149.318.400		39,82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Doku men	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
					Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegia tan	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		10,00		100,00		10,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGA T TINGGI
	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						40.211.998.886		13.194.823.196		14.360.304.889		2.676.076.374		6.350.358.801		10.335.702.100		13.510.558.134		13.510.558.134		103,50	94,08		13.510.558.134	96,69	33,60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAM PAUI
	2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL						40.211.998.886		13.194.823.196		14.360.304.889		2.676.076.374		6.350.358.801		10.335.702.100		13.510.558.134		13.510.558.134		103,50	94,08		13.510.558.134	96,69	33,60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Sasaran 14 : Meningkatkan	2.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan						35.980.296.178		11.801.503.096		13.313.945.530		2.676.076.374		6.165.568.171		9.778.758.740		12.567.703.674		12.567.703.674		94,40		12.567.703.674		34,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE		Daerah Kabupaten/Kota																											Terpadu Satu Pintu	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		AA		AA		AA		AA		AA		111,11		AA		111,11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAM PAUI	
Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	2.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal						299.969.400		99.989.800		147.477.259		0		102.911.250		115.975.200		124.074.000		124.074.000		84,13		124.074.000		41,36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	6,00		5,60		5,60		1,72		3,00		4,00		6,00		6,00		107,14		6,00		100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAM PAUI	
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	7,70		6,73		6,73		1,68		3,56		5,00		8,30		8,30		123,33		8,30		107,79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAM PAUI	
					Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	884,00		730,00		730,00		255,00		425,00		520,00		658,00		658,00		90,14		658,00		74,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Perse n	29,50		28,50		28,50		10,00		20,00		23,00		28,00		28,00		98,25		28,00		94,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGA T TINGGI	
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	2.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal						599.850.000		199.950.000		35.512.000		0		1.452.000		1.452.000		29.539.600		29.539.600		83,18		29.539.600		4,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	2,00		2,00		2,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		100,00		2,00		100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGA T TINGGI	
					Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	8,40		7,40		7,40		6,30		6,30		6,80		7,25		7,25		97,97		7,25		86,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGA T TINGGI	
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	2.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal						899.959.500		299.986.500		135.366.000		0		15.177.380		41.706.830		119.257.530		119.257.530		88,10		119.257.530		13,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Rasio daya serap tenaga kerja	Perse n	19,50		18,50		18,50		9,00		12,00		15,00		18,00		18,00		97,30		18,00		92,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGA T TINGGI	
					Persentase Jumlah Perizinan dan Non	Perse n	96,58		94,58		94,58		100,00		100,00		100,00		97,00		97,00		102,56		97,00		100,43	Dinas Penanaman	MELAM PAU	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Perizinan Yang diterbitkan																								Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	93,50		92,50		92,50		97,96		96,05		97,38		94,46		94,46		102,12		94,46		101,03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAM PAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	2.18.05				Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			1.180.182.000		393.394.000		585.147.000		0		13.443.000		271.343.730		527.593.730		527.593.730		90,16		527.593.730		44,70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Perse n	8,70		7,14		7,14		3,00		5,00		6,00		8,00		8,00		112,04		8,00		91,95		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAM PAUI
Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	2.18.06				Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			1.251.741.808		399.999.800		142.857.100		0		51.807.000		126.465.600		142.389.600		142.389.600		99,67		142.389.600		11,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGA T TINGGI
	2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						100.026.789.616		32.809.455.312		28.538.346.227		3.214.777.598		12.014.677.701		17.905.049.944		26.617.060.047		26.617.060.547		97,75	93,27	26.617.060.547		87,51	28,61	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA						73.551.789.616		23.984.455.312		24.978.536.227		2.969.447.598		10.898.246.701		15.602.798.444		23.214.561.547		23.214.561.547	99,36	92,94		23.214.561.547	83,04	31,56	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.19.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						58.823.596.509		18.565.000.000		16.919.786.227		2.952.747.598		7.114.186.701		11.112.584.444		15.231.878.547		15.231.878.547	90,02			15.231.878.547	25,89		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	2.19.02	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						2.325.000.000		775.000.000		1.112.500.000		16.700.000		450.110.000		624.370.000		1.106.422.000		1.106.422.000	99,45			1.106.422.000	47,59		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Perse n	0,00		0,0001		0,0001		0,0000		0,0000		0,0001		0,0001		0,00		99,45		0,00		49,73		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Perse n	0,01		0,01		0,01		0,00		0,00		0,01		0,01		0,01		99,45		0,01		99,45		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Perse n	0,41		0,41		0,41		0,01		0,17		0,23		0,41		0,41		99,45		0,41		99,45		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
					Persentase Wirausaha Muda	Perse n	0,84		0,74		0,74		0,01		0,30		0,42		0,74		0,74		99,45		0,74		87,61		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
					Persentase Pembinaan Kepemudaan	Perse n	0,41		0,41		0,41		0,01		0,17		0,23		0,41		0,41		99,45		0,41		99,45		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	2.19.03	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							10.123.910.624		4.024.455.312		6.621.250.000		0		3.333.950.000		3.695.116.000		6.552.361.000		6.552.361.000		98,96		6.552.361.000		64,72	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Tingkat prestasi olahraga	Perse n	85,00		70,00		70,00		0		35,25		39,06		69,27		69,27		98,96		69,27		81,50		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
					Cakupan Pembinaan Olahraga	Perse n	75,00		50,00		50,00		0		25,18		27,90		49,48		49,48		98,96		49,48		65,97		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
					Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Perse n	65,00		40,00		40,00		0		20,14		22,32		40,00		40,00		100,00		40,00		61,54		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
					Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Perse n	60,00		40,00		40,00		0		20,14		22,32		39,58		39,58		98,96		39,58		65,97		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	
					Tingkat atlet berprestasi	Perse n	55,00		50,00		50,00		0		25,18		27,90		49,48		49,48		98,96		49,48		89,96		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Perse n	20,00		16,00		16,00		0		8,06		8,93		15,83		15,83		98,96		15,83		79,17		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	2.19.04				Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			2.279.282.483		620.000.000		325.000.000		0		0		170.728.000		323.900.000		323.900.000		99,66		323.900.000		14,21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Perse n	100,00		100,00		100,00		0		0		52,53		99,66		99,66		99,66		99,66		99,66		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
	2.22				BIDANG KEBUDAYAAN			13.125.000.000		4.375.000.000		1.557.310.000		9.430.000		414.740.000		1.126.630.500		1.550.175.000		1.550.175.500		99,71		1.550.175.500		94,81	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	2.22.02				Program : Pengembangan Kebudayaan			7.500.000.000		2.500.000.000		1.282.310.000		9.430.000		414.740.000		913.740.000		1.275.825.000		1.275.825.000		99,49		1.275.825.000		17,01	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Buda ya	90,00		70,00		70,00		0,51		22,64		25,58		69,65		69,65		99,49		69,65		77,38		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
					Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Perse n	55,00		55,00		55,00		0,40		17,79		20,10		54,72		54,72		99,49		54,72		99,49		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
					Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Perse n	30,00		30,00		30,00		0,22		9,70		10,96		29,85		29,85		99,49		29,85		99,49		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Perse n	30,00		30,00		30,00		0,22		9,70		10,96		29,85		29,85		99,49		29,85		99,49		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	2.22.03	Program : Pengembangan Kesenian Tradisional						825.000.000		275.000.000		50.000.000		0		0		0		49.900.000		49.900.000		99,80		49.900.000		6,05	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	12,00		12,00		12,00		0		0		0		11,98		11,98		99,80		11,98		99,80		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
					Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Perse n	3,00		3,00		3,00		0		0		0		2,99		2,99		99,80		2,99		99,80		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
					Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Perse n	30,00		30,00		30,00		0		0		0		29,94		29,94		99,80		29,94		99,80		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	2.22.04	Program : Pembinaan Sejarah						1.350.000.000		450.000.000		50.000.000		0		0		49.450.500		49.450.000		49.450.500		98,90		49.450.500		3,66	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Perse n	50,00		50,00		50,00		0		0		49,45		49,45		49,45		98,90		49,45		98,90		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan	2.22.05	Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						1.800.000.000		600.000.000		100.000.000		0		0		90.085.000		100.000.000		100.000.000		100,00		100.000.000		5,56	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
n dan Kebudayaan																																
					Terlestarikannya Cagar Budaya	Perse n	100,00		100,00		100,00		0		0		90,09		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI		
					Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Perse n	60,00		60,00		60,00		0		0		54,05		60,00		60,00		100,00		60,00		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI		
					Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0		0		90,09		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI		
					Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	20,00		12,00		12,00		0		0		10,81		12,00		12,00		100,00		12,00		60,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	2.22.06	Program : Pengelolaan Permuseuman							1.650.000.000		550.000.000		75.000.000		0		0		73.355.000		75.000.000		75.000.000		100,00		75.000.000		4,55	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
					Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Perse n	20,00		20,00		20,00		0		0		19,56		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI		
	3.26	BIDANG PARIWISATA							13.350.000.000		4.450.000.000		2.002.500.000		235.900.000		701.691.000		1.175.621.000		1.852.323.500		1.852.323.500		93,88	92,50		1.852.323.500	84,32	13,88	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
Sasaran 8 : Meningkatkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi	3.26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							9.450.000.000		3.150.000.000		977.654.500		150.000.000		287.153.000		467.543.000		918.006.000		918.006.000		93,90		918.006.000		9,71	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/ Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kreatif Masyarakat																															
					Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Person	4,84		6,53		6,53		1,00		1,92		3,12		6,13		6,13		93,90		6,13		126,69		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Person	2,78		0,42		0,42		0,06		0,12		0,20		0,39		0,39		93,90		0,39		14,19		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Tingkat hunian akomodasi	Person	31,05		19,87		19,87		3,05		5,84		9,50		18,66		18,66		93,90		18,66		60,09		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Kunjungan wisata	Person	90,00		80,00		80,00		12,27		23,50		38,26		75,12		75,12		93,90		75,12		83,47		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Lama kunjungan Wisata	Hari	2,00		1,50		1,50		0,23		0,44		0,72		1,41		1,41		93,90		1,41		70,42		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Person	0,31		0,31		0,31		0,05		0,09		0,15		0,29		0,29		93,90		0,29		93,90		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Person	0,43		0,43		0,43		0,07		0,13		0,20		0,40		0,40		93,90		0,40		93,90		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
					Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Person	0,31		0,31		0,31		0,05		0,09		0,15		0,29		0,29		93,90		0,29		93,90		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI	
Sasaran 8 : Meningkatkan Potensi Pariwisata dan	3.26.03	Program : Pemasaran Pariwisata						1.200.000.000		400.000.000		274.330.000		0		69.970.000		69.970.000		266.309.500		266.309.500		97,08		266.309.500		22,19		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ekonomi Kreatif Masyarakat																														
					Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	2,00		2,00		2,00		0		0,51		0,51		1,94		1,94		97,08		1,94		97,08		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
					Persentase destinasi wisata yang diminati	Perse n	0,32		0,32		0,32		0		0,08		0,08		0,31		0,31		97,08		0,31		97,08		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
Sasaran 8 : Meningkatkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	3.26.04				Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			1.500.000.000	500.000.000		311.250.000		85.900.000		235.658.000		310.658.000		310.658.000		310.658.000		99,81		310.658.000		20,71		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Perse n	1,00		1,00		1,00		0,28		0,76		1,00		1,00		1,00		99,81		1,00		99,81		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGA T TINGGI
Sasaran 8 : Meningkatkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	3.26.05				Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			1.200.000.000	400.000.000		439.265.500		0		108.910.000		327.450.000		357.350.000		357.350.000		81,35		357.350.000		29,78		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Perse n	1,00		1,00		1,00		0		0,25		0,75		0,81		0,81		81,35		0,81		81,35		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	TINGGI
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						35.659.697.125	11.701.069.627		12.544.172.676		2.289.417.091		5.002.313.935		7.991.214.259		11.821.277.345		11.821.277.345		106,46	94,24	11.821.277.345	105,75	33,15		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN						32.534.697.125		10.676.069.627		12.120.445.676		2.272.868.091		4.802.649.191		7.677.820.815		11.431.128.420		11.431.128.420	113,38	94,31		11.431.128.420	111,97	35,14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.23.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						31.037.485.779		10.218.858.281		11.527.731.976		2.245.004.741		4.734.123.191		7.539.004.865		10.943.314.252		10.943.314.252		94,93		10.943.314.252		35,26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		A		A		A		A		A		112,50		A		112,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	2.23.02	Program : Pembinaan Perpustakaan						1.347.211.346		407.211.346		562.713.700		27.863.350		62.731.000		133.020.950		468.438.668		468.438.668		83,25		468.438.668		34,77	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perse n	85,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		60,21		60,21		86,01		60,21		70,84		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	TINGGI
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	70,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		70,98		70,98		101,40		70,98		101,40		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI
					Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Perse n	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		10,00		100,00		10,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Perse n	10,70		10,70		10,70		0,00		0,00		0,00		13,90		13,90		129,91		13,90		129,91		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI
					Laju pengunjung perpustakaan	Perse n	50,00		50,00		50,00		29,20		49,10		81,70		120,80		120,80		241,60		120,80		241,60		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	75.000,00		75.000,00		75.000,00		9.782,00		20.947,00		33.707,00		46.366,00		46.366,00		61,82		46.366,00		61,82	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RENDAH	
					Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	8,00		8,00		8,00		1,60		2,70		3,50		3,80		3,80		47,50		3,80		47,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	16,00		16,00		16,00		0,30		1,70		2,10		2,50		2,50		15,63		2,50		15,63	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
					Laju Anggota Perpustakaan	Persen	51,52		51,52		51,52		30,10		49,10		81,70		120,80		120,80		234,47		120,80		234,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI	
					Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	80,00		90,00		90,00		55,10		84,10		108,30		116,80		116,80		129,78		116,80		146,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI	
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	2.23.03				Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno			150.000.000		50.000.000		30.000.000		0		5.795.000		5.795.000		19.375.500		19.375.500		64,59		19.375.500		12,92	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	61,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		100,00		50,00		81,97	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT TINGGI	
	2.24				BIDANG KEARSIPAN				3.125.000.000		1.025.000.000	423.727.000	16.549.000		199.664.744	313.393.444	390.148.925		390.148.925	99,54	92,08		390.148.925	99,54	12,48	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.24.02				Program : Pengelolaan Arsip			2.600.000.000		850.000.000	423.727.000	16.549.000		199.664.744	313.393.444	390.148.925	390.148.925	92,08		390.148.925		15,01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							
					Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		63,81		63,81		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT TINGGI	
					Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	39,10		39,10		39,10		0,00		4,70		4,70		39,10		39,10		100,00		39,10		100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik t Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Perse n	27,00		27,00		27,00		3,78		7,55		12,92		26,53		26,53		98,26		26,53		98,26		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Persentase Penyusutan Arsip	Perse n	20,00		20,00		20,00		0,00		12,07		12,07		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Arsip Aktif	Perse n	20,00		20,00		20,00		0,00		12,00		12,00		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Arsip Inaktif	Perse n	20,00		20,00		20,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Arsip Vital	Perse n	20,00		20,00		20,00		0,00		10,64		10,64		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Perse n	75,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		89,57		89,57		119,43		89,57		119,43		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI
					Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	Perse n	4,70		4,70		4,70		0,00		2,82		2,82		3,80		3,80		80,81		3,80		80,81		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.24.03	Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip					525.000.000		175.000.000		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Perse n	100,00		100,00		100,00		28,57		49,99		85,70		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T TINGGI
					Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Perse n	19,99		19,99		19,99		0,00		0,00		0,00		34,49		34,49		172,53		34,49		172,53		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAM PAUI
					Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Perse n	1,75		1,75		1,75		0,00		0,00		0,00		0,41		0,41		23,43		0,41		23,43		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGA T RENDAH
	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN					50.075.319.367		16.431.289.263		15.565.500.940		2.581.920.574		7.788.524.968		10.849.057.290		14.433.936.445		14.433.936.445		149.92.73		14.433.936.445		136.82.28		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
	3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					46.167.019.367		15.159.550.263		13.395.850.962		2.516.422.374		7.116.672.768		9.011.112.190		12.315.784.725		12.315.784.725		164.87.94		12.315.784.725		150.26.68		Dinas Perikanan dan Peternakan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kin erja	Rp	Kin erja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	3.25.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						34.261.512.367		11.195.629.263		12.137.114.914		2.502.332.374		7.040.242.768		8.329.009.990		11.105.133.675		11.105.133.675		91,50		11.105.133.675		32,41	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI
Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.25.03	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap						1.819.350.000		596.986.000		261.090.800		4.644.000		27.714.000		218.229.300		254.683.800		254.683.800		97,55		254.683.800		14,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.751,77		1.635,30		1.635,30		387,20		741,30		1.196,79		1.663,19		1.663,19		101,71		1.663,19		94,94		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAU
					Produksi perikanan	Perse	5,25		5,25		5,25		5,25		5,32		5,60		6,15		6,15		117,14		6,15		117,14		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAU
					Konsumsi ikan	Perse	35,00		30,00		30,00		20,00		30,00		35,00		35,00		35,00		116,67		35,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAU
					Cakupan bina kelompok nelayan	Perse	20,31		18,97		18,97		10,00		12,00		16,00		20,21		20,21		106,54		20,21		99,51		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAU
					Laju Produksi perikanan kelompok nelayan	Perse	3,48		3,32		3,32		3,00		3,00		3,60		4,00		4,00		120,48		4,00		114,94		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAU
					Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Perse	82,33		76,85		76,85		19,36		29,65		47,87		66,52		66,52		86,56		66,52		80,80		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Produksi Perikanan Tangkap	Perse n	3,50		3,50		3,50		2,45		4,78		3,30		2,85		2,85		81,43		2,85		81,43		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.25.04				Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya			8.740.712.000		2.925.452.000		725.370.048		9.446.000		31.490.000		296.012.500		695.519.250		695.519.250		95,88		695.519.250		79,6	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.721,11		16.351,74		16.351,74		26.420,00		54.115,00		79.855,00		106.003,20		106.003,20		648,27		106.003,20		566,22		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
					Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	20.473,00		17.987,00		17.987,00		26.420,00		54.115,00		79.855,00		106.003,20		106.003,20		589,33		106.003,20		517,77		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
					Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	1.100.000.000,00		1.078.038.512,00		1.078.038.512,00		285.000.000,00		572.800.000,00		871.100.000,00		1.159.679.000,00		1.159.679.000,00		107,57		1.159.679.000,00		105,43		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
					Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	10.200.000,00		8.100.000,00		8.100.000,00		1.850.000,00		3.335.000,00		5.335.000,00		7.120.000,00		7.120.000,00		87,90		7.120.000,00		69,80		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
					Produksi Ikan Hias	Ekor	646.076,00		608.990,00		608.990,00		135.500,00		271.690,00		488.750,00		534.180,00		534.180,00		87,72		534.180,00		82,68		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
					Produksi Perikanan budidaya	Ton	38.000,00		36.000,00		36.000,00		26.240,00		54.115,00		79.855,00		106.003,20		106.003,20		294,45		106.003,20		278,96		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
					Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Perse n	100,00		100,00		100,00		30,00		55,00		85,00		104,00		104,00		104,00		104,00		104,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.25.05				Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			126.878.000		41.632.000		26.652.000		0		12.626.000		8.846.000		26.342.000		26.342.000		98,84		26.342.000		20,76	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		40,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI	
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.25.06	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						1.218.567.000		399.851.000		245.623.200		0		4.600.000		159.014.400		234.106.000		234.106.000		95,31		234.106.000		19,21	Dinas Perikanan dan Peternakan			
					Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	550,00		400,00		400,00		100,00		200,00		300,00		450,00		450,00		112,50		450,00		81,82	Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI			
					Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	16,00		14,00		14,00		14,00		15,00		15,00		16,00		16,00		114,29		16,00		100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI			
					Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	150,00		130,00		130,00		150,00		156,00		156,00		157,00		157,00		120,77		157,00		104,67	Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI			
	3.27	BIDANG PERTANIAN							3.908.300.000		1.271.739.000		2.169.649.978		65.498.200		671.852.200		1.837.945.100		2.118.151.720		2.118.151.720		128,98	97,63		2.118.151.720	118,67	54,20	Dinas Perikanan dan Peternakan	
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						1.583.816.000		519.701.000		1.064.669.149		41.849.000		432.085.000		948.128.000		1.038.348.020		1.038.348.020		97,53		1.038.348.020		65,56	Dinas Perikanan dan Peternakan			
					Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50		1,50		1,50		0,25		0,90		1,20		1,50		1,50		100,00		1,50		100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI			
					Cakupan Akseptor IB	Persen	85,00		75,00		75,00		19,30		45,00		65,00		85,00		85,00		113,33		85,00		100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI			
					Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	15,00		10,00		10,00		2,50		6,00		11,00		15,00		15,00		150,00		15,00		100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Perse n	3,00		2,00		2,00		0,50		1,00		2,00		3,00		3,00		150,00		3,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.03				Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			190.313.000		62.448.000		165.000.000		0		86.128.000		98.488.000		165.000.000		165.000.000		100,00		165.000.000		86,70	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Persentase RPH sesuai standar	Perse n	100,00		100,00		100,00		75,00		45,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.04				Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1.693.173.000		552.488.000		814.730.829		17.549.200		111.371.200		725.851.100		795.114.200		795.114.200		97,59		795.114.200		46,96	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Perse n	0,00		0,00		0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		0,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI
					Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Perse n	70,00		70,00		70,00		30,00		64,00		70,00		70,00		70,00		100,00		70,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI
					Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasu s	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		0,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI
					Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokas i	17,00		17,00		17,00		11,00		14,00		17,00		17,00		17,00		100,00		17,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI
					Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	20.000,00		20.000,00		20.000,00		6.914,00		12.280,00		17.660,00		17.660,00		17.660,00		88,30		17.660,00		88,30		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
					Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan /Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Perse n	87,50		79,00		79,00		39,70		42,85		62,00		79,00		79,00		100,00		79,00		90,29		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGA T TINGGI
					Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	992,00		828,00		828,00		1,00		659,00		818,00		985,00		985,00		118,96		985,00		99,29		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	19,80		16,20		16,20		1,70		8,10		12,50		16,20		16,20		100,00		16,20		81,82		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI		
					Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	42,70		38,80		38,80		0,00		0,00		115,00		151,00		151,00		389,18		151,00		353,63		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI		
Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian							440.998.000		137.102.000		125.250.000		6.100.000		42.268.000		65.478.000		119.689.500		119.689.500		95,56		119.689.500		27,14	Dinas Perikanan dan Peternakan		
					Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Person	12,00		16,00		16,00		3,00		9,00		16,00		20,00		20,00		125,00		20,00		166,67		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAM PAUI		
	4.01.5.06.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH							253.411.464.682		83.152.282.031		77.893.306.944		2.539.699.091		28.257.265.098		44.128.833.493		68.679.686.061		68.679.686.061		105,96	88,17		68.679.686.061	105,96	27,10	Sekretariat Daerah	MELAM PAUI
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							251.401.464.682		82.552.282.031		77.800.356.944		2.539.699.091		28.257.265.098		44.123.492.493		68.616.085.061		68.616.085.061		106,41	88,20		68.616.085.061	106,41	27,29	Sekretariat Daerah	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	4.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum							190.060.209.300		63.243.130.002		61.330.802.475		2.168.955.328		24.254.573.630		38.566.364.626		55.711.142.321		55.711.142.321		90,84		55.711.142.321		29,31	Sekretariat Daerah		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A				A		A		A		A		100,00		A		100,00		Sekretariat Daerah	SANGAT TINGGI		
					Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		3,64		3,64		40,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	SANGAT TINGGI		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00		100,00		100,00		2,44		27,65		45,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.01.02	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						42.720.000.000		13.870.000.000		11.274.784.424		8.220.000		2.583.637.262		3.893.755.173		8.544.083.283		8.544.083.283		75,78		8.544.083.283		20,00	Sekretariat Daerah		
					Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		20,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah	SANGAT TINGGI
					Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		5,00		11,02		25,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00	Sekretariat Daerah	TINGGI
					Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	100,00		100,00		100,00		5,00		90,00		91,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Daerah	SANGAT TINGGI
					Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00		15,00		15,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		66,67		10,00		66,67		10,00	Sekretariat Daerah	SEDANG
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.01.03	Program : Perekonomian Dan Pembangunan						18.621.255.382		5.439.152.029		5.194.770.045		362.523.763		1.419.054.206		1.663.372.694		4.360.859.457		4.360.859.457		83,95		4.360.859.457		23,42	Sekretariat Daerah		
					Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		1,00		1,00		10,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00	Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
					Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		1,00		1,00		15,00		72,00		72,00		72,00		72,00		72,00		72,00	Sekretariat Daerah	SEDANG
					Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00		8,00		8,00		3,00		4,00		20,00		20,00		20,00		250,00		20,00		250,00		20,00	Sekretariat Daerah	MELAMPAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Perse n	100,00		100,00		100,00		3,00		89,00		90,00		98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		Sekretariat Daerah	SANGA T TINGGI
					Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Perse n	100,00		100,00		100,00		23,00		53,00		66,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	SANGA T TINGGI
					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Perse n	55,00		55,00		55,00		3,00		3,00		40,00		95,00		95,00		172,73		95,00		172,73		Sekretariat Daerah	MELAM PAUI
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						2.010.000.000		600.000.000		92.950.000		0		0		5.341.000		63.601.000		63.601.000	100,00	68,42		63.601.000	100,00	3,16	Sekretariat Daerah	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.06.02	Program : Pengelolaan Perbatasan						2.010.000.000		600.000.000		92.950.000		0		0		5.341.000		63.601.000		63.601.000	100,00	68,42		63.601.000	100,00	3,16	Sekretariat Daerah	
					Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	SANGA T TINGGI
	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD						218.510.484.516		71.700.171.332		97.650.057.849		5.310.971.814		48.907.805.277		72.364.473.776		94.296.456.638		94.296.456.638	96,65	96,57		94.296.456.638	96,65	43,15	Sekretariat DPRD	SANGA T TINGGI
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						218.510.484.516		71.700.171.332		97.650.057.849		5.310.971.814		48.907.805.277		72.364.473.776		94.296.456.638		94.296.456.638	96,65	96,57		94.296.456.638	96,65	43,15	Sekretariat DPRD	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui	4.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota						141.981.900.006		46.876.175.032		59.267.088.883		3.800.028.588		28.857.026.939		42.869.693.227		57.563.222.159		57.563.222.159	97,13			57.563.222.159	40,54		Sekretariat DPRD	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		B		B		B		B		B		100,00		B		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI
					Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00		100,00		100,00		14,05		59,18		87,92		96,57		96,57		96,57		96,57		96,57		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	4.02.02				Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			76.528.584.510		24.823.996.300		38.382.968.966		1.510.943.226		20.050.778.338		29.494.780.549		36.733.234.479		36.733.234.479		95,70		36.733.234.479		48,00	Sekretariat DPRD	
					Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI
					Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI
					Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)																									
					Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Perse n	100,00		100,00		100,00		14,05		56,57		83,21		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Sekretariat DPRD	TINGGI
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		14,05		56,57		83,21		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Sekretariat DPRD	TINGGI
	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						41.729.432.806		13.692.741.053		16.356.006.161		2.472.636.586		6.165.353.238		9.282.600.952		14.317.351.188		14.317.351.188	111,32	87,54		14.317.351.188	103,97	34,31	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	MELAM PAUI
	5.01	PERENCANAAN						38.154.432.806		12.542.741.053		15.504.121.161		2.455.984.526		6.151.949.178		9.100.883.842		13.562.344.478		13.562.344.478	101,37	87,48		13.562.344.478	101,31	35,55	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	5.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						32.029.432.806		10.617.741.053		11.959.082.886		2.170.937.526		5.021.776.276		7.357.535.360		10.482.718.390		10.482.718.390		87,65		10.482.718.390		32,73	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA		AA		AA		AA		AA		AA		AA		AA		100,00		AA		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan	5.01.02	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi						3.675.000.000		1.175.000.000		1.719.520.275		259.499.000		702.433.250		1.077.460.024		1.615.817.026		1.615.817.026		93,97		1.615.817.026		43,97	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Pembangunan Daerah																											Pengembangan Daerah	
					Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Doku men	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI
					Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Doku men	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI
					Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Doku men	Ada		Ada		Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI
					Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Perse n	100,00		100,00		100,00		30,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI
					Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Doku men	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI
					Capaian Kinerja RKPD	Perse n	89,50		89,00		89,00		41,33		57,82		75,03		98,71		98,71		110,91		98,71		110,29		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	MELAM PAUI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerint	5.01.03	Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						2.450.000.000		750.000.000		1.825.518.000		25.548.000		427.739.652		665.888.458		1.463.809.062		1.463.809.062		80,19		1.463.809.062		59,75	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ahan Daerah																																
					Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Perse n	100,00		100,00		100,00		43,11		59,39		76,50		97,30		97,30		97,30		97,30		97,30		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI		
					Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Perse n	100,00		100,00		100,00		37,87		58,82		79,03		121,61		121,61		121,61		121,61		121,61		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	MELAM PAUI		
					Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Perse n	100,00		100,00		100,00		35,82		48,81		62,48		83,90		83,90		83,90		83,90		83,90		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	TINGGI		
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3.575.000.000		1.150.000.000		851.885.000		16.652.060		13.404.060		181.717.110		755.006.710		755.006.710		136,18	88,63		755.006.710	110,61	21,12	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.05.02	Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah							3.575.000.000		1.150.000.000		851.885.000		16.652.060		13.404.060		181.717.110		755.006.710		755.006.710		88,63		755.006.710	21,12		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					Persentase implementasi rencana kelitbangan	Perse n	15,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		25,00		25,00		250,00		25,00		166,67		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	MELAM PAUI		
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI		
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	Perse n	53,19		42,55		42,55		0,00		0,00		0,00		40,30		40,30		94,71		40,30		75,76		Badan Perencanaan Pembangunan	SANGA T TINGGI		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					dalam penerapan inovasi daerah.																								Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGA T TINGGI
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						1.299.682.152.701		426.466.644.072		451.757.274.251		18.631.814.302		178.828.184.346		273.833.038.264		378.397.264.758		378.397.264.758	120,60	83,76		378.397.264.758	119,30	29,11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAM PAUI
	5.02	KEUANGAN						1.299.682.152.701		426.466.644.072		451.757.274.251		18.631.814.302		178.828.184.346		273.833.038.264		378.397.264.758		378.397.264.758	120,60	83,76		378.397.264.758	119,30	29,11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						169.552.644.072		58.106.644.072		83.127.174.198		9.291.732.351		19.994.158.001		32.373.184.069		38.835.410.669		38.835.410.669	46,72			38.835.410.669	22,90		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.02.02	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah						1.123.679.508.629		366.210.000.000		366.844.325.363		9.291.732.351		158.617.866.095		240.779.915.345		338.271.262.499		338.271.262.499	92,21			338.271.262.499	30,10		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
					Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Perse n	15,00		15,00		15,00		18,71		18,71		18,71		18,71		18,71		124,73		18,71		124,73		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAM PAUI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Perse n	89,00		85,00		85,00		72,00		72,00		72,00		72,00		72,00		84,71		72,00		80,90		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
					Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP		WTP		WTP				WTP		WTP		WTP		WTP		100,00		WTP		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGA T TINGGI	
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Perse n	76,14		75,54		75,54				36,60		36,60		89,76		89,76		118,82		89,76		117,89		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAM PAUI	
					Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Perse n	2,03		2,13		2,13				5,12		5,12		3,70		3,70		173,71		3,70		182,27		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAM PAUI	
					Persentase SILPA terhadap APBD	Perse n	1,58		1,74		1,74				5,07		5,07		3,60		3,60		206,90		3,60		227,85		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAM PAUI	
					Persentase belanja pendidikan (20%)	Perse n	35,00		32,00		32,00		26,38		26,38		26,38		26,38		26,38		82,44		26,38		75,37		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
					Persentase belanja kesehatan (10%)	Perse n	25,00		21,00		21,00		16,30		16,30		16,30		16,30		16,30		77,62		16,30		65,20		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
					Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Perse n	1,74		1,80		1,80		1,66		1,66		1,66		1,66		1,66		92,22		1,66		95,40		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGA T TINGGI	
					Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		100,00		Tepat Waktu		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGA T TINGGI	
					Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6		6,00		6,00		39,10		39,10		39,10		39,10		39,10		651,67		39,10		651,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAM PAUI	
					Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGA T TINGGI	
					Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	8		8,00		8,00		7,49		7,49		7,49		7,49		7,49		93,63		7,49		93,63		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGA T TINGGI	
					Penyerapan Anggaran	Skor	20		20,00		20,00								14,29		14,29		71,45		14,29		71,45		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDAN G	
					Kondisi Keuangan Daerah	Skor	4		4,00		4,00								3,60		3,60		90,00		3,60		90,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan	5.02.03	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.450.000.000		2.150.000.000		1.785.774.690		48.349.600		216.160.250		679.938.850		1.290.591.590		1.290.591.590		72,27		1.290.591.590		20,01		Badan Keuangan dan Aset Daerah	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																																
					Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Dokumen	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		100,00		Ya		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI		
					Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100,00		100,00		100,00		59,00		59,00		59,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI		
					Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	30,00		25,00		25,00		33,20		33,20		33,20		33,83		33,83		135,32		33,83		112,77		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI		
					Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		46,09		46,09		65,84		46,09		46,09		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
					Persentase pengolahan BMD yang dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI		
					Persentase penyusutan/penghapusan BMD	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI		
					Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
					Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
					Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
					Administrasi BMD yang Andal	Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH							100.150.638.735		32.862.578.527		36.306.850.436		8.377.335.172		16.022.824.013		23.540.833.746		34.255.788.973		34.255.788.973		72,18	94,35		34.255.788.973	89,60	34,20	Badan Pendapatan Daerah	SEDANG



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5.02	KEUANGAN						100.150.638.735		32.862.578.527		36.306.850.436		8.377.335.172		16.022.824.013		23.540.833.746		34.255.788.973		34.255.788.973	72,18	94,35		34.255.788.973	89,60	34,20	Badan Pendapatan Daerah	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						87.650.638.735		28.912.578.527		31.191.824.836		8.018.793.328		14.345.981.764		21.100.473.543		29.534.333.133		29.534.333.133		94,69		29.534.333.133		33,70	Badan Pendapatan Daerah	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.02.04	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.500.000.000		3.950.000.000		5.115.025.600		358.541.844		1.676.842.249		2.440.360.203		4.721.455.840		4.721.455.840		92,31		4.721.455.840		37,77	Badan Pendapatan Daerah	
					Rasio PAD	Perse n	0,93		0,83		0,83		0,13		0,27		0,52		0,74		0,74		88,80		0,74		79,25		Badan Pendapatan Daerah	TINGGI
					Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Perse n	10,15		11,05		11,05		86,30		71,33		44,14		21,13		21,13		52,30		21,13		48,04		Badan Pendapatan Daerah	RENDAH
					Rasio Pajak daerah	Perse n	50,84		49,84		66,26		8,94		69,90		66,90		62,37		62,37		94,14		62,37		122,69		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT TINGGI
					Rasio retribusi daerah	Perse n	5,14		4,53		29,91		4,68		26,26		30,72		7,05		7,05		23,57		7,05		137,17		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Persentase capaian PAD	Perse n	89,85		88,95		88,95		13,70		28,67		55,86		78,87		78,87		88,67		78,87		87,78		Badan Pendapatan Daerah	TINGGI
					Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Perse n	10,50		9,50		9,50		1,33		2,24		4,27		5,49		5,49		57,80		5,49		52,30		Badan Pendapatan Daerah	REND A
	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						121.394.713.619		39.833.428.518		34.959.705.892		3.265.037.383		9.012.859.735		15.545.215.358		21.658.260.215		21.658.260.215		112.561.95		21.658.260.215		104.3217.84	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI
	5.03	KEPEGAWAIAN						116.774.713.619		38.408.428.518		31.291.086.592		3.002.537.383		8.685.779.735		12.965.453.658		18.131.526.315		18.131.526.315		108.1257.94		18.131.526.315		102.1553.25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	5.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						98.574.713.619		32.358.428.518		25.796.090.992		2.897.105.254		7.436.337.680		10.561.381.714		14.040.231.755		14.040.231.755		54.43		14.040.231.755		14.24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah	5.03.02	Program : Kepegawaian Daerah						18.200.000.000		6.050.000.000		5.494.995.600		105.432.129		1.249.442.055		2.404.071.944		4.091.294.560		4.091.294.560		74,45		4.091.294.560		22,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ahan Daerah																														
					Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Perse n	82,67		80,88		80,88		82,00		85,77		85,77		86,48		86,48		106,92		86,48		104,61		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI
					Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Perse n	17,67		16,99		16,99		20,34		18,97		18,97		24,36		24,36		143,38		24,36		137,86		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI
					Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Perse n	59,92		49,80		49,80		40,53		62,12		62,12		71,43		71,43		143,43		71,43		119,21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI
					Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Oran g	34,00		34,00		34,00		32,00		29,00		30,00		29,00		29,00		85,29		29,00		85,29		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINGGI
					Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Oran g	172,00		172,00		172,00		169,00		171,00		168,00		165,00		165,00		95,93		165,00		95,93		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGA T TINGGI
					Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Oran g	524,00		504,00		504,00		498,00		520,00		520,00		602,00		602,00		119,44		602,00		114,89		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI
					Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Perse n	0,21		0,29		0,29		0,00		0,13		0,24		0,26		0,26		111,54		0,26		80,77		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI
					Persentase Pemberhentian ASN	Perse n	6,16		5,73		5,73		1,00		2,00		3,59		5,63		5,63		98,25		5,63		91,40		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp			Kin erja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Perse n	1,93		2,15		2,15		0,00		0,00		1,45		1,83		1,83		85,12		1,83		94,82		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINGGI	
					Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGA T TINGGI	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							4.620.000.000		1.425.000.000		3.668.619.300		262.500.000		327.080.000		2.579.761.700		3.526.733.900		3.526.733.900	124,78	96,13		3.526.733.900	110,00	76,34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	5.04.02	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia							4.620.000.000		1.425.000.000		3.668.619.300		262.500.000		327.080.000		2.579.761.700		3.526.733.900		3.526.733.900	96,13		3.526.733.900	76,34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	30,00		25,00		25,00		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		100,00		25,00		83,33		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGA T TINGGI	
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Perse n	1,15		1,00		1,00		0,70		1,20		1,20		1,20		1,20		120,00		1,20		104,35		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI	
					Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Perse n	63,85		51,01		51,01		0,00		0,00		48,60		68,00		68,00		133,31		68,00		106,50		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAM PAUI	
					Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Perse n	2,86		2,86		2,86		0,00		0,00		0,95		4,17		4,17		145,80		4,17		145,80		Badan Kepegawaian dan Pengembangan	MELAM PAUI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																													Sumber Daya Manusia	
	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT						91.804.752.174		30.124.030.316		29.229.639.616		4.499.242.491		13.598.425.004		17.998.037.708		25.676.955.865		25.676.955.865	81,71	87,85		25.676.955.865	82,77	27,97	Inspektorat	TINGGI
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						91.804.752.174		30.124.030.316		29.229.639.616		4.499.242.491		13.598.425.004		17.998.037.708		25.676.955.865		25.676.955.865	81,71	87,85		25.676.955.865	82,77	27,97	Inspektorat	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	6.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						78.264.752.174		25.699.030.316		24.530.669.616		4.127.136.491		12.152.740.004		15.722.702.708		21.748.933.065		21.748.933.065	88,66			21.748.933.065	27,79		Inspektorat	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Inspektorat	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.01.02	Program : Penyelenggaraan Pengawasan						10.135.000.000		3.280.000.000		3.047.950.000		372.106.000		1.006.589.000		1.646.049.000		2.627.044.000		2.627.044.000	86,19			2.627.044.000	25,92		Inspektorat	
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		100,00		3,00		100,00		Inspektorat	SANGAT TINGGI
					Persentase tindak lanjut temuan	Perse n	80,00		80,00		80,00		11,36		21,48		62,53		62,47		62,47		78,09		62,47		78,09		Inspektorat	TINGGI
					Jumlah temuan BPK	Laporan	8,00		10,00		10,00		0,00		4,00		4,00		4,00		4,00		40,00		4,00		50,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH
					Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		61,43		85,50		91,58		95,65		95,65		95,65		95,65		95,65		Inspektorat	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.01.03	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						3.405.000.000		1.145.000.000		1.651.020.000		0	0	439.096.000		629.286.000		1.300.978.800		1.300.978.800		78,80		1.300.978.800		38,21	Inspektorat	
					Capaian MCP KPK	Person	83,00		81,00		81,00		0,00		0,00		55,00		87,68		87,68		108,25		87,68		105,64	Inspektorat	MELAM PAUI	
					Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		50,00		1,00		50,00	Inspektorat	SANGAT RENDAH	
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN JATILUHUR						10.622.037.440		3.485.424.995		3.577.340.893		795.403.822		1.387.329.700		2.172.180.002		3.108.960.517		3.108.960.517		88,91		3.108.960.517		88,91	Kecamatan Jatiluhur	TINGGI
	7.01	KECAMATAN						10.622.037.440		3.485.424.995		3.577.340.893		795.403.822		1.387.329.700		2.172.180.002		3.108.960.517		3.108.960.517		88,91		3.108.960.517		88,91	Kecamatan Jatiluhur	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.301.437.440		3.386.324.995		3.366.107.293		773.314.222		1.365.240.100		2.067.762.402		2.919.947.917		2.919.947.917		86,75		2.919.947.917		28,35	Kecamatan Jatiluhur	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT TINGGI	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						27.000.000		7.000.000		111.771.000		0		0		32.028.000		100.180.000		100.180.000		89,63		100.180.000		371,04	Kecamatan Jatiluhur	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik t Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			94.100.000		28.600.000		30.704.600		22.089.600		22.089.600		22.089.600		27.504.600		27.504.600		89,58		27.504.600		29,23	Kecamatan Jatiluhur	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		71,94		71,94		71,94		89,58		89,58		89,58		89,58		89,58		Kecamatan Jatiluhur	TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			26.500.000		7.500.000		5.213.000		0		0		0		5.213.000		5.213.000		100,00		5.213.000		19,67	Kecamatan Jatiluhur	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			78.000.000		25.000.000		50.300.000		0		0		50.300.000		50.300.000		50.300.000		100,00		50.300.000		64,49	Kecamatan Jatiluhur	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					95.000.000		30.000.000		13.245.000			0		0		0		5.815.000		5.815.000		43,90		5.815.000		61,2	Kecamatan Jatiluhur		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		43,90		43,90		43,90		43,90		43,90		Kecamatan Jatiluhur	SANGA T RENDAH	
	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SUKASARI						9.863.320.481		3.236.466.067		3.472.035.789		676.119.234		1.479.182.389		2.359.983.519		3.234.263.166		3.234.263.166		91,67	93,15		3.234.263.166	91,67	32,79	Kecamatan Sukasari	SANGA T TINGGI
	7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.472.035.789		676.119.234		1.479.182.389		2.359.983.519		3.234.263.166		3.234.263.166		91,67	93,15		3.234.263.166	91,67	32,79	Kecamatan Sukasari	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					9.476.816.065		3.130.982.955		3.259.850.189		662.647.634		1.465.710.789		2.230.673.919		3.036.951.566		3.036.951.566		93,16		3.036.951.566		32,05	Kecamatan Sukasari			
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		B		B		B		B		B		100,00		B		100,00		Kecamatan Sukasari	SANGA T TINGGI	
Sasaran 14 : Meningkatkan	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					43.784.450		12.784.450		100.000.000			0		0		49.035.000		89.360.000		89.360.000		89,36		89.360.000		204,09	Kecamatan Sukasari		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyel en ggaan Pemerint ahan Daerah melalui penerapa n SPBE																														
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predi kat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,0 0		Baik		100,0 0		Kecamatan Sukasari	SANGA T TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			71.604.750		21.704.750		5.851.000		0		0		0		2.130.000		2.130.000		36, 40		2.130.000		2,9 7	Kecamatan Sukasari	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Kecamatan Sukasari	SANGA T RENDAH
Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			10.500.000		3.000.000		3.721.000		0		0		3.721.000		3.721.000		3.721.000		100 ,00		3.721.000		35, 44	Kecamatan Sukasari	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Kecamatan Sukasari	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyel en ggaan	7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			112.426.06 6		26.914.762		58.480.000		0		0		58.480.000		58.480.000		58.480.000		100 ,00		58.480.000		52, 02	Kecamatan Sukasari	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu a 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Pemerint ahan Daerah																															
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Sukasari	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningka tnya Maturitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						148.189.150		41.079.150		44.133.600		13.471.600		13.471.600		18.073.600		43.620.600		43.620.600		98,84		43.620.600		29,44	Kecamatan Sukasari		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		12,50		12,50		25,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Sukasari	SANGA T TINGGI
	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN MANIIS						9.104.603.519		2.987.507.138		3.433.457.234		645.716.856		1.469.919.361		2.260.867.308		3.232.226.440		3.232.226.440		77,63	94,14		3.232.226.440	77,63	35,50	Kecamatan Manlis	TINGGI
	7.01	KECAMATAN						9.104.603.519		2.987.507.138		3.433.457.234		645.716.856		1.469.919.361		2.260.867.308		3.232.226.440		3.232.226.440		77,63	94,14		3.232.226.440	77,63	35,50	Kecamatan Manlis	
Sasaran 14 : Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah melalui penerapa n SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						8.680.317.494		2.861.568.444		3.211.933.734		645.716.856		1.445.975.861		2.205.411.808		3.084.075.440		3.084.075.440		96,02		3.084.075.440		35,53	Kecamatan Manlis		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	B		B		B		BB		BB		BB		BB		BB		114,29		BB		114,29		Kecamatan Manlis	MELAM PAUI	
Sasaran 14 : Meningka	7.01.02	Program : Penyelenggaraan						127.500.000		40.500.000		118.485.000				3.536.500		3.536.500		65.278.000		65.278.000		55,09		65.278.000		51,20	Kecamatan Manlis		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyelenggaraan Pemerint ahan Daerah melalui penerap an SPBE		Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																												
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predi kat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,0 0		Baik		100,0 0		Kecamatan Manilis	SANGA T TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						108.286.025		29.438.694		22.740.000		0		8.925.000		11.025.000		14.397.000		14.397.000		63,31		14.397.000		13,30	Kecamatan Manilis	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		30,00		45,00		63,00		63,00		63,00		63,00		63,00		Kecamatan Manilis	REND A H
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentra man dan Kerukuna n Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum						17.500.000		5.000.000		6.600.000		0		0		1.050.000		4.278.000		4.278.000		64,82		4.278.000		24,45	Kecamatan Manilis	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		25,00		64,81		64,81		64,81		64,81		64,81		Kecamatan Manilis	REND A H
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						81.000.000		26.000.000		56.247.000		0		11.482.000		39.844.000		54.294.000		54.294.000		96,53		54.294.000		67,03	Kecamatan Manilis	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Pemerintahan Daerah																																
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		0,00		35,00		75,00		67,00		67,00		67,00		67,00		67,00		Kecamatan Manilis	SEDANG		
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							90.000.000		25.000.000		17.451.500		0		0		0		9.904.000		9.904.000		56,75		9.904.000		11,00	Kecamatan Manilis		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		56,70		56,70		56,70		56,70		56,70		Kecamatan Manilis	RENDAH		
	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN TEGALWARU							10.622.037.440		3.485.424.995		3.353.987.728		682.815.027		1.321.533.631		2.132.903.456		2.979.702.118		2.979.702.118		65,54	88,84		2.979.702.118	65,54	28,05	Kecamatan Tegalwaru	SEDANG
	7.01	KECAMATAN							10.622.037.440		3.485.424.995		3.353.987.728		682.815.027		1.321.533.631		2.132.903.456		2.979.702.118		2.979.702.118		65,54	88,84		2.979.702.118	65,54	28,05	Kecamatan Tegalwaru	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.977.503.739		3.283.584.092		3.046.001.828		644.071.127		1.263.301.731		2.008.961.556		2.755.716.218		2.755.716.218		90,47		2.755.716.218		27,62	Kecamatan Tegalwaru		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT TINGGI		
Sasaran 14 :	7.01.02	Program : Penyelenggaraan							108.000.000		35.500.000		135.128.000		2.580.000		13.811.000		29.029.000		124.073.000		124.073.000		91,82		124.073.000		114,88	Kecamatan Tegalwaru		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik t Kin erja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyel en g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h m e l a l u i p e n e r a p a n S P B E		Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																												
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predi kat	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,2 5		Sangat Baik		113,2 5		Kecamatan Tegalwaru	MELAM PAUI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						117.580.90 3		37.970.903		43.313.900		23.767.90 0		23.767.900		23.767.900		23.767.900		23.767.900		54, 87		23.767.900		20, 21	Kecamatan Tegalwaru	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		Kecamatan Tegalwaru	REND A H
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentra man dan Kerukuna n Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						42.150.000		13.450.000		12.161.000		0		0		0		0		0		0,0 0		0		0,0 0	Kecamatan Tegalwaru	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Tegalwaru	SANG A T REND A H
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						216.882.79 8		64.050.000		68.459.000		12.396.00 0		12.396.000		62.888.000		67.888.000		67.888.000		99, 17		67.888.000		31, 30	Kecamatan Tegalwaru	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah																														
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		100,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Kecamatan Tegalwaru	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningka tnya Maturitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah	7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			159.920.00 0		50.870.000		48.924.000			0		8.257.000		8.257.000		8.257.000			16, 88		8.257.000		5,1 6	Kecamatan Tegalwaru	
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGA T REND AH
	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PLERED						10.622.037 .440		3.485.424. 995		3.805.578. 442		948.829.5 93		1.631.351. 666		2.610.165. 984		2.374.006. 121		2.684.667. 984	95,8 3	70, 55		2.684.667. 984	95,8 3	25, 27	Kecamatan Plered	SANGA T TINGGI
	7.01	KECAMATAN						10.622.037 .440		3.485.424. 995		3.805.578. 442		948.829.5 93		1.631.351. 666		2.610.165. 984		2.374.006. 121		2.684.667. 984	95,8 3	70, 55		2.684.667. 984	95,8 3	25, 27	Kecamatan Plered	
Sasaran 14 : Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah melalui penerapa n SPBE	7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10.324.395 .422		3.391.924. 995		3.617.275. 586		926.201.6 93		1.608.723. 766		2.547.976. 084		2.237.314. 221		2.547.976. 084	70, 44		2.547.976. 084		24, 68	Kecamatan Plered		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predi kat	BB		BB		BB		CC		CC		CC		CC		CC		75,00		CC		75,00		Kecamatan Plered	SEDAN G



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02			Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				21.800.000		7.500.000		107.274.956		0		0		7.362.000		81.864.000		81.864.000		76,31		81.864.000		375,52	Kecamatan Plered	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Plered	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03			Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				69.000.000		23.000.000		33.327.900		22.627.900		22.627.900		22.627.900		22.627.900		22.627.900		67,89		22.627.900		32,79	Kecamatan Plered	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		67,89		67,89		67,89		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Plered	SANGAT TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04			Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				5.000.000		2.000.000		2.000.000		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Plered	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Plered	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan	7.01.05			Program : Penyelenggaraan Urusan				133.500.000		35.500.000		35.700.000		0		0		26.200.000		26.200.000		26.200.000		73,39		26.200.000		19,63	Kecamatan Plered	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
tnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Umum																														
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		73,39		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Plered	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						68.342.018		25.500.000		10.000.000			0		0		6.000.000		6.000.000		6.000.000		60,00		6.000.000		8,78	Kecamatan Plered		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		60,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Plered	SANGA T TINGGI	
	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SUKATANI						12.139.471.361		3.983.342.851		3.933.546.775			775.665.208		1.648.184.740		2.624.096.952		3.480.660.637		3.480.660.637		100,00	88,49		3.480.660.637	100,00	28,67	Kecamatan Sukatani	SANGA T TINGGI
	7.01	KECAMATAN						12.139.471.361		3.983.342.851		3.933.546.775			775.665.208		1.648.184.740		2.624.096.952		3.480.660.637		3.480.660.637		100,00	88,49		3.480.660.637	100,00	28,67	Kecamatan Sukatani	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					11.826.263.602		3.881.427.939		3.723.982.151			775.665.208		1.625.913.740		2.549.525.952		3.344.204.637		3.344.204.637		89,80		3.344.204.637		28,28	Kecamatan Sukatani			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					23.600.000		7.000.000		116.410.000				6.390.000		8.390.000		50.443.000		50.443.000		43,33		50.443.000		213,74	Kecamatan Sukatani			
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Predikat	Baik		Baik		Baik				Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					32.500.000		10.500.000		13.000.000						5.000.000		13.000.000		13.000.000		100,00		13.000.000		40,00	Kecamatan Sukatani			
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan			Persen	100,00		100,00		100,00						50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					26.500.000		8.500.000		5.500.000						2.000.000		3.500.000		3.500.000		63,64		3.500.000		13,21	Kecamatan Sukatani			
		Tingkat penyelesaian konflik sosial			Persen	100,00		100,00		100,00						100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik- ta- kin- er- ja ta- hu- n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin- er- ja	Rp	Kinerja	Rp	Kin- er- ja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						165.160.000		54.600.000		54.000.000						43.300.000		49.300.000		49.300.000	91,30		49.300.000	29,85	Kecamatan Sukatani			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse- n	100,00		100,00		100,00				40,00		90,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	Kecamatan Sukatani	SANGA- T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						65.447.759		21.314.912		20.654.624				15.881.000		15.881.000		20.213.000		20.213.000	97,86		20.213.000	30,88	Kecamatan Sukatani			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse- n	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		80,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	Kecamatan Sukatani	SANGA- T TINGGI	
	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN DARANGDAN						11.380.754.400		3.734.383.923		4.418.075.072		917.995.163		1.854.766.608		2.971.905.296		4.002.675.311		4.014.777.311	102,21	90,87		4.014.777.311	102,21	35,28	Kecamatan Darangdan	MELAM PAUI
	7.01	KECAMATAN						11.380.754.400		3.734.383.923		4.418.075.072		917.995.163		1.854.766.608		2.971.905.296		4.002.675.311		4.014.777.311	102,21	90,87		4.014.777.311	102,21	35,28	Kecamatan Darangdan	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.734.754.400		3.523.383.923		3.685.408.272		872.630.263		1.658.008.708		2.546.399.296		3.373.478.911		3.373.478.911	91,54		3.373.478.911	31,43	Kecamatan Darangdan			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			69.000.000		20.000.000		513.398.000		1.218.000		138.815.000		228.975.000		443.971.500		443.971.500		86,48		443.971.500		643,44	Kecamatan Darangdan	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Darangdan	MELAMPAU
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			64.000.000		20.000.000		16.863.000		6.132.000		9.247.000		13.542.000		11.820.000		13.542.000		80,31		13.542.000		21,16	Kecamatan Darangdan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			25.000.000		10.000.000		6.372.000		4.310.000		4.310.000		6.060.000		4.780.000		6.060.000		95,10		6.060.000		24,24	Kecamatan Darangdan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Darangdan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					364.000.000		120.000.000		149.858.000		17.200.000		17.200.000		149.744.000		140.644.000		149.744.000		99,92		149.744.000		41,14	Kecamatan Darangdan			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Darangdan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					124.000.000		41.000.000		46.175.800		16.504.900		27.185.900		27.185.000		27.980.900		27.980.900		60,60		27.980.900		22,57	Kecamatan Darangdan			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Darangdan	SANGA T TINGGI	
	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN BOJONG						11.380.754.400		3.734.383.923		4.191.011.744		703.565.590		1.424.412.882		2.480.476.773		3.567.262.747		3.567.262.747		104,29	85,12		3.567.262.747	104,29	31,34	Kecamatan Bojong	MELAM PAUI
	7.01	KECAMATAN						11.380.754.400		3.734.383.923		4.191.011.744		703.565.590		1.424.412.882		2.480.476.773		3.567.262.747		3.567.262.747		104,29	85,12		3.567.262.747	104,29	31,34	Kecamatan Bojong	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.851.754.400		3.562.383.923		3.794.508.744		673.677.590		1.388.544.882		2.355.688.773		3.308.792.747		3.308.792.747		87,20		3.308.792.747		30,49	Kecamatan Bojong			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik t Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Daerah melalui penerapan SPBE																															
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		A		A		A		A		A		112,50		A		112,50		Kecamatan Bojong	MELAMPAU	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						73.000.000		23.000.000		228.511.000						11.885.000		138.067.000		138.067.000		60,42		138.067.000		189,13		Kecamatan Bojong	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Bojong	MELAMPAU	
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						30.000.000		10.000.000		8.020.000								1.760.000		1.760.000		21,95		1.760.000		5,87		Kecamatan Bojong	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bojong	SANGAT TINGGI	
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						24.000.000		8.000.000		9.450.000								3.500.000		3.500.000		37,04		3.500.000		14,58		Kecamatan Bojong	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bojong	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					300.000.000		100.000.000		97.860.000		5.460.000		10.920.000		86.940.000		86.940.000		86.940.000		88,84		86.940.000		28,98	Kecamatan Bojong		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bojong	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					102.000.000		31.000.000		52.662.000		24.428.000		24.948.000		25.963.000		28.203.000		28.203.000		53,55		28.203.000		27,65	Kecamatan Bojong		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		50,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bojong	SANGAT TINGGI
	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN WANAYASA						11.380.754.400		3.734.383.923		4.105.537.856		1.124.547.110		1.738.464.024		1.911.362.624		3.812.368.217		3.812.368.217	100,00	92,86		3.812.368.217	100,00	33,50	Kecamatan Wanayasa	SANGAT TINGGI
	7.01	KECAMATAN						11.380.754.400		3.734.383.923		4.105.537.856		1.124.547.110		1.738.464.024		1.911.362.624		3.812.368.217		3.812.368.217	100,00	92,86		3.812.368.217	100,00	33,50	Kecamatan Wanayasa	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.973.754.400		3.617.383.923		3.880.023.856		1.107.458.110		1.709.585.024		1.813.427.624		3.662.968.217		3.662.968.217		94,41		3.662.968.217		33,38	Kecamatan Wanayasa		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB				BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			26.000.000		7.000.000		112.600.000		2.100.000		10.150.000		20.395.000		59.825.000		59.825.000		53,13		59.825.000		230,10	Kecamatan Wanayasa	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik				Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			54.000.000		18.000.000		4.905.000						735.000		735.000		735.000		14,98		735.000		1,36	Kecamatan Wanayasa	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00						100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan	7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			18.000.000		6.000.000		3.360.000				840.000		840.000		1.680.000		1.680.000		50,00		1.680.000		9,33	Kecamatan Wanayasa	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggara n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu a 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Masyarak at																																
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00						75,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Kecamatan Wanayasa	SANGA T TINGGI		
Sasaran 15 : Meningka tnya Maturitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah	7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			127.500.00 0		35.000.000		41.777.000						40.877.000		41.777.000		41.777.000		100 ,00		41.777.000		32, 77	Kecamatan Wanayasa			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00						75,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Kecamatan Wanayasa	SANGA T TINGGI		
Sasaran 15 : Meningka tnya Maturitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah	7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			181.500.00 0		51.000.000		62.872.000		14.989.00 0		17.889.000		35.088.000		45.383.000		45.383.000		72, 18		45.383.000		25, 00	Kecamatan Wanayasa			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		31,25				75,00		100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,0 0		Kecamatan Wanayasa	SANGA T TINGGI		
	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KIARAPEDES						10.622.037.440		3.485.424.995		3.786.344.808		866.339.625		988.277.568		2.844.141.621		3.622.327.582		3.622.327.582		102,38	95,67		3.622.327.582		102,38	34,10	Kecamatan Kiarapedes	MELAM PAUI
	7.01	KECAMATAN						10.622.037.440		3.485.424.995		3.786.344.808		866.339.625		988.277.568		2.844.141.621		3.622.327.582		3.622.327.582		102,38	95,67		3.622.327.582		102,38	34,10	Kecamatan Kiarapedes	
Sasaran 14 : Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarak at terhadap Penyelen	7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10.496.037.440		3.445.424.995		3.601.501.808		851.031.625		923.523.568		2.697.751.621		3.424.714.582		3.424.714.582		95,09		3.424.714.582		32,63	Kecamatan Kiarapedes			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ggaraan Pemerintah an Daerah melalui penerapan SPBE																																	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		0,00		BB		BB		BB		BB		BB				114,29		BB		114,29	Kecamatan Kiarapedes	MELAMPAU
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						17.000.000		5.000.000		105.000.000				43.560.000		96.210.000		104.970.000		104.970.000		99,97		104.970.000		617,47	Kecamatan Kiarapedes				
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik					Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		100,00	Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI	
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						15.000.000		5.000.000		4.750.000				2.980.000		4.345.000		4.750.000		4.750.000		100,00		4.750.000		31,67	Kecamatan Kiarapedes				
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI		
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						15.000.000		5.000.000		5.054.000				4.304.000		4.304.000		5.054.000		5.054.000		100,00		5.054.000		33,69	Kecamatan Kiarapedes				



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
n Masyarakat																														
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			34.000.000		10.000.000		60.524.000		15.308.000		9.080.000		34.216.000		73.324.000		73.324.000		121,15		73.324.000		215,66	Kecamatan Kiarapedes	
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.000.000		15.000.000		9.515.000				4.830.000		7.315.000		9.515.000		9.515.000		100,00		9.515.000		21,14	Kecamatan Kiarapedes	
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00				100,00		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGA T TINGGI
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN PASAWAHAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.454.561.079		624.581.089		1.420.143.864		2.411.647.840		3.281.037.998		3.281.037.998		101,94		3.281.037.998		101,33	Kecamatan Pasawahan	MELAM PAUI
	7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.454.561.079		624.581.089		1.420.143.864		2.411.647.840		3.281.037.998		3.281.037.998		101,94		3.281.037.998		101,33	Kecamatan Pasawahan	
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.615.369.589		3.182.916.067		3.191.436.079		595.881.089		1.340.960.364		2.250.030.340		3.022.429.498		3.022.429.498		94,70		3.022.429.498		31,43	Kecamatan Pasawahan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB				BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						16.000.000		0		100.000.000				0				96.784.000		96.784.000		96,78		96.784.000		604,90	Kecamatan Pasawahan	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik				Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Pasawahan	MELAMPAU
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						97.000.000		30.000.000		42.673.000		28.700.000		40.173.000		42.405.000		42.405.000		42.405.000		99,37		42.405.000		43,72	Kecamatan Pasawahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		19,11		26,75		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						0		0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pasawahan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kerukuna n Masyarak at																															
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningka tnya Maturitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						51.000.000		0		43.400.000		0		0		43.400.000		43.400.000		43.400.000		100,00		43.400.000		85,10	Kecamatan Pasawahan		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		85,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningka tnya Maturitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						83.950.892		23.550.000		77.052.000		0		39.010.500		75.812.500		76.019.500		76.019.500		98,66		76.019.500		90,55	Kecamatan Pasawahan		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		90,00				98,66		98,66		98,66		98,66		98,66		Kecamatan Pasawahan	SANGA T TINGGI	
	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN PONDOKSALAM						10.622.037.440		3.485.424.995		3.605.769.007		723.153.424		1.451.684.598		2.348.130.759		3.233.762.106		3.233.762.106		96,87	89,68		3.233.762.106	96,87	30,44	Kecamatan Pondoksalam	SANGA T TINGGI
	7.01	KECAMATAN						10.622.037.440		3.485.424.995		3.605.769.007		723.153.424		1.451.684.598		2.348.130.759		3.233.762.106		3.233.762.106		96,87	89,68		3.233.762.106	96,87	30,44	Kecamatan Pondoksalam	
Sasaran 14 : Meningka tnya Akuntabil itas Publik dan Kepuasan Masyarakat	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.131.123.626		3.327.552.609		3.293.715.807		687.681.824		1.405.562.998		2.180.169.159		2.957.960.506		2.957.960.506		89,81		2.957.960.506		29,20	Kecamatan Pondoksalam		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
at terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			130.800.000		42.500.000		100.000.000		0		0		0		86.900.000		86.900.000		86,90		86.900.000		66,44	Kecamatan Pondoksalam	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			16.500.000		5.000.000		21.300.000		0		10.650.000		10.650.000		21.300.000		21.300.000		100,00		21.300.000		129,09	Kecamatan Pondoksalam	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT TINGGI
Sasaran 17 : Meningkat	7.01.04				Program : Koordinasi			27.600.000		8.000.000		10.650.000		0		0		10.650.000		10.650.000		10.650.000		100,00		10.650.000		38,59	Kecamatan Pondoksalam	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
tnya Ketentra man dan Kerukuna n Masyarak at		Ketentraman Dan Ketertiban Umum																													
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						176.537.814		57.372.386		155.190.000		22.000.000		22.000.000		133.190.000		133.190.000		133.190.000		85,82		133.190.000		75,45	Kecamatan Pondoksalam		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		14,18		14,18		85,82		85,82		85,82		85,82		85,82		85,82		Kecamatan Pondoksalam	TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						139.476.000		45.000.000		24.913.200		13.471.600		13.471.600		13.471.600		23.761.600		23.761.600		95,38		23.761.600		17,04	Kecamatan Pondoksalam		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		54,07		54,07		54,07		95,38		95,38		95,38		95,38		95,38		Kecamatan Pondoksalam	SANGA T TINGGI	
	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN PURWAKARTA						69.043.243.370		22.655.262.469		25.569.021.962		4.816.402.443		10.422.283.650		16.511.512.459		23.389.947.262		23.389.947.262		91,10	91,48		23.389.947.262	91,10	33,88	Kecamatan Purwakarta	SANGA T TINGGI
	7.01	KECAMATAN						69.043.243.370		22.655.262.469		25.569.021.962		4.816.402.443		10.422.283.650		16.511.512.459		23.389.947.262		23.389.947.262		91,10	91,48		23.389.947.262	91,10	33,88	Kecamatan Purwakarta	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						44.822.799.780		14.829.743.173		16.121.700.944		3.318.352.443		6.975.370.550		10.789.286.428		14.815.058.807		14.815.058.807		91,90		14.815.058.807		33,05	Kecamatan Purwakarta		



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			330.000.000		110.000.000		610.712.018		0		10.520.000		39.981.500		256.449.000		256.449.000		41,99		256.449.000		77,71	Kecamatan Purwakarta	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Purwakarta	MELAMPAU
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			23.155.180.150		7.499.760.050		8.663.849.000		1.498.050.000		3.435.393.100		5.655.979.531		8.274.874.455		8.274.874.455		95,51		8.274.874.455		35,74	Kecamatan Purwakarta	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahu n 2024		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						471.186.146		151.884.246		87.500.000		0		0		8.720.000		26.020.000		26.020.000		29,74		26.020.000		5,52	Kecamatan Purwakarta			
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Purwakarta	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						224.077.294		53.875.000		60.260.000		0		1.000.000		17.545.000		17.545.000		17.545.000		29,12		17.545.000		7,83	Kecamatan Purwakarta			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		33,33		33,33		33,33		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Purwakarta	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						40.000.000		10.000.000		25.000.000		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Purwakarta			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00	CCC	100,00		100,00		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33	Kecamatan Purwakarta	SANGA T RENDAH	
	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BABAKAN CIKAO						9.863.320.481		3.236.466.067		3.562.028.324		759.139.64		1.716.779.277		2.336.757.865		3.072.692.966		3.072.692.966		83,25	86,26		3.072.692.966		83,25	31,15	Kecamatan Babakan Cikao	TINGGI
	7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.562.028.324		759.139.64		1.716.779.277		2.336.757.865		3.072.692.966		3.072.692.966		83,25	86,26		3.072.692.966		83,25	31,15	Kecamatan Babakan Cikao	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabil	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						9.571.374.517		3.151.551.305		3.313.028.324		759.139.64		1.686.126.277		2.224.041.865		2.921.361.966		2.921.361.966		88,18		2.921.361.966		30,52	Kecamatan Babakan Cikao			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kt Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
itas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE																														
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			30.000.000		10.000.000		125.000.000			11.401.000		13.531.000		34.466.000		34.466.000		27,57		34.466.000		114,89		Kecamatan Babakan Cikao	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Babakan Cikao	MELAMPAU
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			66.000.000		22.000.000		30.000.000			19.252.000		19.252.000		27.452.000		27.452.000		91,51		27.452.000		41,59		Kecamatan Babakan Cikao	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		64,17		64,17		91,51		91,51		91,51		91,51		91,51		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						30.000.000		10.000.000		10.000.000						0		9.480.000		9.480.000	94,80		9.480.000	31,60	Kecamatan Babakan Cikao			
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00								94,80		94,80		94,80		94,80		94,80	Kecamatan Babakan Cikao	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						137.945.964		34.914.762		80.000.000						79.933.000		79.933.000		79.933.000	99,92		79.933.000	57,95	Kecamatan Babakan Cikao			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00						99,92		99,92		99,92		99,92		99,92		99,92	Kecamatan Babakan Cikao	SANGA T TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						28.000.000		8.000.000		4.000.000						0		0		0	0,00		0	0,00	0,00	Kecamatan Babakan Cikao		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Kecamatan Babakan Cikao	SANGA T REND AH	
	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN CAMPAKA						10.622.037.465		3.485.424.995		3.588.888.007		715.260.304		1.500.936.192		2.543.643.122		3.449.895.635		3.449.895.635	99,05	96,13		3.449.895.635	96,7	32,48	Kecamatan Campaka	SANGA T TINGGI
	7.01	KECAMATAN						10.622.037.465		3.485.424.995		3.588.888.007		715.260.304		1.500.936.192		2.543.643.122		3.449.895.635		3.449.895.635	99,05	96,13		3.449.895.635	96,7	32,48	Kecamatan Campaka	
Sasaran 14 : Meningkatnya	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan						10.226.112.465		3.358.024.995		3.307.839.207		695.602.404		1.450.618.292		2.417.375.222		3.195.185.735		3.195.185.735	96,59		3.195.185.735	31,25	Kecamatan Campaka			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE		Daerah Kabupaten/Kota																													
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		B		B				BB		BB		BB		BB			114,29		BB		100,00		Kecamatan Campaka	MELAMPAUI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						18.915.000		6.000.000		118.960.000				15.090.000		23.610.000		117.405.000		117.405.000		98,69		117.405.000		620,70	Kecamatan Campaka		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik				Baik		Baik		Baik		Baik			100,00		Baik		100,00		Kecamatan Campaka	SANGAT TINGGI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						46.341.750		14.700.000		21.529.000				0		0		19.836.000		19.836.000		92,14		19.836.000		42,80	Kecamatan Campaka		
					Persentase kegiatan pemberdayaan	Person	100,00		100,00		100,00				0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Campaka	SANGAT TINGGI	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					masyarakat yang dilaksanakan																										
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					43.200.000		14.400.000		14.260.000					4.260.000		6.390.000		13.110.000		13.110.000	91,94		13.110.000		30,35	Kecamatan Campaka			
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Person	100,00		100,00		100,00				25,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Campaka	SANGAT TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					218.468.250		69.300.000		77.394.000					7.050.000		72.350.000		72.350.000		72.350.000	93,48		72.350.000		33,12	Kecamatan Campaka			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00				40,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	Kecamatan Campaka	TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					69.000.000		23.000.000		48.905.800		19.657.900		23.917.900		23.917.900		32.008.900		32.008.900		65,45		32.008.900		46,39	Kecamatan Campaka			
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		25,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kecamatan Campaka	SANGAT TINGGI
	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN CIBATU					12.139.471,389		3.983.342,851		4.336.473,803		706.776,374		1.731.271,901		2.657.499,422		4.003.468,523		4.003.468,523	95,24	92,32		4.003.468,523	92,59	32,98	Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI		
	7.01	KECAMATAN					12.139.471,389		3.983.342,851		4.336.473,803		706.776,374		1.731.271,901		2.657.499,422		4.003.468,523		4.003.468,523	95,24	92,32		4.003.468,523	92,59	32,98	Kecamatan Cibatu			



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						11.599.471.389		3.783.342.851		4.001.758.507		706.776.274		1.716.561.901		2.642.789.422		3.559.531.323		3.559.531.323		88,95		3.559.531.323		30,69	Kecamatan Cibatu	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		B		B		C		C		C		C		C		71,43		C		55,56	Kecamatan Cibatu	SEDANG	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						120.000.000		45.000.000		197.664.500		0		0				162.186.700		162.186.700		82,05		162.186.700		135,16	Kecamatan Cibatu	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00	Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI	
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						75.000.000		30.000.000		0		0		0				75.000.000		75.000.000		0,00		75.000.000		100,00	Kecamatan Cibatu	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Pembangunan																															
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI	
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						75.000.000		30.000.000		0		0		0				75.000.000		75.000.000		0,00		75.000.000		100,00	Kecamatan Cibatu		
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Person	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						145.000.000		50.000.000		117.040.796		0		0				117.040.500		117.040.500		100,00		117.040.500		80,72	Kecamatan Cibatu		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI	
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						125.000.000		45.000.000		20.010.000		100		14.710.000		14.710.000		14.710.000		14.710.000		73,51		14.710.000		11,77	Kecamatan Cibatu		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Person	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI	
	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN BUNGURSARI						9.863.320.481		3.236.466.067		3.548.969.154		661.740.393		1.404.621.279		2.334.333.931		3.224.824.603		3.224.824.603		102,21	90,87		3.224.824.603	102,21	32,70	Kecamatan Bungursari	MELAMPAU



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.548.969.154		661.740.393		1.404.621.279		2.334.333.931		3.224.824.603		3.224.824.603	102,21	90,87		3.224.824.603	102,21	32,70	Kecamatan Bungursari	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						9.575.070.481		3.143.466.067		3.350.260.154		661.740.393		1.384.797.279		2.275.844.931		3.040.680.603		3.040.680.603		90,76		3.040.680.603		31,76	Kecamatan Bungursari	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predik kat	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGA T TINGGI
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						62.250.000		20.000.000		16.012.000		0		11.812.000		11.812.000		11.812.000		11.812.000		73,77		11.812.000		18,98	Kecamatan Bungursari	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predik kat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Bungursari	MELAM PAUJ
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						54.800.000		17.000.000		112.849.000		0		0		0		111.172.000		111.172.000		98,51		111.172.000		202,87	Kecamatan Bungursari	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
at dalam Pembangunan																														
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGA T TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentra man dan Kerukuna n Masyarakat	7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			31.400.000		10.000.000		10.650.000		0		0		0		7.630.000		7.630.000		71,64		7.630.000		24,30	Kecamatan Bungursari	
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah	7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			121.000.000		40.000.000		52.040.000		0		8.012.000		46.677.000		52.002.000		52.002.000		99,93		52.002.000		42,98	Kecamatan Bungursari	
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		25,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGA T TINGGI
Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah	7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.800.000		6.000.000		7.158.000		0		0		0		1.528.000		1.528.000		21,35		1.528.000		8,13	Kecamatan Bungursari	
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGA T TINGGI



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predik kt Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	8.01.0.00.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						31.989.961.466		10.509.398.223		50.255.218.434		799.669.525		32.480.192.175		46.124.698.552		49.709.171.913		49.709.171.913	91,93	98,91		49.709.171.913	91,93	155,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGA T TINGGI
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						31.989.961.466		10.509.398.223		50.255.218.434		799.669.525		32.480.192.175		46.124.698.552		49.709.171.913		49.709.171.913	91,93	98,91		49.709.171.913	91,93	155,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	8.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						12.598.644.384		4.088.634.734		3.890.001.934		778.114.525		1.422.810.675		2.607.760.552		3.846.657.498		3.846.657.498		98,89		3.846.657.498		30,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predik kt	A		A		A		A		A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGA T TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	8.01.02	Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						3.455.000.000		1.150.000.000		928.764.900		9.000.000		87.396.000		690.211.000		855.070.400		855.070.400		92,07		855.070.400		24,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perse n	100,00		100,00		100,00		1,54		9,40		74,31		92,06		92,06		92,06		92,06		92,06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGA T TINGGI
Sasaran 17 : Meningkatkan	8.01.03	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan						9.595.817.082		3.170.763.489		43.230.859.200				30.300.000.000		41.819.718.000		42.993.959.200		42.993.959.200		99,45		42.993.959.200		448,05	Badan Kesatuan	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satua n	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisas i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
tnya Ketentra man dan Kerukuna n Masyarak at		Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																										Bangsa dan Politik		
					Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades)	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		68,26		93,48		99,53		99,53		99,53		99,53		99,53		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGA T TINGGI
					Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		57,50		93,58		93,58		93,58		93,58		93,58		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGA T TINGGI
Sasaran 17 : Meningka tnya Ketentra man dan Kerukuna n Masyarak at	8.01.04	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						756.000.000		250.000.000		274.920.000		0		0		24.749.000		245.854.000		245.854.000		89,43		245.854.000		32,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		11,00		89,43		89,43		89,43		89,43		89,43		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TINGGI
Sasaran 17 : Meningka tnya Ketentra man dan Kerukuna n Masyarak at	8.01.05	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya						1.515.500.000		500.000.000		180.965.900		1.365.000		13.339.500		13.339.500		136.981.900		136.981.900		75,69		136.981.900		9,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Perse n	100,00		100,00		100,00		4,29		7,37		7,37		75,69		75,69		75,69		75,69		75,69		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TINGGI
Sasaran 17 : Meningka tnya Ketentra	8.01.06	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan						4.069.000.000		1.350.000.000		1.749.706.500		11.190.000		656.646.000		968.920.500		1.630.648.915		1.630.648.915		93,20		1.630.648.915		40,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran n RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predi kat Kiner ja Tahu n 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp	Kinerja	Rp	Kin erja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
man dan Kerukuna n Masyarakat at		Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																												
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Perse n	100,00		100,00		100,00		0,81		40,65		70,77		93,19		93,19		93,19		93,19		93,19		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGA T TINGGI

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja PD Tahun 2024 Triwulan IV



Sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1.

Adapun rekapitulasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024

NO.	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA	JUMLAH
1	$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH	45
2	$51\% \leq 65\%$	RENDAH	10
3	$66\% \leq 75\%$	SEDANG	20
4	$76\% \leq 90\%$	TINGGI	45
5	$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI	458
6	$> 100\%$	MELAMPAUI	137
JUMLAH			715

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja PD Tahun 2024 Triwulan IV



Tabel 3.7
Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan II (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan III (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan IV (%)		Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Triwulan Tahun 2024 (%)				Predikat Kinerja Tahun 2024
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KABUPATEN PURWAKARTA	KABUPATEN PURWAKARTA	42,40	12,82	59,41	39,42	75,85	61,18	103,84	92,26	27,61	49,41	68,51	98,05	SANGAT TINGGI
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		60,14	15,65	69,64	38,50	84,81	59,71	102,09	94,97	37,90	42,65	54,07	61,65	RENDAH
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		28,23	14,95	48,41	37,68	63,47	62,63	104,13	94,00	21,59	31,68	43,04	50,58	RENDAH
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		36,58	11,14	60,11	34,44	84,01	56,90	118,54	94,16	23,86	35,63	47,28	59,23	RENDAH
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		30,29	4,47	54,04	43,98	77,29	66,39	103,00	92,85	17,38	29,26	49,01	60,63	RENDAH
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		55,98	6,07	77,19	38,93	85,37	59,73	110,92	83,17	31,03	41,63	58,06	62,15	RENDAH
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		39,38	15,39	50,34	46,52	68,24	61,57	81,71	87,85	27,38	32,86	48,43	57,38	RENDAH
7.	UNSUR KEWILAYAHAN		39,60	19,99	55,72	40,34	74,82	64,74	93,03	89,89	29,80	37,85	48,03	57,58	RENDAH
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		15,23	1,59	32,24	64,63	59,20	91,78	91,93	98,91	8,41	16,92	48,44	61,92	RENDAH
1.01	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	92,50	17,53	93,43	46,66	97,42	64,28	107,72	96,89	55,01	70,04	80,85	102,31	MELAMP AUI
1.02	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	56,76	8,27	73,99	18,41	96,18	46,29	111,05	88,14	32,52	46,20	71,24	99,60	SANGAT TINGGI
1.02	BIDANG KESEHATAN	RSUD Bayu Asih	83,25	24,90	96,21	42,41	87,36	66,10	85,43	95,09	54,08	69,31	76,73	90,26	SANGAT TINGGI
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11,59	8,92	28,86	34,51	54,01	54,45	91,43	95,04	10,26	31,68	54,23	93,23	SANGAT TINGGI
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41,60	4,43	42,34	14,77	72,88	54,66	83,33	99,44	23,01	28,55	63,77	91,39	SANGAT TINGGI
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59,71	9,67	62,28	31,38	87,14	46,26	100,00	98,18	34,69	46,83	66,70	99,09	SANGAT TINGGI
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	34,14	22,85	52,00	47,25	73,57	69,41	100,00	92,87	28,50	49,63	71,49	96,43	SANGAT TINGGI
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54,81	13,86	58,40	28,89	96,64	59,45	100,00	87,94	34,34	43,64	78,04	93,97	SANGAT TINGGI
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	77,67	18,59	83,78	40,86	88,05	67,96	92,58	92,58	48,13	62,32	78,01	92,58	SANGAT TINGGI
1.06	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20,16	21,54	27,15	36,39	43,54	70,44	101,79	92,32	20,85	31,77	56,99	97,05	SANGAT TINGGI
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	51,80	13,23	55,27	38,53	75,89	59,88	176,31	91,18	32,52	46,90	67,89	133,75	MELAMP AUI
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26,40	7,56	30,24	24,50	52,87	49,75	108,44	86,79	16,98	27,37	51,31	97,62	SANGAT TINGGI
2.09	BIDANG PANGAN	Dinas Pangan dan Pertanian	9,00	19,98	40,50	40,06	49,50	66,81	102,50	95,06	14,49	40,28	58,16	98,78	SANGAT TINGGI
2.10	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	22,61	17,58	55,40	42,28	63,47	68,43	102,32	94,04	20,09	48,84	65,95	98,18	SANGAT TINGGI
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,46	18,39	98,87	47,51	101,06	71,90	102,94	93,15	57,92	73,19	86,48	98,05	SANGAT TINGGI
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,31	6,44	35,82	35,25	77,55	60,76	118,91	89,16	5,88	35,54	69,16	104,03	MELAMP AUI
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38,34	4,63	70,17	29,90	72,65	57,63	93,35	94,34	21,48	50,04	65,14	93,84	SANGAT TINGGI
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	60,40	18,66	63,06	39,14	60,11	60,63	63,03	96,13	39,53	51,10	60,37	79,58	TINGGI
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,40	9,79	28,98	18,01	45,50	49,95	101,39	97,38	14,59	23,49	47,72	99,38	SANGAT TINGGI
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3,72	23,87	21,63	40,80	51,69	62,05	97,19	90,85	13,79	31,21	56,87	94,02	SANGAT TINGGI



Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan II (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan III (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan IV (%)		Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Triwulan Tahun 2024 (%)				Predikat Kinerja Tahun 2024
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54,10	18,64	77,13	44,22	87,65	71,97	103,50	94,08	36,37	60,68	79,81	98,79	SANGAT TINGGI
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	8,27	11,89	46,49	43,63	59,08	62,46	99,36	92,94	10,08	45,06	60,77	96,15	SANGAT TINGGI
2.20	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,56	17,94	16,04	28,70	29,53	60,00	90,84	0,28	16,99	29,12	75,42	TINGGI
2.21	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	33,33	1,31	33,33	21,83	81,89	78,14	255,56	95,12	17,32	27,58	80,02	175,34	MELAMP AUI
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	0,23	0,61	9,95	26,63	54,10	72,34	99,71	99,54	0,42	18,29	63,22	99,63	SANGAT TINGGI
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27,12	18,75	39,31	39,62	54,72	63,35	113,38	94,31	22,94	39,47	59,03	103,85	MELAMP AUI
2.24	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3,55	3,91	40,61	47,12	45,25	73,96	99,54	92,08	3,73	43,87	59,60	95,81	SANGAT TINGGI
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan dan Peternakan	62,59	18,79	98,43	53,13	134,70	67,27	164,87	91,94	40,69	75,78	100,99	128,40	MELAMP AUI
3.26	BIDANG PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	12,53	11,78	32,21	35,04	50,66	58,71	93,88	92,50	12,15	33,62	54,69	93,19	SANGAT TINGGI
3.27	BIDANG PERTANIAN	Dinas Pangan dan Pertanian	55,64	3,24	58,32	7,55	70,64	35,59	125,68	97,74	29,44	32,94	53,11	111,71	MELAMP AUI
3.27	BIDANG PERTANIAN	Dinas Perikanan dan Peternakan	30,94	3,02	63,35	30,97	106,05	84,71	128,98	97,63	16,98	47,16	95,38	113,31	MELAMP AUI
3.30	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	19,21	2,04	35,20	28,67	42,07	45,16	95,38	85,72	10,63	31,93	43,61	90,55	SANGAT TINGGI
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	34,20	7,85	46,50	43,02	65,94	59,09	87,50	95,80	21,03	44,76	62,52	91,65	SANGAT TINGGI
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	0,00	40,00	40,52	40,00	83,09	40,00	83,09	0,00	40,26	61,55	61,55	RENDAH
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	12,59	3,26	39,11	36,32	68,57	56,71	106,41	88,20	7,93	37,72	62,64	97,30	SANGAT TINGGI
4.02	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	63,16	5,44	81,76	50,08	93,48	74,11	96,65	96,57	34,30	65,92	83,79	96,61	SANGAT TINGGI
5.01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	59,32	15,84	71,20	39,68	90,23	58,70	101,37	87,48	37,58	55,44	74,46	94,42	SANGAT TINGGI
5.02	KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah	75,60	4,12	101,76	39,59	101,76	60,62	120,60	83,76	39,86	70,67	81,19	102,18	MELAMP AUI
5.02	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	26,72	23,07	56,73	44,13	71,30	64,84	72,18	94,35	24,89	50,43	68,07	83,27	TINGGI
5.03	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64,65	9,60	89,85	27,76	89,31	41,43	108,12	57,94	37,12	58,80	65,37	83,03	TINGGI
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17,50	7,16	30,00	8,92	87,12	70,32	124,78	96,13	12,33	19,46	78,72	110,46	MELAMP AUI
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1,95	0,00	1,57	0,00	21,33	136,18	88,63	0,98	0,79	10,67	112,40	MELAMP AUI
5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	100,00	68,42	0,00	0,00	2,87	84,21	TINGGI
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	39,38	15,39	50,34	46,52	68,24	61,57	81,71	87,85	27,38	48,43	64,91	84,78	TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Jatiluhur	47,53	22,23	45,32	38,78	61,99	60,72	88,91	86,91	34,88	42,05	61,36	87,91	TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Sukasari	35,42	19,47	35,42	42,60	70,83	67,97	91,67	93,15	27,44	39,01	69,40	92,41	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Maniis	35,71	18,81	46,55	42,81	59,88	65,85	77,63	94,14	27,26	44,68	62,86	85,89	TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Tegalwaru	43,04	20,36	46,38	39,40	58,88	63,59	65,54	88,84	31,70	42,89	61,23	77,19	TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Plered	40,48	24,93	40,48	42,87	62,71	68,59	95,83	62,38	32,71	41,67	65,65	79,11	TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Sukatani	30,00	19,72	53,33	41,90	86,67	66,71	100,00	88,49	24,86	47,62	76,69	94,24	SANGAT TINGGI



Kode	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan II (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan III (%)		Tingkat Capaian Kinerja Triwulan IV (%)		Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Triwulan Tahun 2024 (%)				Predikat Kinerja Tahun 2024
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Darangdan	52,21	20,78	68,88	41,98	84,71	67,27	102,21	90,60	36,49	55,43	75,99	96,40	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Bojong	56,25	16,79	68,75	33,99	87,63	59,19	104,29	85,12	36,52	51,37	73,41	94,70	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Wanayasa	5,21	27,39	33,33	42,34	87,50	46,56	100,00	92,86	16,30	37,84	67,03	96,43	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Kiarapedes	16,67	22,88	85,71	26,10	102,38	75,12	85,71	95,67	19,77	55,91	88,75	90,69	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Pasawahan	32,35	18,08	64,46	41,11	81,67	69,81	101,99	94,98	25,22	52,78	75,74	98,48	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Pondoksalam	44,71	20,06	53,04	40,26	81,65	65,12	96,87	89,68	32,38	46,65	73,39	93,27	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Purwakarta	67,49	18,84	71,65	40,76	75,82	64,58	91,10	91,48	43,16	56,21	70,20	91,29	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Babakan Cikao	33,33	21,31	46,24	48,20	62,89	65,60	83,25	86,26	27,32	47,22	64,25	84,75	TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Campaka	4,17	19,93	54,88	41,82	65,71	70,88	99,05	96,13	12,05	48,35	68,29	97,59	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Cibatu	95,24	16,30	95,24	39,92	95,24	61,28	95,24	92,32	55,77	67,58	78,26	93,78	SANGAT TINGGI
7.01	KECAMATAN	Kecamatan Bungursari	33,33	18,65	37,50	39,58	45,83	65,77	102,21	90,87	25,99	38,54	55,80	96,54	SANGAT TINGGI
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,23	1,59	32,24	64,63	59,20	91,78	91,93	98,91	8,41	48,44	75,49	95,42	SANGAT TINGGI

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja PD Tahun 2024 Triwulan IV



3.3. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN NASIONAL

Pemerintah Kab. Purwakarta dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional telah dilakukan melalui sinkronisasi prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	PRIORITAS KABUPATEN PURWAKARTA
1	2
1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata.	4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
	5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
	6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Refotmasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama.	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.	8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024



Tabel 3.9
KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN PURWAKARTA
1	2
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
	5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
	6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
	8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja difokuskan pada indikator yang mendorong capaian program perangkat daerah;
2. Pagu anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendorong capaian program;
3. Pelaksanaan kegiatan - subkegiatan difokuskan pada kegiatan - subkegiatan yang mendukung capaian kinerja prioritas Perangkat Daerah.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi;
2. Penyerapan pagu anggaran masih belum optimal;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana.

4.2. TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN RKPD BERIKUTNYA

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

1. Tetap difokuskan pelaksanaan kegiatan yang mendorong capaian kinerja program perangkat daerah;
2. Lebih mematangkan perencanaan dan anggaran kegiatan ditahun perencanaan mendatang;
3. Menyediakan kebutuhan SDM yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Triwulan IV disusun untuk mengukur target capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi progres capaian kinerja yang belum optimal agar dilakukan perbaikan pada pelaksanaan RKPD tahun berikutnya. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi RKPD juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian kinerja pelaksanaan RKPD tahun 2024 Triwulan IV seyogyanya menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026, sehingga pelaksanaan dan perencanaan RKPD dapat terkendali sesuai hasil evaluasi demi mewujudkan konsistensi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.

5.2. REKOMENDASI

Pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan penyusunan RKPD tahun 2026 agar memperhatikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD ditahun berjalan pada tiap triwulannya, agar target kinerja yang belum tercapai atau masih rendah, dapat lebih ditingkatkan kembali, kemudian menginventarisir hambatan/kendala yang dihadapi serta menyusun strategi dan solusi penyelesaian permasalahan tersebut agar capaian target kinerja yang masih belum optimal tersebut dapat lebih ditingkatkan.

Permasalahan masih rendahnya capaian indikator kinerja program dibeberapa Perangkat Daerah perlu ditindaklanjuti dengan optimalisasi pengendalian internal oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi dan kurang berpotensi dalam mendongkrak pencapaian target kinerja program, kegiatan dan



kinerja utama perangkat daerah, khususnya indikator yang masih belum tercapai secara optimal.

Selain itu perlu kiranya dilakukan peningkatan kapasitas SDM bagi para pemangku kepentingan, khususnya aparatur perencana disetiap Perangkat Daerah agar memahami dalam penyusunan, perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama pemahaman mengenai pencapaian indikator kinerja utama yang disusun berdasarkan *Cascading* perencanaan, sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat lebih terukur, terarah dan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.